

Panduan

DUKUNGAN PEMULIHAN MATA PENCAHARIAN DAN PENGUATAN MASYARAKAT PASCABENCANA

Pembelajaran dari Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan
Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat
Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah

Januari 2021



**Panduan Dukungan Pemulihan Mata Pencaharian dan
Penguatan Masyarakat Pascabencana**

Januari, 2021

Kementerian PPN/Bappenas - JICA

Dokumen ini adalah panduan yang berisi langkah-langkah penyusunan dan pelaksanaan program pemulihan sosial-ekonomi pascabencana berdasarkan hasil pembelajaran yang diperoleh di lapangan.

Dokumen ini bebas digunakan, disalin, didistribusikan, dikirim, disusun ulang atau diadaptasi untuk tujuan non-komersial, selama mencantumkan sumber pada Panduan Dukungan Pemulihan Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana.

Umpan balik dan masukan untuk mengembangkan panduan ini lebih lanjut akan sangat dihargai.

Seluruh komentar hendaknya ditujukan ke:
@jica.cs livelihood@gmail.com

Silahkan pindai kode QR berikut untuk mengunduh dokumen versi digital



KATA PENGANTAR

Panduan Dukungan Pemulihan Mata Pencapaian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana telah dipublikasikan pada tahun 2019 melalui kerjasama teknis antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Panduan ini berisi pendekatan dan langkah-langkah untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program pemulihan mata pencapaian dan penguatan masyarakat pascabencana.

Panduan ini disusun berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdampak bencana tsunami, likuefaksi (*nalodo*), dan longsor akibat gempa bumi pada tanggal 28 September 2018, serta pengalaman pengurangan risiko bencana (PRB) di Jepang.

Tim melanjutkan kegiatan pemulihan mata pencapaian dan pemulihan masyarakat pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerapkan panduan edisi 2019 dalam program nasional Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2020, yaitu Program Bantuan Pemerintah bagi UMKM terdampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Di tahun 2020, terjadi pandemi global COVID-19 sehingga program di lapangan pun dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Berdasarkan pembelajaran yang terhimpun dari pelaksanaan kegiatan di 2019 dan program di 2020, termasuk penyesuaian dengan protokol kesehatan COVID-19, Panduan ini pun diperbarui.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi, khususnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

Jakarta, Januari 2021

Dr. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA.
Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Bappenas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v

1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	2
1.2	Tujuan Utama Panduan.....	3
1.3	Target Pengguna.....	4
1.4	Prinsip Dasar Pemulihan Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana.....	4
2	PENDEKATAN UTAMA PEMULIHAN MATA PENCAHARIAN DAN PENGUATAN MASYARAKAT PASCABENCANA	7
2.1	Memperkuat Gotong Royong.....	8
2.2	Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas.....	9
2.3	Memfasilitasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemulihan yang Berkelanjutan.....	10
2.4	Mempertimbangkan Perbedaan Kebutuhan dan Kondisi Masyarakat Terdampak pada Setiap Tahap Pemulihan dan Rekonstruksi	11
3	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN PEMULIHAN MATA PENCAHARIAN DAN PENGUATAN MASYARAKAT PASCABENCANA	12
3.1	Inklusif.....	13
3.2	Keberlanjutan.....	16
3.3	Kemandirian.....	17

4	LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN	18
	4.1 Perencanaan Kegiatan.....	21
	4.2 Penyeleksian Penerima Manfaat.....	31
	4.3 Pelaksanaan Kegiatan.....	38
	4.4 Pengawasan dan Pengendalian.....	44
5	PERAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KERANGKA KOORDINASI	49
	5.1 Kerangka Koordinasi dalam Konteks Pemulihan dan Rekonstruksi.....	50
	5.2 Usulan Kerangka Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota.....	54
	5.3 Peran dan Tanggung Jawab Para Pemangku Kepentingan.....	55
	5.4 Pemetaan Pemangku Kepentingan untuk Koordinasi Program/Kegiatan..	60
	LAMPIRAN	64
	1 Profil Kegiatan Percontohan di Kabupaten/Kota.....	65
	2 Program Edukasi Pengurangan Risiko Bencana.....	68
	3 Lembar Pengecekan Pelaksanaan Kegiatan.....	69
	4 Contoh SOP-Standard Operating Procedure.....	73
	5 Contoh Program Kegiatan - Studi Kasus.....	81
	6 Program Kegiatan Pemda di Sulawesi Tengah.....	102
	7 Contoh Kuesioner Survei Awal.....	107

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Keterkaitan antar Tahap dengan Intervensi.....	11
TABEL 2	Langkah-langkah Pelaksanaan Program/Kegiatan.....	19
TABEL 3	Contoh Penerapan Pendekatan Utama dalam Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan.....	20
TABEL 4	Kajian Awal Dampak Bencana terhadap Fasilitas Sub Sektor Ekonomi....	22
TABEL 5	Peran Utama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	60
TABEL 6	Peran Utama Lembaga Non Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lainnya.....	61
TABEL 7	Pemetaan Pemangku Kepentingan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan.....	63
TABEL 8	Program/Kegiatan yang dilaksanakan Pemda di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 dan 2019.....	102

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Penerapan Pendekatan Utama dalam Langkah-langkah Indikatif Proyek Pemulihan Mata Pencaharian & Penguatan Masyarakat Pascabencana....	19
GAMBAR 2	Kerangka Koordinasi pada Tahap Tanggap Darurat.....	53
GAMBAR 3	Kerangka Koordinasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahap Transisi....	55
GAMBAR 4	Usulan Kerangka Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota.....	54
GAMBAR 5	Jenis Program/Kegiatan Pemerintah Daerah	103
GAMBAR 6	Distribusi Sektor Program/Kegiatan NGO dan Mitra Pembangunan.....	105
GAMBAR 7	Jenis Program/Kegiatan NGO dan Mitra Pembangunan.....	106

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
AIDS		<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
ASEAN-ERAT	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara – Tim Tanggap Darurat dan Kajian	Association of South-East Asian Nations - Emergency Response and Assessment Team
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	State Budget
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Regional Budget
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	National Development Planning Agency
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Regional Development Planning Agency
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	National Disaster Management Authority
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Regional Disaster Management Authority
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil	Civil Society Organization
COVID-19		Corona Virus Disease-2019
DRR	Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Disaster Risk Reduction
Gol	Pemerintah Indonesia	Government of Indonesia

Singkatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
GRP	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Gross Regional Production
FAO	Organisasi Pangan Dunia	Food and Agriculture Organization
FSLH	Ketahanan Pangan dan Mata Pencaharian	Food Security and Livelihood
HIV		Human Immunodeficiency Virus
ICT	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Information and Communication Technology
IFRC	Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
IKM	Industri Kecil dan Menengah	Small Medium Industry (SMI)
IUMK	Izin Usaha Mikro Kecil	License of Micro and Small Enterprises
JICA	Badan Kerjasama Internasional Jepang	Japan International Cooperation Agency
JOCCIA	Pusat Koordinasi Operasi Bersama untuk Bantuan Internasional	Joint Operation Coordination Center for International Assistance
K/L	Kementerian/ Lembaga	Ministry/ Institution
LPDB-KUMKM	Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	The Agency of Revolving Fund Management for Cooperatives and Micro-Small-Medium Enterprises
LNGO	Lembaga Non Pemerintah lokal	Local NGO

Singkatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Micro, Small, and Medium Enterprises
MoU	Nota Kesepahaman	Memorandum of Understanding
NGO	Lembaga Non- Pemerintah	Non-Governmental Organisation
NIB	Nomor Induk Berusaha	Business Identification Number
OPD	Organisasi Perangkat Daerah	Regional Apparatus Organisation
UN OCHA	Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB	UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia	The Indonesian National Police
PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ministry of Public Works and Public Housing
PWDs	Penyandang Disabilitas	Person with Disabilities
RT	Rukun Tetangga	Neighborhood Association
RW	Rukun Warga	Community Association
SK	Surat Keputusan	Decree
SKU	Surat Keterangan Usaha	Business Certificate
SOP	Prosedur Tetap (Protap)	Standard Operating Procedure
TA	Pengaturan Teknis	Technical Arrangement
TNI	Tentara Nasional Indonesia	The Indonesian National Army Forces

Singkatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
ToT	Pelatihan untuk Pelatih/Instruktur	Training of Trainers
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME)
UNICEF	Dana Anak- Anak Perserikatan Bangsa - Bangsa	United Nations International Children's Emergency Fund
UNFPA	Dana Penduduk Perserikatan Bangsa - Bangsa	United Nations Fund for Population Activities
WASH	Air bersih, sanitasi dan higiene	Water, sanitation and hygiene
WG	Kelompok Kerja (Pokja)	Working Group
WFP	Program Pangan Dunia	World Food Program
WHO	Organisasi Kesehatan Dunia	World Health Organization

BAB-1

Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Utama Panduan
- 1.3 Target Pengguna
- 1.4 Prinsip Dasar Pemulihan Mata Pencarian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana



01

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan sebagainya. Bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan 129 gunung api aktif yang berada di jalur cincin api dan terletak di atas pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan kondisi hidrologis yang dapat memicu bencana alam lainnya, seperti tornado, curah hujan ekstrem, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Namun, bencana alam bukanlah satu-satunya yang dapat mengancam jiwa dan harta benda, ada pula bencana yang disebabkan oleh manusia yang seringkali terjadi di negara ini, antara lain pembakaran hutan dan lahan, konflik sosial, serta kegagalan teknologi.

Pada 28 September 2018, gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,5 pada kedalaman 10 km terjadi di sekitar jalur sesar Palu Koro dengan pusat gempa di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Akibat bencana alam ini, 4.340 korban jiwa meninggal dunia, hilang, dan tidak teridentifikasi serta terjadi kerusakan bangunan yang signifikan di wilayah terdampak bencana. Kegiatan masyarakat, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala pun menjadi lumpuh pasca kejadian gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi.

Selain itu, 53.182 KK di Provinsi Sulawesi Tengah terpaksa mengungsi dan kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana alam tersebut. Guna membantu pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana, pemerintah daerah menyediakan berbagai bantuan serta dukungan melalui APBD dan program pemulihan dari kementerian terkait (APBN). Instansi pemerintah di tingkat provinsi bekerja sama dengan kementerian terkait turut menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk pemulihan mata pencaharian. NGO, baik internasional maupun lokal, serta mitra pembangunan juga memberikan berbagai bantuan materiil, antara lain makanan dan peralatan.

Menyikapi peristiwa bencana dahsyat ini, Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Japan International Cooperation Agency (JICA) sepakat bekerja sama mendukung kegiatan pemulihan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui proyek kerjasama teknis yang disebut ***“Project for Development of Regional Disaster Risk Resilience Plan in Central Sulawesi in the Republic of Indonesia”***. Proyek ini memiliki empat keluaran utama, salah satunya adalah pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat pascabencana¹. Hingga September 2019, proyek telah melaksanakan tiga kegiatan percontohan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

Selain pelaksanaan kegiatan percontohan di tiga lokasi terdampak bencana, keluaran lain dari proyek ini adalah Panduan Dukungan Pemulihan Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana. Panduan ini berisi langkah-langkah dasar pelaksanaan kegiatan pascabencana berdasarkan hasil pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan di lapangan. **Panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat pascabencana** di wilayah terdampak lainnya.

1.2 Tujuan Utama Panduan

Tujuan utama buku panduan ini adalah **memberikan contoh prosedur pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat yang efektif di tingkat masyarakat serta intervensi yang tepat oleh instansi terkait** dalam penanganan daerah terdampak bencana serta berkontribusi terhadap masyarakat secara berkelanjutan.

Panduan ini dapat digunakan pada kondisi pandemi COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku

**Adaptasi
Program/
Kegiatan
dengan
Protokol
COVID-19**



¹ Empat keluaran utama proyek adalah “Penyiapan Kajian Risiko Bencana dan Peta Zona Rawan Bencana”, “Tata Ruang/Tata Wilayah berdasarkan Kajian Risiko Bencana”, “Dukungan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Tahan Bencana”, dan “Realisasi Pemulihan Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana”.

Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan panduan ini sebagai:

- *Referensi dalam penanganan bencana dan pembangunan kembali*
- *Pengenalan praktik baik dalam penganggaran (APBN/APBD)*
- *Referensi dalam koordinasi dan sinergi bantuan/ dukungan dari mitra pembangunan dan NGO*
- *Referensi program/kegiatan pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat pascabencana pada masa transisi.*

1.3 Target Pengguna

Target pengguna Panduan ini adalah instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan yang melaksanakan program pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat.



Khususnya, instansi yang lingkup kerjanya mencakup bidang perencanaan, koperasi dan UMKM, industri, pertanian, perikanan, dan sektor ekonomi lainnya, termasuk instansi yang memiliki keterkaitan terhadap bidang sosial, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, perlindungan anak, dan bidang pengurangan risiko bencana (PRB). Panduan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh Lembaga Non Pemerintah (NGO)/Organisasi Masyarakat Sipil dan mitra pembangunan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat pascabencana.

1.4 Prinsip Dasar Pemulihan Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana

Menyikapi bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah pada September 2018, Bappenas telah menyusun Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali di Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat kebijakan dan strategi pemulihan di setiap sektor dan prinsip dasar kegiatan pemulihan.

Panduan ini menerapkan prinsip dasar yang hampir serupa dengan **Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah** sebagai berikut:

1. Membangun kembali lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan (Built Back Better)

Pembangunan kembali tidak hanya sekedar mengembalikan masyarakat ke kondisi sebelum terjadinya bencana, tetapi juga kesempatan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan agar masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Strategi ini diterapkan dalam pemulihan di bidang rancang struktural bangunan, tata ruang, sosial, ekonomi, serta kelembagaan.

2. Holistik dan inklusif terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender dan keberagaman sudut pandang

Pemulihan dan pembangunan dilaksanakan secara komprehensif dan adil dengan mempertimbangkan seluruh aspek secara berimbang, seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pemulihan dilaksanakan dengan pengarusutamaan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta memberikan perhatian lebih terhadap aspek interseksionalitasnya.

3. Integratif, kolaboratif, dan partisipatif

Pemulihan dan pembangunan kembali dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk partisipasi proaktif masyarakat melalui koordinasi yang baik guna menjamin konsistensi dan efektivitas kegiatan.

4. Pemulihan yang inklusif terhadap kelompok rentan

Pemulihan dan pembangunan kembali dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, khususnya ekonomi, sosial, dan budaya yang sesuai dengan kelompok rentan.

5. Transparan dan akuntabel

Perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Mobilisasi sumber daya/pembiayaan

Pemulihan dan pembangunan kembali membutuhkan dukungan sumber daya/ pembiayaan dari berbagai pihak agar dapat memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar dan merata.

7. Pemantauan dan evaluasi

Pemulihan dan pembangunan kembali dilaksanakan secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan dengan pengawasan yang efektif dan menyeluruh.

8. Persiapan pengurangan risiko bencana di masa mendatang

Melalui pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dalam pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali, masyarakat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitasnya dalam hal ketangguhan bencana dan pengurangan risiko bencana di masa mendatang.

02



BAB-2

Pendekatan Utama Pemulihan Mata Pencaharian & Penguatan Masyarakat Pascabencana

- 2.1 Memperkuat Gotong Royong
- 2.2 Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas
- 2.3 Memfasilitasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemulihan yang Berkelanjutan
- 2.4 Mempertimbangkan Perbedaan Kebutuhan dan Kondisi Masyarakat Terdampak pada Setiap Tahap Pemulihan dan Rekonstruksi

BAB 2

Pendekatan Utama Pemulihan Mata Pencapaian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana

Berdasarkan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan percontohan di Provinsi Sulawesi Tengah serta pengalaman pemulihan dan pembangunan kembali pascabencana di Jepang, pendekatan utama pemulihan mata pencapaian dan penguatan masyarakat terdampak bencana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Memperkuat gotong royong**
2. **Menjamin transparansi dan akuntabilitas**
3. **Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan yang berkelanjutan**
4. **Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi masyarakat terdampak pada setiap tahap pemulihan dan rekonstruksi**

2.1 Memperkuat Gotong Royong

Dari pengalaman penanganan beberapa peristiwa bencana, diketahui bahwa pemerintah seringkali mengalami kesulitan untuk segera membantu korban dan penyintas akibat lumpuhnya fungsi administrasi pemerintahan di daerah bencana. Untuk mengurangi dampak kerusakan yang lebih besar dan luas akibat bencana, **amatlah penting untuk meningkatkan gerakan swadaya dan gotong royong antarwarga.**

Pada praktiknya akan sedikit sulit untuk mengorganisasi para individu yang tidak saling mengenal menjadi suatu kelompok dan saling bekerja sama dalam kegiatan pemulihan mata pencapaian karena belum terjalinnya rasa saling percaya antar satu sama lain, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Oleh karena itu, sebaiknya menerapkan pendekatan kelompok dalam beberapa program/kegiatan pascabencana untuk memperkuat hubungan sosial kemasyarakatan dan kegotongroyongan.

Di masa awal pascabencana, para pengungsi cenderung mengalami stres yang tinggi dan trauma. Guna mengurangi stres dan trauma pascabencana, penting bagi setiap individu untuk memulihkan mata pencahariannya dan bagi masyarakat untuk mempererat hubungan sosial kemasyarakatannya. Jika kegiatan berkelompok dapat dilakukan pada tahap ini, hal tersebut dapat



mengurangi tingkat stres serta mengalihkan pikiran mereka dari trauma bencana. Kegiatan kelompok memberikan peluang bagi anggotanya untuk berinteraksi satu sama lain. Pendekatan ini bisa membantu mengurangi kekhawatiran dan kecemasan bahkan ketika hubungan dalam kelompok itu sendiri belum terlalu kuat. Berbagi asa dan rasa dengan para korban dan penyintas lain yang senasib sepenanggungan dapat sedikit mengurangi beban emosi yang ditanggung. Mengetahui bahwa ada korban dan penyintas lain dengan pengalaman dan emosi yang sama dapat membantu meringankan beban emosi yang harus ditanggung. Kebersamaan dan kegotongroyongan, selain mempererat hubungan kemasyarakatan juga menjadi modal sosial di masa mendatang.

- Pengalaman di Lapangan -

- Pada kegiatan percontohan, salah seorang peserta pelatihan kerajinan tangan mengatakan bahwa “Saya tidak melakukan apa-apa selama berada di shelter pascabencana, hanya duduk terpekur dan termenung mengingat malapetaka yang telah terjadi.” Saat dia berinteraksi dengan para perempuan lain di pelatihan, ia dapat berkonsentrasi berkarya. Bercakap-cakap dan berbagi rasa dengan para penyintas perempuan lainnya dapat sedikit mengurangi rasa stres setelah mengalami bencana.

2.2 Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun bukan topik baru, perlu ditekankan bahwa perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat para korban berada dalam kondisi sulit, cemas, dan ragu mengenai kapan dan/atau bagaimana bantuan dapat diterima secara adil dan merata, maka **transparansi menjadi sangat penting guna menjamin akuntabilitas program serta menjaga stabilitas dan solidaritas masyarakat.**

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, pelibatan masyarakat dalam setiap langkah kegiatan menjadi pendekatan yang efektif. Situasi pascabencana yang penuh dengan ketidakpastian dan membingungkan

membuat para pengungsi cenderung mudah khawatir akan hilangnya kesempatan dan terlewatkan. Jika masyarakat merasa penyebaranluasan informasi hanya terbatas pada pihak tertentu saja, maka hal ini dapat menimbulkan prasangka di masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat terdampak dalam setiap proses sangat penting, meskipun tuntutan dan harapannya tidak dapat terpenuhi seluruhnya. Mengingat besarnya jumlah masyarakat terdampak bencana, tentunya tidak seluruh anggota masyarakat terdampak dapat terlibat dalam kegiatan. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, koordinator hunian sementara, dan tokoh kunci lainnya dalam setiap proses kegiatan agar dapat membantu penyebaranluasan informasi yang benar mengenai program kegiatan kepada masyarakat.

2.3 Memfasilitasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemulihan yang Berkelanjutan

Setelah terjadi bencana, masyarakat terdampak perlu memulihkan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatannya, baik melalui kegiatan swadaya, gotong royong maupun bantuan pemerintah. Pada tahap tanggap darurat, bantuan dari pemerintah, mitra pembangunan dan beragam organisasi tersedia secara luas. Namun, dukungan tersebut akan berkurang di tahap pemulihan dan rekonstruksi. Selama dan setelah tahap pemulihan dan rekonstruksi, **perlu diinisiasi program penguatan masyarakat agar masyarakat dapat bangkit dan pulih dengan daya dan upayanya sendiri.**

Semangat masyarakat untuk pulih perlu dibangkitkan, salah satunya melalui program kegiatan fasilitasi pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat terdampak. Fasilitasi pemulihan ini sejalan dengan arah pembangunan. Oleh karena itu, amatlah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program/kegiatan pemulihan melalui pelibatan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan.

2.4 Mempertimbangkan Perbedaan Kebutuhan dan Kondisi Masyarakat Terdampak pada Setiap Tahap Pemulihan dan Rekonstruksi

Pada kasus gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan tahapan penanganan pascabencana sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini. Setiap tahap membutuhkan intervensi yang berbeda. **Penting untuk merancang dan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat terdampak.**



Tabel 1 Keterkaitan Antar Tahap dan Intervensi

Tahap	Periode	Kegiatan Dukungan
Tanggap darurat	4 minggu ² sejak bencana	• Pemenuhan kebutuhan dasar manusia • Penyediaan sumber pendapatan harian (contoh: padat karya tunai, bantuan non-tunai)
Transisi hingga pemulihan	60 hari sampai dengan 180 hari ³ sejak masa tanggap darurat	• Dukungan untuk berwirausaha (penyediaan peralatan) • Pemulihan fasilitas • Pelatihan teknis dan keterampilan
Rehabilitasi dan rekonstruksi	2 tahun ⁴ setelah masa transisi	• Dukungan untuk berusaha kembali di permukiman baru (hibah/paket berusaha kembali)

(Sumber: Tim Studi JICA)

² SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 466/463/BPBD/2018

³ SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 367/076/BPBD-G.ST/2019

⁴ SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 369/192/BPBD-G.ST/2019

BAB-3

Strategi Pengarusutamaan Pemulihan Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana

- 2.1 Inklusif
- 2.2 Keberlanjutan
- 2.3 Kemandirian



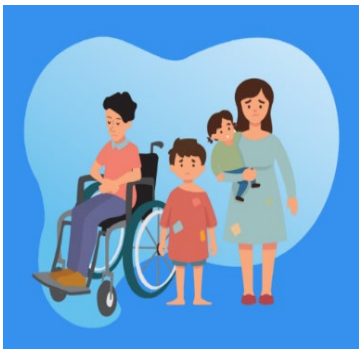
03

BAB 3

Strategi Pengarusutamaan Pemulihan Mata Pencapaian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana

3.1 Inklusif

Inklusif tidak hanya menyangkut kesetaraan gender tetapi juga mencakup **pelibatan berbagai kelompok rentan seperti perempuan, kaum muda, lansia, penyandang disabilitas, pengidap HIV/AIDS dan anggota masyarakat lainnya yang dianggap rentan** dengan mempertimbangkan aspek interseksionalitasnya.



Tidak dapat disangkal bahwa bencana menimbulkan dampak yang berbeda bagi setiap individu bergantung pada jenis kelamin, usia, kondisi fisik, dan kesehatan sehingga perlu diperhatikan aspek kesetaraan gender dan keberagaman dalam formulasi kegiatan dukungan. Hal ini pun tercermin dalam pengalaman penanggulangan bencana di masa lalu. Misalnya, terdapat kecenderungan jumlah korban perempuan lebih banyak daripada laki-laki dikarenakan bias dan diskriminasi berbasis gender yang telah ada sebelumnya.

Saat gempa bumi terdahulu di Jepang, angka kematian penyandang disabilitas dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Pascabencana, pengidap HIV dan AIDS mungkin akan kesulitan memperoleh obat-obatan esensial. Dalam pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial, penyediaan dukungan tidak hanya berfokus terhadap perempuan, tetapi juga kelompok rentan lainnya pada situasi pascabencana. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pendekatan khusus bagi masing – masing kelompok rentan.

1. Pendekatan Responsif Gender

Pendekatan responsif gender perlu diperhatikan dalam seluruh langkah – langkah pelaksanaan kegiatan.

- Persentase perempuan yang menjadi kepala desa, kepala dusun, ketua RT serta koordinator di tempat penampungan dan huntara masih sangat rendah. Oleh karena itu, **perempuan di masyarakat perlu berperan serta secara aktif dalam pertemuan konsultatif untuk memastikan keterwakilan suara serta menyuarakan kebutuhannya** dalam tahap formulasi dan pelaksanaan kegiatan serta menjamin penyebaran informasi bagi perempuan.
- Peran gender, norma, praktik sosial, dan budaya harus dipertimbangkan dalam formulasi rancangan rencana kegiatan, kriteria seleksi, dan lainnya. Segala jenis kegiatan yang tidak responsif gender terhadap perempuan (dewasa dan anak) harus dihindari. **Kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki andil dalam transformasi sosial dan gender untuk pembangunan yang lebih baik dan kesetaraan gender dalam masyarakat.** Dalam hal ini, pendekatan tidak hanya ditujukan bagi kaum perempuan tetapi juga kaum laki-laki demi menjaga keseimbangan dalam kegiatan.
- Secara umum, **tingkat literasi kaum perempuan lebih rendah** dibandingkan kaum laki-laki, terutama lansia dan etnis minoritas yang tinggal di daerah perdesaan/terpencil, demikian pula dengan keterampilan berhitung. **Hal ini harus dipertimbangkan dalam penyebaran informasi, pengumpulan proposal kegiatan, penyelenggaraan pelatihan,** dan lain-lain.
- Ketika terjadi bencana, **permasalahan yang kerap terjadi dalam kondisi normal semakin meningkat**, seperti kekerasan berbasis gender. Terkait kegiatan pemulihan masyarakat, potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan (dewasa dan anak) dan rumah tangga, pelecehan gender dan kekerasan berbasis gender, perdagangan perempuan (dewasa dan anak) harus dipertimbangkan dan langkah penanganan yang tepat harus dilakukan pada saat yang bersamaan.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan penanggung jawab utama untuk memastikan integrasi pendekatan responsif gender dan responsif

keragaman, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (dewasa dan anak) termasuk kekerasan berbasis gender. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi dan kabupaten/kota perlu dilibatkan dalam setiap konsultasi dan koordinasi di semua kegiatan.**

2. Lapangan Kerja bagi Kaum Muda

Keterlibatan kaum muda merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemuda dan masyarakat serta mengoptimalkan dampak pemulihan baik secara individu maupun kolektif. Secara umum, kaum muda merupakan mayoritas dalam populasi, tetapi kebutuhan mereka seringkali terabaikan karena mekanisme dukungan cenderung berfokus kepada anak-anak dan perempuan dewasa. Selain itu, kaum muda juga memiliki kesempatan yang terbatas untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat dan pengambilan keputusan.

Kurangnya dukungan terhadap kaum muda baik laki-laki maupun perempuan atau terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang produktif dapat berdampak secara fisik maupun psikis selain stres yang tinggi akibat bencana. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan peluang kerja baru, peningkatan keahlian, dan pelatihan keterampilan bagi kaum muda. Hal ini merupakan peluang bagi pemuda khususnya perempuan muda untuk mempelajari bidang dan keahlian baru seperti keterampilan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dan juga teknologi informatika dan komunikasi (TIK) yang bisa menjadi pilihan untuk digeluti. **Pelibatan pemuda dapat mempercepat pemulihan kaum muda dan masyarakat serta hubungan sosial kemasyarakatannya.**

3. Lansia dan Penyandang Disabilitas

Di sejumlah lokasi huntera, bangunan telah dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lansia dan penyandang disabilitas. Kepala desa selaku penanggung jawab pengaturan/pengalokasian penghuni huntera di desanya telah memprioritaskan lansia dan penyandang disabilitas dalam pengaturan relokasi. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk mengaplikasikan **“rancangan atau desain bangunan universal” yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan kelompok rentan di hunian**

sementara maupun hunian tetap.

4. Pengidap HIV dan AIDS

Sulitnya memperoleh perawatan medis dapat mengancam kehidupan pengidap HIV dan AIDS maka **kebutuhan mereka perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelumnya**. Seperti halnya penderita penyakit kronis yang lain, pengidap HIV dan AIDS wajib mengonsumsi obat-obatan secara rutin (Pengobatan Anti-Retroviral–ART) yang bisa menekan aktivitas virus sehingga pengidap HIV dan AIDS bisa hidup normal seperti individu yang lain.



Ketika bencana skala besar terjadi, sarana penopang kehidupan dan fasilitas medis dapat terganggu/terhenti sehingga penyediaan pengobatan yang diperlukan dapat terhambat. Pada kasus pengidap HIV dan AIDS, Kondisi ini sangat berbahaya karena virus dapat berkembang lebih cepat dan resisten terhadap obat-obatan yang digunakan. Pada umumnya pengidap HIV dan AIDS bisa memperoleh obat-obatan yang diperlukan di rumah sakit, tetapi perubahan kondisi pascabencana dapat menyulitkan mereka untuk mengakses obat-obatan dan perawatan yang dibutuhkan.

3.2 Keberlanjutan

1. Membangun Kembali Lebih Baik (*Build Back Better*) untuk pemulihan dan pembangunan kembali masyarakat yang berkelanjutan

Keberlanjutan dalam perspektif ekonomi, lingkungan, sosial dan kelembagaan perlu dipertimbangkan di seluruh aspek tahapan pemulihan dan pembangunan kembali. Pemulihan dan penguatan tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kembali ke kondisi awal di daerah terdampak bencana, tetapi yang paling penting pada tahapan ini **adalah kesempatan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan melalui masyarakat yang lebih tangguh dan menjaga keberlanjutan kegiatan.**

2. Ramah Lingkungan

Selama pemulihan dan pembangunan kembali, **perlu dipertimbangkan aspek konservasi lingkungan alam dan sosial**. Kondisi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat berubah akibat bencana sehingga membutuhkan banyak sumber daya untuk pemulihan dan pembangunan kembali. Dalam kondisi ini, keberkelanjutan sumber daya alam adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan.

3.3 Kemandirian

Masyarakat didorong dan difasilitasi untuk menginisiasi dan melaksanakan kegiatan swadaya. Pascabencana, masyarakat perlu memulihkan kehidupannya dan mengeratkan hubungan sosial kemasyarakatannya, baik secara swadaya, gotong royong, maupun dengan bantuan pemerintah.

Mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya pascabencana karena Mereka harus mampu memulihkan kehidupan mereka dan melakukan penguatan masyarakat secara mandiri, gotong royong, dan melalui bantuan publik. Mengingat sumber daya pemerintah untuk membantu masyarakat terbatas, terutama selama bencana, prioritas difokuskan pada pemeliharaan stabilitas dalam masyarakat. **Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi mitra pemerintah dan memiliki inisiatif dalam melakukan kegiatan swadaya.**

04



BAB-4

Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan

- 4.1 Perencanaan Kegiatan
- 4.2 Penyeleksian Penerima Manfaat
- 4.3 Pelaksanaan Kegiatan
- 4.4 Pengawasan dan Pengendalian

BAB 4

Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat terdapat langkah - langkah yang perlu dilakukan oleh OPD kabupaten/kota yang bertanggung jawab bersama dengan tokoh masyarakat, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lain.

Tabel 2 Langkah-Langkah Pelaksanaan Program/Kegiatan

Kategori	Langkah-Langkah
a. Perencanaan kegiatan	1) Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan pemangku kepentingannya 2) Konsultasi dengan masyarakat untuk memformulasikan rancangan rencana kegiatan
b. Penyeleksian penerima manfaat	1) Penentuan kriteria seleksi penerima manfaat 2) Penyeleksian penerima manfaat kegiatan
c. Pelaksanaan kegiatan	1) Pertemuan orientasi 2) Pengadaan 3) Pelatihan 4) Kegiatan peningkatan kapasitas lain
d. Pengawasan dan pengendalian	1) Pemantauan 2) Evaluasi

(Sumber: Tim Studi JICA)

Setiap langkah pelaksanaan program/kegiatan harus memprioritaskan kegiatan dan pertimbangan yang sejalan dengan pendekatan utama pemulihan dan pembangunan kembali pascabencana sebagaimana dijelaskan pada Bab 2.



(Sumber: Tim Studi JICA)

Gambar 1 Penerapan Pendekatan Utama dalam Langkah-Langkah Indikatif Pemulihan Mata Pencaharian dan Penguatan Masyarakat Pascabencana

Pendekatan dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam setiap langkah pemulihan sosial ekonomi terangkum pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Contoh Penerapan Pendekatan Utama dalam Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan

Kategori	Langkah – Langkah	Memperkuat Gotong Royong	Menjamin transparansi dan akuntabilitas	Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan yang berkelanjutan	Mempertimbangkan perbedaan kondisi pada setiap tahap pemulihan dan rekonstruksi
(1) Perencanaan kegiatan	1-1. Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan pemangku kepentingan	Memasukkan kegiatan kelompok	Menentukan individu yang akan menyebarkan informasi kepada masyarakat		Membuat keputusan yang jelas untuk menentukan tujuan kegiatan
	1-2. Konsultasi masyarakat untuk memformulasikan rancangan rencana kegiatan	Meningkatkan kesempatan berdialog dengan masyarakat	Membuat rancangan rencana kegiatan masyarakat dengan melibatkan kepala desa dan camat	Meningkatkan kesempatan berdialog dengan masyarakat	
(2) Penyeleksian penerima manfaat	2-1. Penentuan kriteria seleksi penerima manfaat	Pertimbangan khusus terhadap kegiatan kelompok dalam kriteria seleksi, misalnya memprioritaskan kegiatan kelompok	Kriteria seleksi ditentukan dengan melibatkan masyarakat termasuk kepala desa dan kepala daerah	Kriteria seleksi ditentukan dengan melibatkan masyarakat	
	2-2. Seleksi penerima manfaat kegiatan		Seleksi dilaksanakan bersama pemerintah desa dan camat	Seleksi dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat	
(3) Pelaksanaan kegiatan	3-1. Pertemuan orientasi	Diseminasi tujuan kegiatan kelompok	Menyampaikan risiko/tanggung jawab penerima manfaat secara rinci	Menyampaikan isi bantuan/kegiatan yang dilaksanakan, termasuk kontribusi mandiri/ swadaya dan risiko penerima manfaat secara rinci	
	3-2. Pengadaan			Mengidentifikasi peralatan yang dapat disediakan oleh penerima manfaat, termasuk mengatur pembelian barang oleh penerima manfaat	
	3-3. Pelatihan	Memasukkan pelatihan yang mendorong/ menguatkan kerja sama kelompok			Melaksanakan pelatihan sesuai tujuan
	3-4. Kegiatan peningkatan kapasitas lain	Memasukkan pelatihan yang mendorong/ menguatkan kerja sama kelompok		Memfasilitasi prakarsa masyarakat	
(4) Pengawasan dan pengendalian	4.1. Pemantauan		Melibatkan kepala desa dan camat agar hasil kegiatan dapat dikomunikasikan dengan baik	Menyampaikan hasil pemantauan kepada penerima manfaat dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran	Menentukan indikator yang sesuai dengan tujuan kegiatan
	4.2. Evaluasi				

(Sumber: Tim Studi JICA)

4.1 Perencanaan Kegiatan

1. Kajian Awal Rancangan Rencana Kegiatan dan Pemangku Kepentingan

Tujuan:

Untuk menyiapkan usulan – usulan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali yang akan dilaksanakan, OPD kabupaten/kota yang bertanggung jawab perlu mengumpulkan data, mengkaji ide kegiatan yang diusulkan, menentukan lokasi sasaran, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan mengacu pada rencana aksi.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	Melakukan kajian awal, prioritas kegiatan sasaran, dan lokasi kandidat pelaksanaan kegiatan
Lurah/kepala desa/tokoh masyarakat	Menyiapkan informasi yang dibutuhkan OPD terkait

Indikator Capaian:

A. Pengumpulan data dan informasi

Untuk menentukan kegiatan, diperlukan data dan informasi mengenai situasi dan kebutuhan terkini dari para penerima manfaat, meskipun terkendala hilangnya berkas dokumen, data, serta keterbatasan SDM dan sistem komunikasi akibat bencana.



Untuk mengidentifikasi kerusakan sektor ekonomi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dikumpulkanlah data dan informasi sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Data yang dikumpulkan dari setiap fasilitas, entitas atau infrastruktur mencakup informasi lokasi, tingkat kerusakan, nilai kerusakan dan perkiraan kerugian. Dengan mempertimbangkan struktur industri di Provinsi Sulawesi Tengah, maka lebih banyak fasilitas terkait industri primer yang dimasukkan dalam tabel. Data serupa juga dikumpulkan untuk sektor permukiman, infrastruktur, sosial dan pemerintahan.

Data – data tersebut dikumpulkan oleh OPD penanggung jawab di kabupaten/kota untuk selanjutnya dikompilasi di Bappeda. Berdasarkan kompilasi data tersebut, setiap kabupaten/kota menyiapkan Rencana Aksi pemulihan dan pembangunan kembali. Skema inilah yang dilaksanakan saat bencana lalu di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4 Kajian Awal Dampak Bencana terhadap Fasilitas Sub Sektor Ekonomi

Sub Sektor	Fasilitas	Sub Sektor	Fasilitas
1. Perdagangan	Pasar	5. Pertanian	Lahan pertanian
	Pergudangan		Jaringan irigasi, reservoir dan bendungan
2. Pariwisata	Hotel/penginapan		Saluran irigasi (irigasi tersir)
	Restoran		Struktur/ pintu Air
	Bangunan lainnya		Sentra penggilingan padi
	Tempat wisata/ rekreasi (pantai, dll)		Jaringa irigasi di pertanian bawang
3. Koperasi dan UMKM	Koperasi		Perkebunan
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	6. Peternakan	Hewan ternak
	Kios/Toko		Fasilitas peternakan
4. Industri	Industri Makanan	7. Perikanan	Lahan untuk budidaya ikan
			Fasilitas perikanan laut
			Perahu dan alat tangkap nelayan
			Pengolahan ikan dan fasilitas pemasaran

Berdasarkan pengalaman di Provinsi Sulawesi Tengah, **direkomendasikan agar Bappeda memiliki dan memutakhirkan secara berkala data – data yang tercantum di bawah ini bekerja sama dengan OPD terkait sebagai persiapan penanganan bencana.**

Informasi terkait pemulihan mata pencaharian

- Industri dan/atau sektor usaha utama di daerahnya, PDRB beserta strukturnya (jika sektor usaha utama adalah usaha mikro, struktur pendapatan keluarga), struktur ketenagakerjaan (jumlah karyawan di setiap sektor dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia),

pasar utama.

- Dukungan eksternal dan rencana dukungan bagi industri dan mata pencaharian (jumlah dukungan/ sektor yang didukung)
- Status investasi eksternal (lokasi investasi/ entitas investasi)
- Rencana dukungan di daerah terdampak bencana yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana oleh pemerintah/pemerintah daerah
- Tantangan, isu dan hal – hal yang telah ada sejak sebelum bencana dan perlu dipertimbangkan

Selain kompilasi data tersebut di atas, saat perencanaan program/kegiatan **dibutuhkan pula data aktual dan kajian kebutuhan di lokasi sasaran sebagai berikut:**

- (1) Jumlah korban/ penyintas, termasuk informasi usia dan gender di lokasi
- (2) Kondisi ekonomi dan sosial sebelum bencana, kerusakan serta situasi terkini pascabencana
- (3) Kebutuhan para korban dan penyintas di tiap lokasi, seperti shelter/huntara, komunitas, dan desa.
- (4) Seluruh data di atas harus memuat data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia..

B. Kriteria seleksi kegiatan

Untuk menjamin akuntabilitas penyeleksian kegiatan, penting untuk menetapkan kriteria pra-seleksi kegiatan. Contoh kriteria seleksi yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- (1) Jumlah korban/penyintas di lokasi kegiatan berdasarkan jenis kelamin dan usia
- (2) Situasi ekonomi dan sosial termasuk kerusakan pascabencana;
- (3) Pelaksanaan dengan cepat (ketersediaan material yang dibutuhkan);
- (4) Distribusi dukungan secara merata di wilayah tersebut;
- (5) Keberlanjutan kegiatan;
- (6) Jangka waktu kegiatan;
- (7) Kemungkinan risiko yang ditanggung penerima manfaat dan masyarakat; dll.

- Kegiatan ditentukan berdasarkan kriteria seleksi dan Rencana Induk/Rencana Aksi yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat rekonstruksi daerah

C. Rancangan rencana kegiatan

Pada kajian awal ditentukan hal – hal berikut ini:

- (1) Lokasi sasaran;
- (2) Kelompok sasaran (target penerima manfaat program/kegiatan);
- (3) Latar belakang kegiatan (Rationale Kegiatan);
- (4) Tujuan;
- (5) Kegiatan;
- (6) Periode Kegiatan.

- Mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan kelompok untuk menangani trauma pascabencana dan penguatan masyarakat

- Menghindari kegiatan berkumpul dengan banyak orang di ruang kecil
- Menghindari kegiatan perjalanan dengan banyak penerima manfaat
- Pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi risiko infeksi
- Kombinasi langkah-langkah pemulihan mata pencaharian tidak hanya dari bencana alam tetapi juga COVID-19
- Antisipasi/penanggulangan penyebaran infeksi di lokasi terdampak atau rentan pascabencana

**Adaptasi
Program/
Kegiatan
dengan
Protokol
COVID-19**



D. Identifikasi pemangku kepentingan

Dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab tidak hanya mengidentifikasi penerima manfaat tetapi juga pemangku kepentingan lain yang dapat berkontribusi/bersinergi dalam kegiatan dukungan. Setelah mengidentifikasi para pemangku kepentingan, OPD kabupaten/kota perlu menganalisis peran mereka dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut merupakan peran dasar pemangku kepentingan, antara lain:

- (1) Pengaturan/pelaksanaan kegiatan;
- (2) Koordinasi dengan penerima manfaat kegiatan dan sektor lain;
- (3) Penyediaan narasumber (misalnya, instruktur pelatihan);
- (4) Penyediaan sumber pembiayaan.

- *Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan dukungan pemerintah dan dampak intervensi melalui terjalannya sinergi atau pekerjaan kolaboratif yang terencana setelah tercapainya konsensus/ kesepakatan bersama*

Hasil capaian di atas menjadi bahan diskusi dengan masyarakat pada langkah selanjutnya.

E. Sinergi program dan kegiatan

Penanganan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral atau oleh satu pemangku kepentingan saja, tetapi **harus dilakukan secara terpadu lintas sektor dan lintas lembaga** di tingkat daerah dan nasional karena dampak buruk bencana terjadi di berbagai aspek, baik permukiman, infrastruktur, sosial, serta sektor pemulihan ekonomi dan penguatan masyarakat. **Pelibatan multisektoral** secara terpadu dalam seluruh tahapan program kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan hingga evaluasi akan menjamin keberhasilan program kegiatan dan keberlanjutannya.

Setelah melaksanakan kajian awal rancangan rencana kegiatan, seleksi kegiatan dan identifikasi pemangku kepentingan, di awal penyusunan rencana program/kegiatan perlu disepakati tentang program dan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. Tahapan ini dapat dilakukan dengan membuat pemetaan pemangku kepentingan beserta program kegiatan yang dapat disinergikan.

- *Tabulasi pemetaan pemangku kepentingan ini terdapat di **BAB 5, Halaman 63***

~Pengalaman Kegiatan Percontohan~

Kriteria Seleksi Kegiatan Percontohan

Berdasarkan pengalaman di Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Induk Pemulihan dan Rekonstruksi, dan Rencana Aksi untuk setiap kabupaten/kota disusun berdasarkan penilaian kerusakan dan situasi setelah bencana. Dalam Rencana Induk, Rencana Aksi terdiri dari daftar indikatif proyek untuk setiap sektor dan bersamaan dengan estimasi anggaran yang diperlukan untuk pemulihan.



Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, kegiatan percontohan untuk pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat terdampak pada tahun 2019 ditentukan berdasarkan kriteria seleksi. Kriteria seleksi kegiatan percontohan diperbaharui melalui diskusi dengan dinas terkait di Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/ Kota pada bulan November 2019.

<Kebijakan>

- + Kegiatan yang dapat secara efektif memperkenalkan pengalaman Jepang dalam pemulihan dan rekonstruksi pascabencana kepada Indonesia
- + Kegiatan yang berkontribusi terhadap penguatan masyarakat (memperkuat solidaritas masyarakat)
- + Kegiatan yang berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah Indonesia dan masyarakat terdampak bencana

<Prasyarat>

- + Kegiatan yang mempercepat implementasi Rencana Induk Pemulihan dan Rekonstruksi, serta diprioritaskan dalam rencana aksi oleh setiap pemerintah daerah
- + Kegiatan instansi mitra dengan komitmen pelaksanaan yang kuat dari dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab
- + Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan pengalaman dan pembelajaran yang dikumpulkan dalam buku panduan, seperti perencanaan berbasis masyarakat, pelibatan pemangku kepentingan, pendekatan kelompok, dan menjamin transparansi

<Kriteria Seleksi>

- + Memastikan keberlanjutan kegiatan oleh penerima manfaat melalui kerja sama dengan mitra imbang (mitra pembangunan?)
- + Memperluas capaian tahun pertama di lokasi sasaran
- + Mereplikasi capaian tahun pertama di lokasi lain
- + Melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dll. sebagai aktor kunci
- + Mengintegrasikan dukungan pemerintah daerah dengan kementerian terkait, atau memiliki sinergi dengan kegiatan pemangku kepentingan lain (sukarelawan, LSM, institusi keuangan, mitra pembangunan, dll.)
- + Memastikan keberlanjutan kegiatan walaupun penerima manfaat pindah lokasi hunian. Kegiatan yang dapat dimulai dengan cepat dan diselesaikan sesuai periode waktu yang ditentukan

2. Konsultasi Masyarakat untuk Memformulasikan Rancangan Rencana Kegiatan

Tujuan:

Untuk mengonfirmasikan kelayakan usulan kegiatan yang telah dipersiapkan terhadap sudut pandang dan konteks lokal, maka OPD yang bertanggung jawab perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat. Melalui konsultasi dengan masyarakat, OPD dapat mengetahui apakah rencana kegiatan yang diusulkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Selain itu, **penting untuk melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat sejak awal kegiatan** fasilitasi masyarakat guna memastikan keberlanjutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota perlu mengatur pertemuan konsultatif dengan masyarakat sasaran.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	Berkonsultasi dengan calon masyarakat sasaran mengenai garis besar kegiatan, dan memodifikasi isi kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kearifan lokal setempat
Kantor kelurahan/desa	Mengadakan pertemuan dengan kepala dusun/RT ⁵ , RW, dan tokoh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan

Indikator Capaian:

A. Perencanaan kegiatan bersama masyarakat sasaran

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendiskusikan permasalahan dengan kepala desa dan mengadakan konsultasi masyarakat untuk mendiskusikan skema rencana kegiatan. Kepala desa mengadakan pertemuan dan mengundang para tokoh dan perwakilan masyarakat yang memiliki informasi terkait shelter, unit-unit hunian sementara, dan warga lainnya, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW,⁶ koordinator shelter/huntara, perwakilan organisasi terkait, seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda/karang taruna, kelompok

⁵ Rukun Tetangga (Neighborhood Association);

⁶ Koordinator shelter evakuasi/huntara; mengoordinasikan korban dan penyintas di lokasi evakuasi/pengungsian. Biasanya ditunjuk dan berkerja sama dengan kelurahan/pemerintah desa

penyandang disabilitas dan lainnya.

Dalam pertemuan konsultasi, didiskusikan hal – hal berikut:

- (1) Situasi korban dan penyintas saat ini, permintaan dan kebutuhan masyarakat;
- (2) Tujuan kegiatan;
- (3) Kegiatan;
- (4) Waktu pelaksanaan;
- (5) Para pemangku kepentingan kegiatan.

- *Konsultasi dengan tokoh dan perwakilan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dilakukan secara interaktif untuk mengidentifikasi kebutuhan dan konteks setempat.*
- *Kegiatan sebaiknya dapat diubah/dimodifikasi secara fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat setempat*
- *Lokasi dan waktu pertemuan konsultatif harus nyaman bagi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengadakan pertemuan pada malam hari karena penerima manfaat mungkin bekerja di siang hari. Bila waktu yang baik untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan berbeda antara perempuan dan laki-laki maka waktu yang baik bagi keduanya juga harus dipertimbangkan dan dikonsultasikan.*

Konsultasi harus diulang hingga tercapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai, dapat mencari masyarakat sasaran yang lain.

- *Mengadakan pertemuan dalam kelompok kecil*
- *Peserta pertemuan wajib memakai masker*
- *Menyediakan sanitizer atau wastafel dan sabun cuci tangan untuk membersihkan/mencuci tangan di pintu masuk dan memastikan ventilasi udara yang baik di ruang rapat*

**Adaptasi
Program/
Kegiatan
dengan
Protokol
COVID-19**



- Pengalaman di Lapangan -

- *YPAL Poso menyelenggarakan pelatihan permakultur serta penyediaan peralatan yang diperlukan. Pada program ini, para penerima manfaat turut terlibat dalam pemilihan produk pertanian yang ditanam serta peralatan yang diberikan berdasarkan kearifan lokal setempat*
- *Pendekatan terperinci, dapat dilihat pada Lampiran 5 "Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan berbasis pengurangan risiko bencana di Sulawesi Tengah"*

B. Penyusunan rencana kegiatan dan prosedur pelaksanaan

Berdasarkan garis besar program/kegiatan yang disepakati, OPD menyusun rencana kegiatan/kerangka acuan kerja (KAK), khususnya jika program/kegiatan tersebut merupakan Rencana Kerja (Renja) OPD. Sedangkan untuk program nasional dari K/L, sebaiknya OPD menyusun Prosedur Tetap (Protap; SOP) sebagai pedoman staf di lapangan, selain petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang disiapkan oleh K/L. KAK dan Protap bagi program/kegiatan yang disusun OPD memuat perihal berikut:

- (1) Lokasi;
- (2) Penerima manfaat;
- (3) Latar belakang kegiatan;
- (4) Tujuan;
- (5) Kegiatan;
- (6) Batas waktu;
- (7) Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan termasuk dinas;
- (8) Anggaran/pembiayaan dan kontribusi yang ditanggung penerima manfaat seperti modal uang, waktu, dan tenaga kerja;
- (9) Risiko kegiatan ekonomi yang ditanggung penerima manfaat;
- (10) Kerangka pemantauan dan evaluasi

- *Kerangka pemantauan dan evaluasi serta skema penganggarannya diformulasikan secara paralel*

Untuk memastikan rencana kegiatan terealisasi dengan baik di lapangan oleh staf OPD terkait, ketersediaan dokumen tata cara pelaksanaan kegiatan terperinci, seperti Prosedur Tetap (Protap; SOP) akan sangat membantu.

~Pengalaman Kegiatan Percontohan~
Penyusunan SOP Program Bantuan Pemerintah (Banpem)

Pada penanganan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Indonesia dan tim Studi JICA sepakat menerapkan buku panduan untuk mendukung program Bantuan Pemerintah (Banpem) Kementerian Koperasi dan UKM bagi UMKM terdampak bencana. Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten/kota terdampak bencana menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan mengintegrasikan substansi pokok Buku Panduan (terdapat di Lampiran 4: Contoh SOP Program Banpem).

Substansi pokok Buku Panduan yang diadopsi ke dalam SOP Program Banpem dapat dirangkum sebagai berikut:

Substansi Pokok Buku Panduan	Adaptasi di SOP
Menetapkan kriteria seleksi manfaat yang terukur.	- Menambahkan kriteria terukur, selain kriteria yang ditentukan kementerian. - <i>Contoh:</i> usia, periode pengalaman berwirausaha sejak pascabencana hingga kini.
Keterbukaan informasi mengenai penyeleksian penerima manfaat.	- Menjelaskan kebijakan/prosedur seleksi penerima manfaat (Menjamin transparansi dengan mencantumkan informasi tersebut di SOP). - Menetapkan pemberitahuan hasil seleksi penerima manfaat kepada lurah/kepala desa lokasi sasaran sebagai salah satu prosedur.
Penjelasan pendahuluan tentang tanggung jawab dan sanksi bagi penerima manfaat.	- Menentukan dan menjabarkan sanksi hukuman jika terjadi/ditemukan penyalahgunaan bantuan, serta menjelaskan hal tersebut kepada penerima manfaat saat pertemuan sosialisasi.
Formulasi kerangka pemantauan dan evaluasi.	- Menambah rencana pemantauan dan evaluasi (jadwal dan perihal/indikator yang dipantau/dievaluasi), selain yang telah ditetapkan oleh kementerian.
Mengadakan evaluasi di akhir program dan saling berbagi hasil capaian.	- Memutuskan untuk mengumpulkan umpan balik dan saran dari penerima manfaat untuk mengevaluasi program. - Merencanakan penyelenggaraan lokakarya evaluasi untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada penerima manfaat dan OPD terkait, selain pelaporan ke kementerian.

- Untuk referensi: Protap (SOP) Program Banpem terdapat di Lampiran 4

4.2 Penyeleksian Penerima Manfaat

1. Penentuan Kriteria Seleksi Penerima Manfaat

Tujuan:

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyeleksian penerima manfaat, perlu ditentukan kriteria seleksi.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	Menyiapkan usulan kriteria seleksi penerima manfaat, dan mendiskusikan isinya bersama masyarakat dengan memperhatikan kapasitas dan pemahaman masyarakat
Lurah/kepala desa/tokoh masyarakat	- Memahami tujuan kegiatan dan mempertimbangkan obyektivitas seleksi. - Berpartisipasi dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan kriteria seleksi penerima manfaat.

Indikator Capaian:

Kriteria seleksi penerima manfaat kegiatan ditentukan dan disetujui oleh masyarakat

Lazim ditemui OPD kabupaten/kota memilih individu/organisasi sasaran dari daftar kontak individu/organisasi binaan/yang telah mendapat pendampingan sebelumnya. Untuk menghindari argumentasi dalam proses pelaksanaan serta **untuk menjamin akuntabilitas penyeleksian, maka kriteria seleksi sudah harus ditentukan sejak awal perencanaan.**

Selain itu, seleksi penerima manfaat harus sejalan dengan strategi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, kriteria diperlukan untuk mengklarifikasi penerima manfaat kegiatan.

- (1) Kriteria seleksi sebaiknya mempertimbangkan perihal berikut:
- (2) Cara memilih penerima manfaat untuk memaksimalkan dampak kegiatan;
- (3) Cara memilih penerima manfaat yang paling relevan untuk kegiatan;
- (4) Faktor yang dapat membatasi partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan, termasuk kemungkinan mengurangi jumlah penerima manfaat dengan mengubah rancangan rencana kegiatan;
- (5) Informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi berdasarkan kriteria.

- *Kriteria sebaiknya sederhana dan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat untuk menjamin akuntabilitas*

Terkait kegiatan dukungan pascabencana bagi penerima manfaat, **kriteria seleksi penerima manfaat sebaiknya dibagi menjadi 3 kategori (berat, sedang dan ringan)** berdasarkan kajian dampak kerusakan baik dari sisi kerusakan infrastruktur (rumah hunian, tempat produksi/usaha), maupun sisi ekonomi penerima manfaat. Hasil kajian dampak kerusakan rumah dan bangunan yang dilakukan oleh satgas di kabupaten/kota dapat digunakan untuk mengevaluasi infrastruktur

Situasi dan kebutuhan penerima manfaat di masa tanggap darurat serta di masa pemulihan tidaklah sama. Pada masa tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi kebutuhan utama para penyintas, sedangkan pada masa pemulihan dan pembangunan kembali kebutuhan penyintas lebih beragam. Berdasarkan pengalaman dalam kegiatan percontohan, kriteria seleksi standar untuk pemulihan mata pencaharian dapat diasumsikan sebagai berikut:

Tahap Pemulihan dan Pembangunan Kembali

- (1) Memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk memulihkan mata pencahariannya (misalnya, telah kembali berusaha pascabencana);
- (2) Memiliki pengalaman berwirausaha;
- (3) Warga yang resmi berdomisili di daerah terdampak bencana (dibuktikan dengan KTP);
- (4) Memiliki surat keterangan/ijin usaha (IUMK, NIB) dan nomor rekening bank, khususnya untuk pemulihan mata pencaharian*

*Catatan: Pemberkasan izin usaha yang disyaratkan sebaiknya dijelaskan secara terperinci karena pada umumnya UMK tidak memiliki berkas izin usaha dan pengusaha mikro sering mengubah jenis usaha sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahkan, di daerah-daerah yang UMKnya telah lazim memiliki izin usaha, banyak UMK yang kehilangan dokumen izin usaha atau beralih usaha akibat bencana.

- *Menentukan kriteria seleksi dengan mempertimbangkan data kuantitatif dampak COVID-19*
- *Memprioritaskan kelompok rentan sebagai penerima manfaat*

**Adaptasi
Program/
Kegiatan
dengan
Protokol
COVID-19**



~Pengalaman Kegiatan Percontohan~

Studi kasus pemilihan penerima manfaat pelatihan keterampilan konstruksi di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi

Pada kegiatan percontohan “pelatihan keterampilan konstruksi di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi”, penerima manfaat pelatihan dipilih dari Desa Mpanau. Sebelum memulai proses seleksi, kepala desa melakukan pertemuan konsultasi bersama empat kepala dusun dan ketua RT. Selama pertemuan, gagasan mengenai kegiatan percontohan termasuk konsep pelatihan keterampilan konstruksi dijelaskan.



Setelah bersepakat dengan penerima manfaat tentang konsep pelatihan, kriteria pemilihan penerima manfaat didiskusikan. Berikut ini sembilan poin yang ditetapkan.

- (1) Individu yang rumahnya rusak berat atau rusak sedang (RB or RS) karena gempa bumi atau likuefaksi dan saat ini tinggal di shelter Mpanau atau hunian sementara.
- (2) Individu yang kehilangan pekerjaan karena gempa bumi atau likuefaksi dan saat ini bekerja sebagai buruh harian atau karyawan sementara (tidak ada pekerjaan tetap).
- (3) Individu yang tidak mendapat bantuan finansial dari pemerintah (mis. pensiunan).
- (4) Individu yang berkeinginan memiliki pekerjaan di bidang konstruksi dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh setelah pelatihan berakhir (terlepas dari pekerjaan mereka sebelumnya).
- (5) Individu yang berkomitmen untuk berpartisipasi mengikuti seluruh kegiatan pelatihan.
- (6) Individu yang memiliki pengalaman dasar dalam kegiatan yang berhubungan dengan konstruksi.
- (7) Tidak boleh ada lebih dari satu penerima manfaat dalam satu keluarga.
- (8) Individu yang direkomendasikan oleh ketua RT.
- (9) Individu yang bisa baca tulis.

Berdasarkan kriteria tersebut, ketua RT dan kepala dusun memilih penerima manfaat untuk pelatihan yang dimaksud.

Saat menentukan kriteria penerima manfaat program/kegiatan amatlah penting untuk mempertimbangkan kebiasaan sosial budaya setempat. Di Provinsi Sulawesi Tengah, perempuan biasanya tidak bekerja di sektor konstruksi, sehingga pada pelatihan konstruksi tidak terdapat penerima manfaat perempuan.

Meskipun demikian, sebaiknya tetap membuka peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dengan mempertimbangkan budaya setempat.

2. Penyeleksian Penerima Manfaat Kegiatan

Tujuan:

Untuk memilih penerima manfaat kegiatan berdasarkan kriteria seleksi. Jika dilaksanakan dengan benar, maka Ptransparansi dapat dijamin karena proses dan hasil seleksi dapat diklarifikasi dengan jelas. Tokoh masyarakat



mengetahui situasi masyarakat setempat dengan amat baik dan informasi serta pemahaman tersebut bermanfaat dalam penyeleksian penerima manfaat. Akan tetapi, interaksi sosial kemasyarakatan dapat menimbulkan bias dalam penyeleksian jika tokoh masyarakat tidak memahami tujuan kegiatan dan pentingnya transparansi.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	Mengatur seleksi penerima manfaat
Lurah/kepala desa	Mengumumkan atau menyebarkan informasi kegiatan kepada anggota masyarakat
Tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan	Berpartisipasi dalam proses dan fasilitasi anggota masyarakat dalam penyeleksian penerima manfaat, termasuk mengumumkan dan menyebarkan informasi kegiatan kepada masyarakat

Indikator Capaian:

A. Pengumuman publik terkait proses seleksi

Cara ini efektif untuk menjamin transparansi. Pengumuman publik dapat dilakukan dengan beberapa cara, contohnya:

- (1) Pengumuman publik digital (situs web, media sosial: Facebook, Instagram, dsb.) dengan mempertimbangkan aksesibilitas penyintas;
- (2) Menempelkan pengumuman atau poster di kantor pemda kabupaten/kota, posko satgas, kelurahan/kantor desa, shelter, hunian tetap, dan tempat lainnya;
- (3) Pengumuman disebarluaskan melalui koordinator;
- (4) Pengumuman lewat pengeras suara di masjid dan rumah ibadah lainnya.

- *Informasi formulir pendaftaran kegiatan harus disebarluaskan kepada calon penerima manfaat, baik laki-laki maupun perempuan, secara adil dan merata*

B. Pengumpulan formulir pendaftaran dari masyarakat

OPD penanggung jawab bersama kantor kelurahan/desa mengumpulkan formulir pendaftaran dari masyarakat sebagai bagian dari penyeleksian penerima manfaat. Perlu diantisipasi kemungkinan pendaftar mengalami kesulitan dalam pengisian formulir pendaftaran karena latar belakang pendidikan dan tingkat literasinya. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan **sesi konsultasi untuk membantu pendaftar, baik pria dan wanita, dalam mengisi formulir pendaftaran.**

- *Bimbingan/pendampingan pengisian formulir pendaftaran kepada calon penerima manfaat*

- *Mengadakan pertemuan dalam kelompok kecil*
- *Peserta pertemuan wajib memakai masker*
- *Menyediakan sanitiser atau wastafel dan sabun cuci tangan untuk membersihkan/mencuci tangan di pintu masuk dan memastikan ventilasi udara yang baik di ruang rapat*

**Adaptasi
Program/
Kegiatan
dengan
Protokol
COVID-19**



C. Penyeleksian penerima manfaat berdasarkan data dan informasi saat pengumuman publik tidak dapat dilaksanakan

Penerima manfaat dapat diseleksi berdasarkan data informasi yang dikumpulkan oleh pemimpin/ tokoh masyarakat. Data yang diperlukan dalam proses seleksi calon penerima manfaat meliputi informasi terkait **jenis kelamin, usia, disabilitas, dan faktor sosial lainnya.** Jika dilakukan pemilihan bertahap karena banyaknya jumlah calon penerima manfaat, maka diperlukan kriteria seleksi dalam setiap tahapannya.

- *Jika penerima manfaat diseleksi melalui evaluasi data, maka diperlukan data calon penerima manfaat yang mencakup: jenis kelamin, usia, disabilitas, dan faktor sosial lainnya agar penilaian yang adil dapat terlaksana*

D. Penilaian calon penerima manfaat sesuai kriteria seleksi

Berdasarkan data informasi yang diperoleh atau tertulis dalam formulir pendaftaran, dilakukan penilaian terhadap calon penerima manfaat berdasarkan kriteria seleksi. Biasanya setiap kriteria memiliki bobot penilaian yang berbeda berdasarkan skala prioritas. Ada juga kriteria yang bersifat mutlak sehingga walaupun hasil penilaian calon penerima manfaat tinggi, tetapi jika syarat mutlak ini tidak terpenuhi maka calon penerima manfaat tetap tidak dapat dipilih.

E. Wawancara dengan calon penerima manfaat untuk mengonfirmasi informasi yang ada

Setelah calon penerima manfaat kegiatan terseleksi, wajib dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi rinci termasuk kondisi sebenarnya. Dalam wawancara ini, komitmen dan pengalaman calon penerima manfaat terhadap kegiatan perlu dikonfirmasi. Seluruh korban dan penyintas perlu bantuan sehingga ada kemungkinan informasi yang diberikan oleh calon penerima tidak benar. Oleh karena itu, wawancara penting dilaksanakan untuk memverifikasi informasi. Setelah informasi diverifikasi melalui wawancara, penilaian terhadap calon penerima manfaat ditinjau ulang.

F. Seleksi penerima manfaat:

Setelah dilakukan penilaian terhadap seluruh penerima manfaat, maka penerima manfaat dapat ditentukan/ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh OPD. Jika memungkinkan, penyeleksian dapat dijelaskan dalam pertemuan dengan masyarakat atau panitia pemilihan untuk disepakati. Anggota panitia pemilihan yang disarankan adalah 1) dinas yang bertanggung jawab, 2) Lurah/kepala desa, dan 3) tokoh/perwakilan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

G. Pengumuman hasil seleksi penerima manfaat

Hasil seleksi sebaiknya diumumkan kepada masyarakat. Setidaknya, hasil seleksi terpampang di papan pengumuman di kelurahan/kantor desa untuk diketahui masyarakat.

H. Mekanisme pengaduan

Setelah proses seleksi selesai, masyarakat dapat mengajukan aduan terhadap hasil seleksi. Untuk mencegah terjadinya keresahan di masyarakat, sebaiknya **disediakan akses saluran siaga (hotline) pengaduan** yang diinformasikan saat pengumuman hasil seleksi.

~Pengalaman Kegiatan Percontohan~

Studi Kasus Kegiatan Dukungan di Balaroa, Kota Palu

Kegiatan menganyam silar diperkenalkan kepada para penyintas yang tinggal di shelter Balaroa, Kota Palu. Kegiatan ini bertujuan membantu penyintas memperoleh pendapatan tunai secara cepat. Para perempuan di shelter sasaran ditetapkan sebagai calon penerima manfaat untuk kegiatan ini karena umumnya mereka lebih sulit mendapatkan pekerjaan.

Tim proyek bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu menyusun kriteria seleksi untuk perempuan sasaran. Kriteria ini kemudian disetujui oleh Lurah Balaroa yang bertugas mengawasi shelter.

Pada saat itu, terdapat lebih dari 600 kepala keluarga (KK) di shelter yang terbagi menjadi 21 blok. Shelter dikelola oleh seorang koordinator dan setiap blok memiliki ketua. Pertama, tim proyek beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengadakan pertemuan untuk berbagi tujuan kegiatan dengan pihak-pihak terkait. Pertemuan ini dihadiri oleh Lurah Balaroa serta Camat Palu Barat, koordinator shelter, ketua-ketua blok, serta perwakilan dari organisasi perempuan di shelter Balaroa. Dalam pertemuan ini, kriteria seleksi dipaparkan dan dijaminnya kerja sama dengan pihak terkait.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria seleksi, dipilih satu perwakilan dari setiap blok. Untuk proses ini, koordinator shelter dan ketua blok mengecek informasi dasar dari setiap KK dan menunjuk individu yang cocok dari setiap blok. Kantor kelurahan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, dan tim proyek mengevaluasi hasilnya dan menentukan penerima manfaat

Kriteria seleksi penerima manfaat perempuan untuk kegiatan menganyam silar di Balaroa adalah sebagai berikut:

- (1) Berminat dengan kegiatan tersebut;
- (2) Tidak memiliki pendapatan sendiri;
- (3) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap;
- (4) Tidak memiliki suami;
- (5) Direkomendasikan oleh ketua blok;
- (6) Tidak membawa anak ke tempat pelatihan, kecuali ada pendamping anak yang ikut menemani (dengan alasan keamanan anak karena kegiatan anyaman silar menggunakan pisau irat yang tajam).

Pembelajaran dari kegiatan percontohan ini, sebaiknya disiapkan tempat penitipan anak bagi para perempuan yang berpartisipasi dalam pelatihan karena cukup sulit mendapatkan orang yang dapat menjaga anak-anak mereka selama beberapa hari.

4.3 Pelaksanaan Kegiatan

1. Pertemuan Orientasi

Tujuan:

Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada penerima manfaat mengenai tahapan dan isi kegiatan secara benar dan terperinci, termasuk: a) tujuan kegiatan; b) bantuan yang akan diberikan seperti pelatihan dan peralatan; c) tanggung jawab dan kewajiban penerima manfaat kegiatan (termasuk modal uang, waktu, tenaga kerja, dan kontribusi); d) jadwal; dan e) risiko yang mungkin ditanggung penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	Mengadakan pertemuan orientasi dengan mengundang penerima manfaat untuk menjelaskan rincian kegiatan
Lurah/kepala desa	Mengoordinasikan dan menghadiri pertemuan. Berbagi informasi kepada para pihak terkait
Penerima Manfaat	Berpartisipasi dalam pertemuan dan mengutarakan kebutuhannya

Indikator Capaian:

Identifikasi kegiatan dukungan dan tanggung jawab dinas terkait serta penerima manfaat.

Penting untuk menjelaskan dan mengonfirmasikan:

- (1) Kegiatan dukungan yang disediakan oleh dinas dan pemangku kepentingan lain;
- (2) Kontribusi yang diharapkan dari penerima manfaat;
- (3) Penerima manfaat wajib menyepakati dan mempersiapkan kontribusi/biaya, seperti modal awal dan biaya operasional (misalnya biaya listrik dan air) karena dinas mungkin tidak dapat menanggung semua biaya/peralatan yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan;
- (4) Penerima manfaat wajib bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan pemeliharaan peralatan yang diberikan dengan baik;
- (5) Penerima manfaat berkewajiban dan berhak mengajukan pengaduan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam pelatihan yang telah

direncanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas serta bekerjasama dalam pemantauan.

Sebaiknya penjelasan dan konfirmasi terhadap tanggung jawab/kewajiban di atas dibuat dalam bentuk tertulis.

- *Mengadakan pertemuan dalam kelompok kecil*
- *Peserta pertemuan wajib memakai masker*
- *Menyediakan sanitiser atau wastafel dan sabun cuci tangan untuk membersihkan/mencuci tangan di pintu masuk dan memastikan ventilasi udara yang baik di ruang rapat*

**Adaptasi
Program/
Kegiatan
dengan
Protokol
COVID-19**



- *Tujuan dan periode kegiatan harus disampaikan dengan baik kepada penerima manfaat termasuk bantuan yang akan atau tidak akan mereka terima, kontribusi yang perlu diberikan, hasil yang diharapkan, dan risiko yang ditanggung*
- *Perwakilan masyarakat harus memahami informasi kegiatan dengan baik agar dapat memfasilitasi penerima manfaat dalam kegiatan tersebut.*

2. Pengadaan

Tujuan:

Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan, pengadaan peralatan/ material/ fasilitas yang sesuai dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemerintah.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	Pengadaan peralatan tertentu sesuai dengan peraturan, dan penyiapan MoU
Penerima manfaat	Penandatanganan MoU terkait pemanfaatan peralatan/ material/fasilitas yang diberikan secara benar
Lurah/kepala desa dan koordinator (shelter/Huntara)	Bekerjasama dalam penandatanganan MoU

Indikator Capaian:

- A. Konfirmasi peralatan/material/fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan
Sebelum melakukan pengadaan, dinas mengonfirmasikan kepada penerima manfaat perihal kegiatan dan spesifikasi peralatan/material/fasilitas yang akan disediakan. Hal ini untuk menghindari adanya peralatan yang tidak digunakan karena ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan peralatan yang disediakan.

- *Terkadang penerima manfaat kegiatan tidak tahu peralatan yang dibutuhkan dan/atau spesifikasinya.*
- *Sehingga, penting untuk mengecek kembali permintaan mereka.*

- B. Pengadaan peralatan/material/fasilitas yang sesuai dilaksanakan berdasarkan prosedur pemerintah.

Pengadaan peralatan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan regulasi pemerintah.

- *Pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan pedoman pemerintah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas*

- Tantangan dalam Kegiatan Percontohan -

- *Sebelum pengadaan barang pada kegiatan percontohan pelatihan konstruksi, spesifikasi peralatan konstruksi yang akan diberikan kepada penerima manfaat didiskusikan dan disepakati bersama dengan penerima manfaat. Namun, karena masih terbatasnya distribusi barang pascabencana, beberapa peralatan belum dapat dibeli sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Oleh karena itu, saat pengadaan barang tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan permintaan penerima manfaat. Kondisi pascabencana perlu dipertimbangkan juga dalam pengadaan.*

C. Pengadaan Nota Kesepahaman (MoU) terkait penggunaan peralatan

Ketika dinas terkait memberikan bantuan peralatan kepada penerima manfaat, sebaiknya dibuat Surat Perjanjian atau Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penggunaan dan pengelolaan peralatan yang wajib ditandatangani antara dinas dengan penerima manfaat guna menjamin keberlanjutan kegiatan.

Berikut hal-hal yang dimasukkan dalam MoU:

- (1) Daftar peralatan yang disediakan termasuk harga setiap peralatan;
- (2) Tanggung jawab penerima manfaat untuk menjaga dan merawat peralatan yang diberikan;
- (3) Tanggung jawab penerima manfaat saat peralatan yang diberikan hilang atau dijual,
- (4) Tindakan/sanksi untuk mencegah penyalahgunaan bantuan atau kesengajaan bertindak lalai oleh penerima manfaat akibat ketiadaan konsekuensi berefek jera. Misalnya, hukuman atas pelanggaran perjanjian seperti memasukkan nama ke dalam daftar hitam agar tidak dapat menerima bantuan di masa mendatang.



Salinan surat perjanjian atau nota kesepahaman (MoU) juga diberikan kepada penerima manfaat kegiatan.

- Tantangan dalam Kegiatan Percontohan -

- Pada kegiatan percontohan pelatihan konstruksi di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi, salah satu penerima manfaat menjual peralatan kelompok yang diberikan karena kesulitan ekonomi. Dalam surat perjanjian antara dinas dengan penerima manfaat tidak terdapat klausul penalti terhadap pelanggaran tersebut dan tanggung jawab bersama anggota kelompok. Untuk mencegah hal dan perilaku serupa di masa mendatang, sebaiknya dimasukkan klausul penalti yang jelas dan berefek jera atas pelanggaran tersebut. Jika terjadi pelanggaran, hukuman penalti wajib diberlakukan.

3. Pelatihan

Tujuan:

Untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi penerima manfaat dalam kegiatan serta membangun dan menguatkan rasa kepemilikan.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	- Menyelenggarakan pelatihan. - Pengajar disesuaikan dengan jenis pelatihan; bisa berasal dari dinas kabupaten/kota, LSM, dinas provinsi, dll.
Penerima manfaat	Mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas.
Lurah/kepala desa dan koordinator (shelter/Huntara)	Mendukung/memfasilitasi pelatihan.

Indikator Capaian:

A. Penentuan isi pelatihan dan tingkatannya

Dalam konteks kegiatan pemulihan mata pencaharian, ada dua jenis pelatihan.

- (1) **Mempelajari teknik atau keterampilan baru** untuk memperoleh pekerjaan baru (misalnya pelatihan kejuruan).
- (2) **Meningkatkan kapasitas/prosedur.** Contohnya, pelatihan pembukuan bagi UMKM bermanfaat untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektifitas kegiatan.

Selain itu, topik pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat kemahiran penerima manfaat. Materi yang diajarkan beserta pengajarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat serta dapat diaplikasikan dengan baik oleh penerima manfaat.

- *Isi pelatihan perlu mempertimbangkan tingkat kemahiran penerima manfaat*

B. Penentuan instruktur pelatihan

Ada berbagai lembaga/instansi pemerintahan yang melaksanakan pelatihan serupa. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk bersinergi dengan lembaga/instansi tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dukungan. Seringkali penerima manfaat melakukan pekerjaan harian atau pekerjaan tidak tetap karena hilangnya pekerjaan mereka setelah bencana. Mengamankan penghasilan harian untuk mempertahankan kehidupannya menjadi isu kritis bagi masyarakat terdampak bencana. Oleh sebab itu, penyelenggara pelatihan perlu mempertimbangkan pemberian insentif dalam jumlah tertentu kepada penerima manfaat, seperti per-diem, biaya makan, biaya transportasi, dll sebagai pengganti pendapatan harian yang hilang saat mengikuti pelatihan.

- *Mengadakan pertemuan dalam kelompok kecil*
- *Peserta pertemuan wajib memakai masker*
- *Menyediakan sanitizer atau wastafel dan sabun cuci tangan untuk membersihkan/mencuci tangan di pintu masuk dan memastikan ventilasi udara yang baik di ruang rapat*

*Adaptasi
Program/
Kegiatan
dengan
Protokol
COVID-19*



4. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya

Tujuan:

Untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat dalam berkoordinasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal termasuk menjamin keberlanjutan kegiatan yang bertujuan memperkuat rasa kepemilikan.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	Pengaturan kegiatan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait
Penerima Manfaat	Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitasnya
Lurah/kepala desa	Mendukung/memfasilitasi kegiatan di masyarakat

Indikator Capaian:

Peningkatan kapasitas penerima manfaat dan keberlanjutan kegiatan

Selain pelatihan terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan mata pencaharian seperti survei pasar, pameran, diskusi kelompok terarah (FGD), dll.

- Kegiatan dan isinya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat
- Penerima manfaat difasilitasi guna membangun gerakan swadaya di masa mendatang

4.4 Pengawasan dan Pengendalian

1. Pemantauan

Tujuan:

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan pemberian pendampingan/ dukungan diperlukan bagi penerima manfaat, serta pengambilan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan atau kesenjangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	- Melakukan pemantauan bersama lurah/kepala desa - Memberikan bimbingan/dukungan yang diperlukan kepada penerima manfaat atau langkah-langkah perbaikan lainnya terkait masalah-masalah substansial yang telah teridentifikasi
Penerima Manfaat	- Menyampaikan perkembangan kegiatan dan persoalan yang muncul - Menerima dan melaksanakan petunjuk dari dinas yang bertanggung jawab
Lurah/kepala desa	Melaksanakan pemantauan

Indikator Capaian:

A. Penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi

Kerangka pemantauan dan evaluasi diformulasikan oleh dinas terkait bekerja sama dengan kantor desa dan juga masyarakat saat kegiatan dimulai. Kerangka diformulasikan berdasarkan hasil yang diharapkan pada saat pemantauan dan evaluasi dilaksanakan. Indikator pemantauan yang dikan dalam kerangka tersebut ditentukan berdasarkan data awal (baseline) yang diperoleh pada fase/tahap awal kegiatan.

- *Anggaran pengawasan kegiatan yang memadai perlu disiapkan pada saat memformulasikan kegiatan*

B. Pelaksanaan survei awal

Survei awal dilaksanakan pada tahap awal kegiatan. Idealnya, data dikumpulkan melalui wawancara dengan kandidat penerima manfaat. Akan tetapi, cukup sulit untuk mencakup seluruh calon penerima manfaat. Melalui survei awal ini, data-data penting yang diperlukan dalam evaluasi dikumpulkan.

C. Pemantauan program/kegiatan

Proses pemantauan dilakukan sebagai berikut:

(1) Pengumpulan data

Dinas melakukan pengumpulan data secara berkala untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi berdasarkan kerangka pemantauan dan evaluasi. Jika diperlukan, pengumpulan data awal dan pemantauan dapat dilakukan oleh kantor desa.



(2) Kompilasi data

Dinas mengompilasikan hasil pemantauan dalam format sederhana sebagai materi berbagi pembelajaran dalam pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota.

- (3) **Pendampingan yang tepat kepada penerima manfaat** berdasarkan masalah yang teridentifikasi

Jika terjadi kesenjangan yang cukup besar antara kemajuan dengan tujuan kegiatan, maka perlu dilakukan tindakan korektif agar tujuan kegiatan yang telah ditentukan di awal tetap tercapai.

- *Perlu dipahami bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, tetapi juga untuk melakukan pendampingan atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh solusi yang lebih baik, serta untuk mengawal kegiatan.*

2. Evaluasi

Tujuan:

Untuk mengetahui capaian kegiatan yang mengacu terhadap indikator tertentu.

Aktor Utama dan Perannya:

Organisasi	Peran
OPD kabupaten/kota penanggung jawab	Melakukan evaluasi bersama lurah/kepala desa
Penerima Manfaat	Berpartisipasi dalam pertemuan evaluasi. Mengidentifikasi capaian serta pembelajaran yang diambil dari kegiatan untuk melanjutkan kegiatan tersebut
Lurah/kepala desa	Melakukan kegiatan evaluasi bersama dinas yang bertanggung jawab

Indikator Capaian:

- A. Hasil kegiatan dievaluasi menggunakan indikator tertentu

Kerangka pemantauan dan evaluasi yang dibuat pada awal kegiatan dipergunakan untuk menilai pelaksanaan dan hasil kegiatan. Di akhir kegiatan atau pada waktu yang telah ditetapkan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi, dinas yang bertanggung jawab melaksanakan evaluasi. Kegiatan dievaluasi dengan perspektif **apakah kegiatan yang dilaksanakan telah secara efektif mencapai tujuannya** berdasarkan data indikator yang dikumpulkan melalui wawancara penerima manfaat.

B. Hasil penilaian didiskusikan dengan penerima manfaat

Hasil evaluasi disusun dan dipresentasikan di lokakarya bersama dengan penerima manfaat untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang berpengaruh secara negatif maupun positif terhadap pencapaian kegiatan, serta membahas langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh negatif dan mendorong hasil positif. Lokakarya diakhiri dengan merangkum **pembelajaran pelaksanaan program kegiatan** sehingga penerima manfaat dapat lebih meningkatkan kegiatan mereka, dan/atau dinas yang bertanggung jawab dapat meningkatkan program/ kegiatan intervensinya.



- *Mengadakan pertemuan dalam kelompok kecil*
- *Peserta pertemuan wajib memakai masker*
- *Menyediakan sanitizer atau wastafel dan sabun cuci tangan untuk membersihkan/mencuci tangan di pintu masuk dan memastikan ventilasi udara yang baik di ruang rapat*

**Adaptasi
Program/
Kegiatan
dengan
Protokol
COVID-19**



C. Hasil penilaian dibagi kepada dan antara pemangku kepentingan

Hasil evaluasi disampaikan dalam rapat koordinasi agar temuan dan pembelajaran dapat digunakan pada program yang sedang berjalan ataupun direncanakan.

- *Temuan dan pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan dirangkum dan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan guna perbaikan lebih lanjut di masa mendatang.*

BAB-5

Peran Pemangku Kepentingan dan Kerangka Koordinasi

- 5.1 Kerangka koordinasi dalam konteks pemulihan dan rekonstruksi
- 5.2 Usulan kerangka koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota
- 5.3 Peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan



05

BAB 5

Peran Pemangku Kepentingan dan Kerangka Koordinasi

5.1 Kerangka Koordinasi dalam Konteks Pemulihan dan Rekonstruksi

Koordinasi dan komunikasi antar para pemangku kepentingan sangat penting dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan percepatan pelaksanaan program. Sub-bab ini menyajikan kerangka koordinasi aktual pada tahap tanggap darurat hingga rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Kerangka koordinasi di tingkat nasional

Pada masa tanggap darurat, Pemerintah Indonesia mengaktivasi **kerangka klaster sebagai platform koordinasi dan kerjasama saat terjadi bencana berdasarkan Rencana Kontijensi Antar Lembaga**. Pemerintah Indonesia memiliki Klaster Nasional yang dikoordinasi oleh K/L terkait dan Klaster Internasional yang dikoordinasi oleh Humanitarian Country Team (HCT; forum organisasi urusan kemanusiaan di suatu negara, yang terdiri dari organisasi PBB, non-PBB dan lembaga non pemerintah). Pemerintah pusat menugaskan para pejabat terkait ke Palu sebagai Pusat Koordinasi Operasi Gabungan untuk Bantuan Internasional (Joint Operation Coordination Center for International Assistance (JOCCIA) yang dibentuk oleh tim ASEAN – ERAT, dan diberi mandat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk berkoordinasi dan memfasilitasi penawaran bantuan internasional yang diterima. Kerangka koordinasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Kerangka klaster tingkat nasional ini berakhir seiring dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada Oktober 2018.

Gambar 2 Kerangka Koordinasi pada Tahap Tanggap Darurat⁷

⁷ Koordinasi Antar Lembaga

2. Kerangka koordinasi di tingkat pemerintah daerah

A. Tahap Tanggap Darurat

Koordinasi di tingkat pemerintah daerah dimulai sejak tahap tanggap darurat dengan terbentuknya JOCCIA di Kota Palu, seperti yang dipaparkan di sub-bab sebelumnya. Sedangkan untuk kegiatan terkait pemulihan mata pencaharian, **BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mengumpulkan dan mengompilasi data kehilangan dan kerusakan** bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD kabupaten/kota terdampak bencana, Kementerian PUPR, Dinas PUPR, dan Bappenas.

B. Tahap Transisi

Pada masa transisi yang berlangsung setelah masa tanggap darurat, **pendataan diperluas ke lima sektor, yaitu sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor**, yang tercakup dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Terkait pendataan dapat merujuk ke Bab 4 (4.1.1) Kajian Awal Rancangan Rencana Kegiatan dan Pemangku Kepentingannya

Saat Klaster Nasional berakhir pada akhir tahap tanggap darurat, dibentuklah Klaster Daerah pada tahap transisi dengan mempertahankan format pengelompokan klaster di tahap tanggap darurat guna menjaga kontinuitas koordinasi. Kerangka koordinasi ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini.



Pemda Provinsi

Klaster Daerah

(1 November 2018 ~)

Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (kantor Gubernur)

Pemutakhiran daftar kontak (telepon, e-mail, grup WhatsApp)

Pengumpulan format 4W berdasarkan sektor hingga tingkat desa

Klaster Daerah	Sub-klaster dan Pokja	
Pendidikan	-	
Kesehatan	Nutrisi, Kesehatan, Kesehatan Reproduksi	
Logistik	-	
Pemulihan Awal	-	
Pengungsian dan Perlindungan	Pengungsian (sub-klaster) Shelter, Air bersih, Sanitasi dan Higiene (WASH), Pengelolaan shelter, Keamanan	Perlindungan (sub-klaster) Perlindungan Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, Minoritas, Dukungan Psikososial
Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Mata Pencaharian (FSLH), Pokja Bantuan Non Tunai (BaNTu)	

Koordinasi Ad-hoc (kondisi berbeda di tiap kabupaten/kota)

Dipimpin oleh gubernur dan/atau Bappeda

Rapat/koordinasi antar mitra pembangunan

Rapat/koordinasi antar instansi pemerintah

Rapat/koordinasi antara mitra pembangunan dengan pemerintah

Pemda Kabupaten/Kota

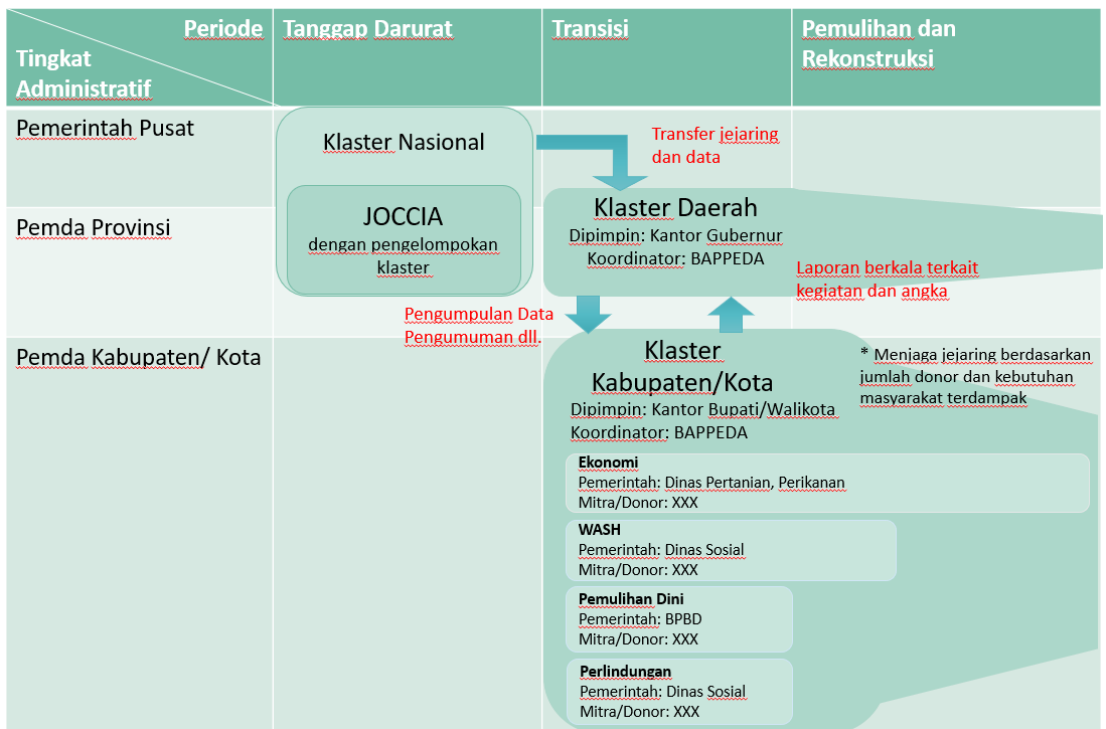
Gambar 3 Kerangka Koordinasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahap Transisi

C. Tahap Pemulihan dan Rekonstruksi

Koordinasi di tingkat pemerintah daerah dimulai sejak masa tanggap darurat dengan terbentuknya JOCCIA di Kota Palu, seperti yang dipaparkan di sub-bab sebelumnya. Sedangkan untuk kegiatan terkait pemulihan mata pencaharian, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mengumpulkan dan mengompilasi data kehilangan dan kerusakan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD kabupaten/kota terdampak bencana, Kementerian PUPR, Dinas PUPR, dan Bappenas.

5.2 Usulan kerangka koordinasi di tingkat kabupaten/kota

Di tingkat kabupaten/kota, tidak ada pengaturan kelembagaan resmi untuk koordinasi antar pemangku kepentingan seperti kerangka klaster. Seperti dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, kerangka koordinasi dan struktur di masing-masing kabupaten/kota bersifat *ad-hoc* sehingga terjadi kendala komunikasi antar pemangku kepentingan. Dalam upaya menghindari tumpang tindih program kegiatan, pengumpulan data, dsb, disarankan untuk mengoperasikan kerangka koordinasi di tingkat kabupaten/kota melalui **perluasan klaster daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota khususnya untuk sektor tertentu**, seperti perlindungan yang mencakup shelter, ekonomi, dan WASH dimana banyak mitra pembangunan dan lembaga non-pemerintah yang terlibat.



Gambar 4 Usulan Kerangka Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Sistem koordinasi ini berkontribusi dalam pengumpulan dan kompilasi data lintas sektoral yang selanjutnya dipergunakan dalam perencanaan program pemulihan dan rekonstruksi. Akuisisi data yang efisien dari pemerintah merupakan prasyarat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan program kegiatan dan penerima manfaatnya.

5.3 Peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan

Pelaksanaan kegiatan pemulihan mata pencaharian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan pemangku kepentingan utama, sedangkan kepala desa serta tokoh masyarakat lainnya berperan sebagai pendukung dalam kegiatan tersebut. Rangkuman peran utama pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6 (halaman 61 ~ 62).

1. Pemerintah kabupaten/kota

Kabupaten dan kota adalah unit administrasi yang dekat dengan masyarakat dan memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, kabupaten dan kota memainkan peran utama untuk melakukan kegiatan dukungan kepada masyarakat, individu dan setiap entitas dengan anggarannya sendiri maupun melalui sumber dana lain, seperti APBN, pihak swasta dan mitra pembangunan.

Pemerintah kabupaten/kota mengumpulkan informasi kebutuhan dan data dari korban dan penyintas yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk selanjutnya diinformasikan kepada para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga mengoordinasikan dan menyesuaikan berbagai dukungan yang diterima dari para donor, relawan dan sumber lainnya.

2. Camat

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Desa dan kelurahan merupakan bagian wilayah dari kecamatan. Kebutuhan setempat yang telah dikonfirmasi di tingkat desa/kelurahan, kemudian dihipunkan di tingkat kecamatan untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota guna memutuskan tindakan dan pendistribusian anggaran serta sumber daya manusia. Ketika suatu desa menderita kerusakan parah dan pemerintahan desa tidak berjalan, maka kecamatan selaku lembaga pemerintahan di atasnya akan menjalankan fungsi tersebut. Contoh kasus di Provinsi Sulawesi Tengah, pilkades tengah berjalan saat terjadi bencana, sehingga terjadi kekosongan kepala desa. Untuk mengatasi hal tersebut kecamatan menugaskan stafnya untuk berfungsi sebagai Plt. Kepala Desa.

3. Kepala desa/lurah dan pemerintahan desa/kelurahan

Kelurahan (kawasan urban) dan desa (kawasan rural) adalah unit pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Kepala desa dan lurah berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Secara umum, pemerintah desa dan kelurahan bertanggung jawab atas wilayahnya, termasuk mengelola tempat pengungsian, dan hunian sementara (huntara) setelah terjadi bencana.

Informasi mengenai kerusakan, kebutuhan dan status masyarakat di desa/kelurahan yang dikumpulkan oleh tokoh masyarakat desa, dikompilasi di kantor desa/ kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan oleh kantor desa ke kecamatan. Demikian juga sebaliknya, jika pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lainnya bermaksud menyampaikan informasi, pengumuman, dan materi kepada masyarakat, maka hal tersebut sebaiknya diinformasikan melalui kantor desa/ kelurahan. Peranan kantor desa/kelurahan sebagai sumber dan penyedia informasi bagi masyarakat amatlah penting, khususnya ketika para penyintas dan korban bencana mengalami keterbatasan informasi dan komunikasi saat terjadi bencana.

4. Kepala dusun/ketua RW/ketua RT (struktur pemimpin masyarakat yang telah ada)

Di Provinsi Sulawesi Tengah, dusun adalah bagian wilayah dalam desa, sedangkan rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan di bawah desa atau dusun walaupun tidak termasuk secara resmi dalam administratif pemerintahan. Layanan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa ditetapkan melalui hasil musyawarah dengan warga. Ketua lembaga kemasyarakatan biasanya merupakan tokoh masyarakat dan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa/kelurahan, khususnya untuk berbagi informasi dan data. Saat terjadi bencana, kepala dusun/ketua RW/ketua RT bertugas mengumpulkan data warga berdasarkan jenis kelamin dan usia, lokasi evakuasi warga serta jumlah KK yang tinggal di wilayahnya, dan melaporkannya ke kantor desa/kelurahan.

5. Koordinator tempat pengungsian/hunian sementara (pemimpin komunitas baru pascabencana)

Kepala dusun dan ketua RW/RT merupakan struktur tatanan sosial pemimpin masyarakat yang terbentuk sebelum bencana. Pada kasus pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi terbentuknya masyarakat/komunitas baru di lokasi pengungsian seperti tenda dan hunian sementara (huntara), muncul struktur pemimpin masyarakat yang baru, yaitu koordinator shelter dan koordinator huntara. Koordinator shelter/huntara ini ditunjuk oleh warga shelter/huntara berkoordinasi dengan kepala desa/lurah setempat.

Bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan, Koordinator shelter/huntara mengumpulkan data pengungsi di lokasi pengungsian serta mengoordinasikan distribusi bantuan logistik, makanan, dsb di shelter/huntara, walaupun status mereka pun pengungsi. Agar situasi kondisi di shelter/huntara tetap kondusif, maka kemampuan koordinasi yang baik, keadilan, dan transparansi menjadi kunci utama bagi koordinator shelter/huntara dalam menjalankan tugasnya.

6. Pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengoordinasian respon tanggap darurat serta kegiatan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana. Data dan informasi yang perlu dihimpun oleh pemda provinsi mencakup kerusakan, situasi terkini, serta kebutuhan para korban dan penyintas untuk selanjutnya diinformasikan dan dikoordinasikan di tingkat provinsi, nasional dan antar para pemangku kepentingan lainnya. Pemda provinsi dan kabupaten/kota harus saling berkoordinasi dan mendukung dalam pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat pascabencana, khususnya dalam aspek teknis dan penganggaran.

7. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat dan K/L terkait mendukung dan berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten melalui pemerintah provinsi untuk pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat, khususnya dalam aspek teknis dan penganggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. K/ L perlu mempertimbangkan keterbatasan dan kapasitas sumber daya di lokasi

intervensi saat menyusun dan melaksanakan program dukungan pascabencana. Jika SDM dan anggaran di lokasi intervensi tidak memadai akibat terdampak bencana, maka pemerintah pusat sebaiknya menyiapkan dukungan tambahan yang diperlukan, baik SDM dan sumber daya lainnya dari luar wilayah bencana.

8. Lembaga non-pemerintah dan mitra pembangunan

Ada banyak lembaga non-pemerintah (NGO) baik nasional/lokal maupun internasional, organisasi akar rumput, dan mitra pembangunan yang membantu para korban dan penyintas bencana. Peranannya bervariasi bergantung pada program/kegiatan dukungan yang dilaksanakan serta skema hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaan program/kegiatan dukungannya, NGO/mitra pembangunan berinteraksi dan terkoneksi dengan pemerintah setempat, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada umumnya, program/kegiatan dukungan pascabencana dari NGO/mitra pembangunan dilaksanakan di masa tanggap darurat, kemudian dilanjutkan dengan program/kegiatan dukungan terkait pemulihan mata pencaharian. Pada kasus Provinsi Sulawesi Tengah, setiap NGO/mitra pembangunan yang melaksanakan program/kegiatan dukungan pascabencana wajib melapor ke Bappeda kabupaten/kota setempat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah berbagi informasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan NGO/mitra pembangunan. Agar dapat saling mendukung, bertukar dan berbagi informasi antara kedua belah pihak amatlah penting.

9. Sektor swasta

Pasca bencana, sektor swasta seringkali memberikan bantuan hibah berupa bantuan logistik, seperti sembako, pembangunan hunian sementara, tempat beribadah, dsb. Dalam konteks pemulihan mata pencaharian pascabencana yang berkelanjutan, peranan dan keterlibatan sektor swasta dapat diperluas dan dikembangkan menjadi jalinan kemitraan dengan UMKM, dan kelompok sasaran terdampak, misalnya penyediaan dukungan pemasaran baik di toko fisik (luring) dan daring (on-line), pelatihan teknis terkait produksi, promosi, dll.

Selain sektor swasta yang berada di luar lokasi bencana, UMKM terdampak

bencana yang bangkit dan kembali berusaha dengan upayanya sendiri turut berperan dalam penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan barang/jasa di lokasi bencana.

10. Masyarakat dan kelompok sasaran

Masyarakat terdampak bencana dan kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki adalah penerima manfaat program kegiatan pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat. Pada proses dan upaya pemulihan dan pembangunan kembali, perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok sasaran, antara lain mata pencaharian dan kemandirian sosial ekonomi.

11. Akademisi dan universitas

Akademisi dan universitas di daerah terdampak bencana memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi melalui jejaringnya. Di lokasi terdampak bencana, akademisi dan universitas bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menganalisis situasi terkini, mengkaji penyebab bencana, dan menyarankan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Akademisi dan universitas juga saling terkoneksi dengan akademisi dan universitas lainnya untuk berbagi informasi yang benar dan terpercaya. Selain itu, akademisi dan universitas juga berperan dalam pelibatan dan pemberdayaan kaum muda agar lebih pro-aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di masa mendatang.

12. Media

Saat terjadi bencana, media tidak hanya berperan penting sebagai penyedia dan penyebar informasi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas kondisi fisik dan mental para penyintas dan korban.

Selain berfungsi utama sebagai penyalur informasi, media melalui pendekatan persuasif dapat menginformasikan upaya meminimalan kerusakan dan mengarahkan tata cara evakuasi yang benar bagi masyarakat, merespon kebutuhan informasi bagi para korban dan penyintas, serta mengurangi rasa ketakutan dan kecemasan para korban. Di saat yang sama, media juga berperan sebagai bufer untuk mencegah dampak yang disebabkan oleh rumor dan kesalahpahaman masyarakat di daerah bencana. Selain itu, media juga berperan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran terhadap

kekerasan berbasis gender serta diskriminasi terhadap kaum rentan dan termarginalkan di masa tanggap darurat dan pemulihan. Media juga dapat membantu menyebarkan informasi mengenai nomor kontak saluran siaga (hotline) dan layanan dukungan lainnya.

5.4 Pemetaan pemangku kepentingan untuk koordinasi program/ kegiatan

Dalam penanganan pascabencana, koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar pemangku kepentingan merupakan salah satu kegiatan penting, sebagaimana disebutkan pada sub-bab 4.1 Perencanaan Kegiatan, langkah 1) Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat. Pemetaan pemangku kepentingan berupa tabulasi yang memuat daftar para pemangku kepentingan beserta program/kegiatannya dapat membantu koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penanganan bencana yang saling terkait. Contoh **pemetaan pemangku kepentingan** dapat dilihat pada **tabel 7 di halaman 63**.



Tabel 5. Peran Utama Lembaga Pemerintah

Langkah – Langkah Pelaksanaan Kegiatan	Pemerintah Pusat	Pemda Provinsi	Pemda Kabupaten/ Kota (Bappeda)	OPD Kabupaten/ Kota	Kepala Desa/ Lurah	Kepala Dusun/Ketua RW/RT/ Koordinator Shelter/Huntara
(1) Perencanaan Kegiatan						
1-1. Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan pemangku kepentingan	Menginformasikan dukungan pemerintah pusat yang tersedia	Merangkul informasi dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan	Memprioritaskan kegiatan sasaran dalam rencana aksi	Memprioritaskan kegiatan sasaran dan identifikasi pemangku kepentingan	Menyediakan informasi yang dibutuhkan	Menyediakan informasi yang dibutuhkan
1-2. Konsultasi dengan masyarakat untuk memformulasikan rancangan rencana kegiatan		Mengawal dan memantau kegiatan		Mengatur pertemuan konsultasi dan fasilitasi kegiatan	Pengorganisasian pertemuan konsultasi	Hadir di pertemuan, berbagi informasi sebelum/ setelah pertemuan konsultasi
(2) Penyeleksian Penerima Manfaat						
2-1. Penentuan kriteria seleksi penerima manfaat			Menginformasikan hasil di kabupaten/ kota	Menyiapkan usulan kriteria seleksi, finalisasi kriteria seleksi	Hadir di pertemuan untuk menyusun kriteria	Hadir di pertemuan untuk menyusun kriteria
2-2. Seleksi penerima manfaat program kegiatan				Mengatur seleksi penerima manfaat	▪ Mengatur seleksi penerima manfaat ▪ Membuat pengumuman	▪ Mengumpulkan data ▪ Membantu mengumumkan
(3) Pelaksanaan Kegiatan						
3-1. Pertemuan Orientasi				Menyelenggarakan pertemuan	Hadir di pertemuan	Hadir di pertemuan
3-2. Pengadaan	Menyediakan peralatan/fasilitas (jika sepakat)	Menyediakan peralatan/fasilitas (jika sepakat)	Mengatur anggaran program/ kegiatan	▪ Mengonfirmasi spesifikasi peralatan dan pengadaan peralatan ▪ Penandatangan nota kesepahaman/surat perjanjian terkait penggunaan alat	Membantu menyiapkan nota kesepahaman terkait penggunaan alat	
3-3. Pelatihan	Menyediakan pelatihan (jika sepakat)	Menyediakan dukungan/bantuan (jika sepakat)	Mengatur anggaran program/ kegiatan	Menyelenggarakan pelatihan	Mendukung penyelenggaraan pelatihan	Mendukung penyelenggaraan pelatihan
3-4. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya	Menyediakan dukungan/bantuan (jika sepakat)	Menyediakan dukungan/bantuan (jika sepakat)	Mengatur anggaran program/ kegiatan	Menyelenggarakan program/kegiatan	Mendukung program kegiatan	Mendukung program kegiatan (jika perlu)
(4) Pengawasan dan Pengendalian						
4-1. Pemantauan	Menghimpun hasil pemantauan sebagai referensi		Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk saling berbagi hasil	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi	Membantu pengumpulan data
4-2. Evaluasi						

Tabel 6. Peran Utama Lembaga Non Pemerintah dan Pemegang Kepentingan Lainnya

Langkah – Langkah Pelaksanaan Kegiatan	NGO, Sektor swasta, dan lainnya	Masyarakat	Akademisi/ Universitas	Media
(1) Perencanaan Kegiatan				
1-1. Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan pemangku kepentingan	Bekerja sama dalam pemetaan pemangku kepentingan (jika diperlukan)		Menyediakan informasi dan saran (jika diperlukan)	
1-3. Konsultasi dengan masyarakat untuk memformulasikan rancangan rencana kegiatan		Berpartisipasi dalam penyusunan rencana kegiatan		
(2) Penyeleksian Penerima Manfaat				
2-1. Penentuan kriteria seleksi penerima manfaat		Berpartisipasi dalam penentuan kriteria		
2-2. Seleksi penerima manfaat program kegiatan		Pengorganisasian kelompok, Memasukkan berkas pendaftaran		
(3) Pelaksanaan Kegiatan				
3-1. Pertemuan orientasi		Berpartisipasi dalam pertemuan		Menyebarkan berita fasilitas pemulihan dan rekonstruksi para korban dan penyintas
3-2. Pengadaan		Menyiapkan daftar peralatan yang dibutuhkan. Penandatanganan nota kesepahaman/surat perjanjian terkait penggunaan peralatan		
3-3. Pelatihan	SDM instruktur pelatihan	Turut serta dalam pelatihan secara sukarela	SDM instruktur pelatihan	Menyebarkan berita fasilitas kepada para korban dan penyintas
3-4. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya	Sumber daya untuk mendukung program kegiatan	Melaksanakan program/kegiatan	Sumber daya untuk mendukung program/ kegiatan	Menyebarkan berita fasilitas kepada para korban dan penyintas
(4) Pengawasan dan Pengendalian				
4-1. Pemantauan		Berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi	Menyebarkan hasil kegiatan jika disetujui oleh penyelenggara program/kegiatan	Menyebarkan hasil kegiatan fasilitas para korban dan penyintas
4-2. Evaluasi				
(5) Lainnya				
				Memberikan informasi faktual yang akurat, terpercaya dan cepat

Tabel 7 Pemetaan Pemangku Kepentingan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan

Pemangku Kepentingan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output	Outcome	Dampak	Target	Lokasi	Periode
K/L dan OPD terkait infrastruktur dan tata ruang/ tata wilayah	Pembangunan infrastruktur fasilitas umum	Kawasan wisata Teluk Palu (<i>Palu Pavillion</i>)	Peningkatan jumlah pengunjung ke Kawasan Wisata Teluk Palu (peningkatan PAD melalui retribusi di kawasan wisata)	Mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Palu sebesar 0,2% melalui pertumbuhan UMKM di Kawasan Wisata Teluk Palu	Masyarakat dan pelaku usaha	Area Teluk, Palu, Kelurahan Talise	2 tahun
K/L dan OPD terkait Koperasi dan UMKM	1) Pengembangan, penguatan, dan perlindungan UMK 2) Pelatihan peningkatan kapasitas kewirausahaan 3) Digitalisasi koperasi	Pelaku usaha dapat kembali mandiri dan berdaya setelah bencana	Pemberdayaan UMKM	Meningkatkan peluang kerja	Pelaku usaha (UMK)	Desa Mpanau, Biromaru, Kabupaten Sigi	3 bulan
K/L dan OPD terkait Perindustrian dan Perdagangan	1) Fasilitasi sertifikat Halal bagi IKM 2) Pelatihan pemasaran dan promosi produk 3) Pengembangan IKM melalui penguatan jaringan sentra industri 4) Fasilitasi izin dan pengembangan usaha 5) Fasilitasi promosi produk di pameran dan pasar retail (mini market, supermarket) 6) Fasilitasi kemasan dan pelatihan pengolahan/ pemrosesan						6 bulan
K/L dan OPD terkait Pariwisata di Sulawesi Tengah	1) Fasilitasi kemitraan dengan/ bagi UMK di sektor pariwisata 2) Standarisasi UMK di sektor pariwisata		Peningkatan UMK di sektor pariwisata				6 bulan

06



LAMPIRAN

1. Profil Kegiatan Percontohan di Kabupaten/Kota
2. Program Edukasi Pengurangan Risiko Bencana
3. Lembar Pengecekan Pelaksanaan Kegiatan
4. Contoh SOP-Standard Operating Procedure
5. Contoh Program Kegiatan - Studi Kasus
6. Contoh Program Kegiatan Pemda di Sulawesi Tengah
7. Contoh Kuesioner Survei Awal

1. Profil Kegiatan Percontohan di Kabupaten/Kota

(1) Kota Palu

Nama Kegiatan	Kegiatan percontohan pemulihan mata pencaharian kaum perempuan di shelter Balaroa melalui pelatihan kerja dan kegiatan masyarakat	
Lokasi	Shelter Balaroa, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu	
Kelompok Sasaran	Kaum perempuan dan pengungsi lainnya di Shelter Balaroa	
Tujuan	Pemberdayaan kegiatan ekonomi kaum perempuan di Shelter Balaroa serta mewujudkan dan memperkuat kebersamaan kaum perempuan serta seluruh pengungsi di shelter melalui kegiatan kemasyarakatan	
Kegiatan	1. Diskusi dengan mitra imbalan mengenai ide kegiatan 2. Pertemuan konsultatif untuk memahami kebutuhan masyarakat 3. Penentuan pengenalan kegiatan anyaman silar sebagai upaya penciptaan pendapatan secara cepat dalam jangka pendek 3-1. Seleksi penerima manfaat kegiatan berkoordinasi dengankoordinator shelter 3-2. Pelaksanaan pelatihan anyaman silar selama 4 hari bagi 21 peserta. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu menyiapkanpelatih dan material pelatihan. 3-3. Pelaksanaan pelatihan ke-2 untuk membuat produk bernilai komersil. 4. Penentuan kegiatan dukungan jangka panjang untuk pemulihan mata pencahar kaum perempuan (misalkan: pembuatan dan penjualan makanan ringan) 4-1. Seleksi penerima manfaat kegiatan dukungan melaluipengumuman publik di shelter 4-2. Pendirian sentra kuliner Balaroa di depan Kantor Kelurahan Balaroa 4-3. Penyediaan peralatan bagi penerima manfaat 5. Peningkatan kapasitas kelompok 5-1. Penyelenggaraan pelatihan pembukuan selama 2 hari bagi kelompok anyaman silar dan kelompok kuliner 6. Pendampingan intensif dan monitoring secara periodik	
Periode	Februari 2019 – Desember 2019	
Mitra	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	
Foto Kegiatan	 Produk anyaman silar Kelompok perempuan pembuat camilan	

(2) Kabupaten Sigi

Nama Kegiatan	Kegiatan percontohan pembangunan dan pengoperasian sentra UMKM masyarakat dan penyelenggaraan pelatihan untuk pemulihan mata pencaharian di lokasi hunian sementara	
Lokasi	Huntara Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi	
Kelompok Sasaran	Usaha mikro dan kecil di lokasi huntara yang kehilangan asetnya	
Tujuan	Memulihkan mata pencaharian pelaku UMKM dan juga meningkatkan akses terhadap kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat melalui pengoperasian sentra UMKM masyarakat yang dibangun di lokasi huntara, serta meningkatkan peluang memperoleh pendapatan bagi kaum perempuan dan laki-laki melalui penyediaan pelatihan terkait pemulihan mata pencaharian	
Kegiatan	1. Diskusi bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk menentukan lokus kegiatan, yaitu Desa Mpanau 2. Pertemuan konsultatif dengan masyarakat untuk mendiskusikan ide pembangunan sentra UMKM dan pelatihan keterampilan 3. Pelatihan keterampilan konstruksi bangunan 3-1. Identifikasi pelatih/instruktur untuk pelatihan 3-2. Pertemuan konsultatif dengan masyarakat untuk mendiskusikan kriteria seleksi bagi penerima manfaat pelatihan keterampilan konstruksi bangunan 3-3. Pelatihan keterampilan konstruksi bangunan bagi kaum laki-laki sebagai upaya pemulihan mata pencaharian 3-4. Monitoring bulanan dengan sarjana pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sigi untuk memantau kemajuan penerima manfaat dan efektivitas kegiatan setelah pelatihan 4. Pembangunan sentra UMKM 4-1. Pertemuan konsultatif dengan masyarakat untuk mendiskusikan jenis usaha yang dibutuhkan di sentra UMKM 4-2. Penentuan lokasi dan pembangunan sentra UMKM 4-3. Pengumuman publik untuk diseminasi rencana kegiatan, pengumpulan formulir pendaftaran, dan seleksi calon kelompok usaha pengguna sentra UMKM 4-4. Penyediaan peralatan bagi kelompok penerima manfaat 4-5. Peningkatan kapasitas penerima manfaat melalui pelatihan pembukuan selama 2 hari bagi kelompok UMKM 4-6. Pemantauan bulanan dengan sarjana pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk memantau kemajuan peserta dan efektivitas kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan dukungan	
Periode	Februari 2019 – Desember 2019	
Mitra	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi	
Foto Kegiatan		
		
	Pelatihan konstruksi	Sentra UMKM

(3) Kabupaten Donggala

Nama Kegiatan	Kegiatan percontohan restorasi mata pencaharian nelayan terdampak (penangkap ikan teri) melalui konstruksi perahu dan penyediaan alat tangkap ikan, serta pemulihan mata pencaharian kaum perempuan pengolah produk ikan teri secara tradisional	
Lokasi	Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala	
Kelompok Sasaran	Sektor perikanan di Desa Lero Tatari	
Tujuan	▪ Memulai kembali kegiatan ekonomi di sektor perikanan ▪ melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyediaan peralatan bagi masyarakat di Desa Lero Tatari ▪ Mendukung upaya restorasi ekonomi yang ▪ berkelanjutan melalui peningkatan kualitas produk olahan di sektor perikanan	
Kegiatan	1. Diskusi bersama dengan kedua mitra imbalan untuk menentukan struktur kegiatan percontohan dan peran setiap pihak dalam pelaksanaan kegiatan 2. Penentuan penerima manfaat (kelompok sasaran) untuk kegiatan dukungan terhadap nelayan penangkap ikan dan kelompok pengolahan produk ikan 3. Kontrak dengan LSM lokal untuk dukungan pelaksanaan kegiatan 4. Kegiatan dukungan untuk memulai kembali penangkapan ikan teri 4-1 Penyelenggaraan pelatihan konstruksi perahu penangkap ikan 4-2 Penentuan spesifikasi perahu penangkap ikan, alat tangkap ikan yang akan diberikan kepada kelompok nelayan 4-3 Pengorganisasian pembuatan perahu bersama dengan tukang pembuat perahu dan nelayan 4-4 Penyediaan 20 set perahu, mesin, peralatan pelengkap dan alat tangkap ikan bagi 2 kelompok nelayan dengan jumlah anggota 40 orang 4-5 Penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha 5. Kegiatan dukungan bagi kelompok perempuan untuk berusaha kembali dan meningkatkan produk olahan Ikan Teri 5-1 Penyelenggaraan pelatihan pengolahan Ikan Teri selama 3 hari 5-2 Penentuan produk olah baru ikan teri serta peralatan yang dibutuhkan termasuk spesifikasinya 5-3 Penyediaan peralatan pengolahan ikan teri, baik secara tradisional maupun modern kepada 38 anggota kelompok 5-4 Penyelenggaraan pelatihan pembukuan selama 2 hari 6. Penyelenggaraan edukasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) selama 2 hari bagi 2 kelompok nelayan dan kelompok perempuan penerima manfaat	
Periode	Februari 2019 - Desember 2019	
Mitra	Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala	
Foto Kegiatan	 	
	Produk baru kelompok perempuan	Bantuan perahu dan alat tangkap bagi nelayan

2. Program Edukasi Pengurangan Risiko Bencana

Kegiatan	Lokakarya pengurangan risiko bencana bagi penerima manfaat kegiatan percontohan di Desa Lero Tatari	
Tanggal	Selasa, 30 Juli 2019 – Rabu, 31 Juli 2019; 09.00 ~ 16.00 WITA (GMT +8)	
Tempat	Aula SMP Negeri 2, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala	
Tujuan	1. Meningkatkan wawasan, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat di Desa Lero Tatari untuk menanggulangi dampak potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami 2. Mendiskusikan isi papan penanda tsunami dan lokasi instalasi sebagai dokumentasi memori bencana yang akan diteruskan kepada generasi selanjutnya sebagai bagian dari prakarsa pengurangan risiko bencana	
Program	Materi	Instansi Penanggung Jawab
Foto kegiatan	Hari 1 • Tinjauan umum bencana dan mekanisme transmisi informasi saat bencana • Kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap informasi bencana, termasuk peringatan dini dari BMKG	BMKG Stasiun Geofisika I, Palu
	• Trauma pascabencana • Pemulihan trauma pascabencana	Pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Donggala
	• Pengetahuan lokal terkait kebencanaan	Juru Bencana BPBD Donggala
	• Dokumentasi memori bencana di Jepang	Tim Proyek JICA
	Hari 2 • Lokakarya penanda bencana sebagai dokumentasi memori bencana	
	• Praktik bagi laki-laki: Penyelamatan dan Evakuasi	Kantor SAR Palu
	• Praktik bagi perempuan: Pertolongan Pertama	PMI Kabupaten Donggala
 Pelatihan evakuasi dan penyelamatan bagi kelompok nelayan dan pelatihan P3K bagi kelompok perempuan pembuat olahan ikan teri di Desa Lero Tatari, Donggala		

3. Lembar Pengecekan Pelaksanaan Kegiatan



Hal – hal pokok yang perlu dikonfirmasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dipaparkan di Bab 4 telah dirangkum dalam lembar pengecekan berikut:

(1) Lembar pengecekan bagi unit pelaksana program/ OPD kabupaten/kota

Langkah/Hal Pokok	Cek
1. Perencanaan Kegiatan	
Langkah 1-1: Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan pemangku kepentingan	-
Isi kegiatan dan lokasi sasaran ditentukan berdasarkan kriteria yang jelas	
Konfirmasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Induk/ Rencana Aksi	
Cek kemungkinan penerapan kegiatan kelompok	
Langkah 1-2: Konsultasi masyarakat untuk memformulasikan rancangan rencana kegiatan	-
Tanggal dan waktu pertemuan ditentukan dengan mempertimbangkan waktu luang penerima manfaat, serta memerhatikan kegiatan rutin harian kaum pria dan wanita.	
Kepala dusun/RT, kepala RW, koordinator shelter/hunian beserta anggota masyarakat lain berpartisipasi dalam pertemuan.	
Rancangan rencana kegiatan dan prosedur pelaksanaannya disusun dengan memuat: 1) kegiatan; 2) periode waktu; 3) tanggung jawab para pemangku kepentingan termasuk OPD; 4) kontribusi yang ditanggung penerima manfaat (mis. modal tunai, waktu, tenaga kerja); 5) risiko terkait kegiatan ekonomi yang ditanggung penerima manfaat, dan; 6) kerangka pemantauan dengan anggaran yang memadai.	
2. Penyeleksian Penerima Manfaat	
Langkah 2-1: Penentuan Kriteria Seleksi Penerima Manfaat	-
Kriteria seleksi didiskusikan dengan masyarakat, jika memungkinkan.	
Kriteria dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan data yang terukur.	
Langkah 2-2: Seleksi Penerima Manfaat	-
Informasi terkait seleksi penerima manfaat diumumkan kepada masyarakat.	
Formulir pendaftaran untuk mengevaluasi calon penerima manfaat berdasarkan kriteria seleksi telah disiapkan.	
Penyediaan dukungan bantuan bagi calon penerima manfaat yang kesulitan/ tidak dapat mengisi formulir pendaftaran secara mandiri.	
Seleksi penerima manfaat dilakukan berdasarkan kriteria dan hasil seleksi diinformasikan kepada masyarakat.	

Langkah/Hal Pokok	Cek
3. Pelaksanaan Kegiatan	
Langkah 3-1: Pertemuan Orientasi	-
Tanggal dan pertemuan ditentukan dengan mempertimbangkan waktu luang penerima manfaat.	
Langkah 3-2: Pengadaan	-
Konfirmasi spesifikasi peralatan/material/ fasilitas dengan masyarakat/ penerima manfaat	
Pengadaan peralatan/material/ fasilitas sesuai dengan peraturan pemerintah	
Surat perjanjian/MoU terkait pemanfaatan dan perawatan peralatan dengan baik yang disepakati penerima manfaat, jika terdapat bantuan peralatan bagi penerima manfaat.	
Langkah 3-3: Pelatihan	-
Jadwal pelatihan ditentukan dengan mempertimbangkan waktu luang penerima manfaat.	
Pengumpulan informasi terkait skema/program yang ada untuk disinergikan dengan pelatihan.	
Langkah 3-4: Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya	-
Kegiatan dapat menjadi solusi terhadap isu/kendala yang ada.	
Penerima manfaat paham akan pentingnya kegiatan tsb.	
4. Pemantauan dan Evaluasi	
Langkah 4-1: Pemantauan	-
Di awal kegiatan, OPD menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi dan disepakati oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan antara lain gender, usia, disabilitas dan faktor sosial lainnya sesuai kebutuhan.	
Langkah 4-2: Evaluasi	-
Capaian kegiatan dievaluasi berdasarkan indikator tertentu.	
Diskusi mengenai kendala yang dihadapi dan pembelajaran saat melaksanakan kegiatan	

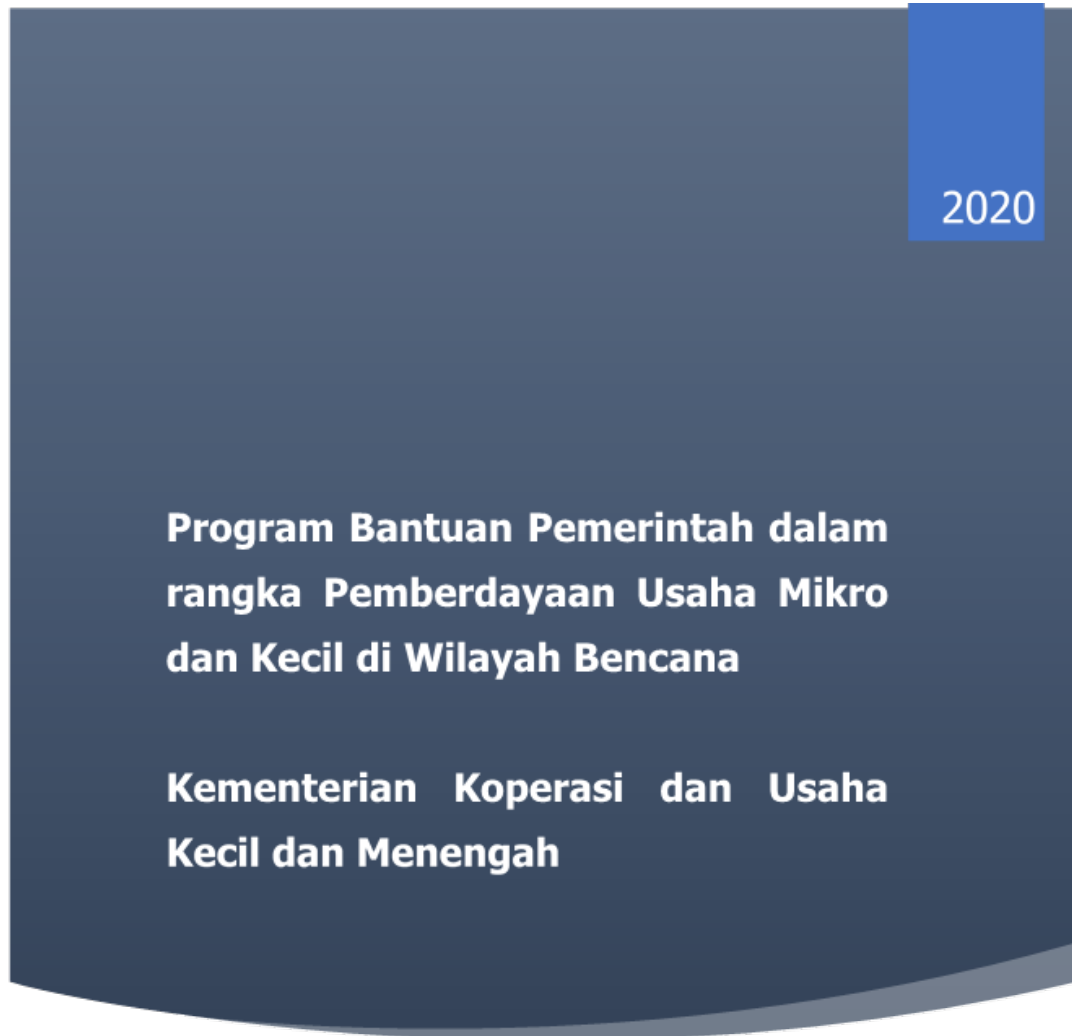
(2) Lembar pengecekan bagi Pengawas Program/Pelaksana Monitoring

Langkah/ Hal Pokok	Cek
1. Perencanaan Kegiatan	
Langkah 1-1: Kajian awal rancangan rencana kegiatan dan pemangku kepentingan	-
Pra-seleksi isi kegiatan dan lokasi sasaran berdasarkan kriteria yang jelas.	
Pra-seleksi isi kegiatan berdasarkan data informasi yang tersedia mengenai gender, usia, disabilitas dan faktor sosial lainnya.	
Konfirmasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Induk/ Rencana Aksi.	
Kajian awal rancangan rencana kegiatan dibahas pada rapat koordinasi.	
Langkah 1-2: Konsultasi masyarakat untuk memformulasikan rancangan rencana kegiatan	-
Mengumpulkan informasi yang ada mengenai situasi umum masyarakat sasaran dan hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan dari internal dinas penanggung jawab dan OPD terkait lainnya.	
Tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun/RT, kepala RW, koordinator shelter/ huntara serta anggota masyarakat lainnya berpartisipasi dalam pertemuan yang membahas situasi terkini dari para korban dan penyintas serta kebutuhan masyarakat sasaran.	
Garis besar usulan kegiatan dan isi kegiatan dijelaskan kepada masyarakat/ penerima manfaat. Konsistensi dan kelayakan isi kegiatan terhadap kebutuhan dan konteks masyarakat setempat didiskusikan dengan penerima manfaat.	
Rancangan rencana kegiatan dan prosedur pelaksanaannya disusun dengan memuat: 1) kegiatan; 2) periode pelaksanaan; 3) tanggung jawab para pemangku kepentingan termasuk OPD; 4) kontribusi yang ditanggung penerima manfaat (mis. modal tunai, waktu, tenaga kerja); 5) risiko terkait kegiatan ekonomi yang ditanggung penerima manfaat, dan; 6) kerangka pemantauan dengan anggaran yang memadai.	
2. Penyeleksian Penerima Manfaat	
Langkah 2-1: Penentuan Kriteria Seleksi Penerima Manfaat	-
Kriteria seleksi penerima manfaat disusun oleh OPD yang bertanggung jawab.	
Draf kriteria seleksi didiskusikan dengan masyarakat, jika memungkinkan.	
Kriteria ditentukan berdasarkan informasi yang terkumpul dan data yang terukur.	
Langkah 2-2: Seleksi Penerima Manfaat	-
Seleksi penerima manfaat dilakukan berdasarkan kriteria seleksi.	
Menginformasikan hasil seleksi dan mekanisme pengaduan kepada masyarakat.	

Langkah/ Hal Pokok	Cek
3. Pelaksanaan Kegiatan	
Langkah 3-1: Pertemuan Orientasi	-
Agenda pertemuan orientasi mencakup penjelasan mengenai: 1) kegiatan; 2) periode pelaksanaan; 3) tanggung jawab para pemangku kepentingan, termasuk OPD/dinas; 4) kontribusi yang ditanggung penerima manfaat (mis. modal/uang tunai, waktu, tenaga kerja; 5) risiko yang ditanggung penerima manfaat serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penerima manfaat.	
Kesediaan untuk berpartisipasi dikonfirmasi dan didokumentasikan melalui surat pernyataan secara tertulis.	
Langkah 3-2: Pengadaan	-
Surat perjanjian/MoU terkait pemanfaatan dan perawatan peralatan dengan baik yang disepakati penerima manfaat, jika terdapat bantuan peralatan bagi penerima manfaat.	
Pengadaan peralatan/material/fasilitas sesuai dengan peraturan pemerintah.	
Langkah 3-3: Pelatihan	-
Pelatihan diselenggarakan sesuai rancangan rencana, seperti isi, periode pelatihan, jumlah peserta, dsb.	
Langkah 3-4: Kegiatan pengembangan kapasitas lainnya	-
Kegiatan dapat menjadi solusi terhadap isu/kendala yang ada.	
Tingkat sasaran/capaian dari kegiatan pengembangan kapasitas ditentukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat.	
4. Pemantauan dan Evaluasi	
Langkah 4-1: Pemantauan	-
Kerangka pemantauan dan evaluasi disiapkan.	
Data dikumpulkan berdasarkan lembar pemantauan, kendala yang dihadapi penerima manfaat dicatat secara berkala sesuai dengan kerangka pemantauan.	
Data pemantauan yang dikumpulkan memuat informasi terkait gender, usia, disabilitas dan faktor sosial lainnya yang sesuai.	
Data yang dikumpulkan dan tindakan/fasilitasi yang dilakukan dikompilasi dalam format sederhana dan dipresentasikan pada rapat koordinasi.	
Langkah 4-2: Evaluasi	-
Data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi dikumpulkan melalui survei dan wawancara kelompok, kemudian dikompilasi, sehingga dapat dibandingkan dengan indikator evaluasi.	
Data evaluasi yang dikumpulkan memuat informasi terkait gender, usia, disabilitas dan faktor sosial lainnya yang sesuai.	
Rapat evaluasi diselenggarakan bersama para pemangku kepentingan utama kegiatan	
Hasil rapat evaluasi dicatat dan dipresentasikan pada rapat koordinasi.	

4. Contoh SOP-*Standard Operating Procedure*

Contoh SOP Program Bantuan Pemerintah dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Bencana tingkat Kota/Kabupaten



DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN XXXXX

Daftar Isi

- 1. Kriteria dan Tahapan Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah**
 - 1.1 Kriteria Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah
 - 1.2 Tahapan Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah
- 2. Seleksi Calon Penerima Bantuan Pemerintah**
 - 2.1 Survei Lapangan dan Wawancara
 - 2.2 Penentuan Calon Penerima Bantuan Pemerintah
 - 2.3 Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah
- 3. Persiapan Dokumen oleh Calon Penerima Bantuan Pemerintah**
 - 3.1 Pengisian Dokumen oleh Calon Penerima Bantuan Pemerintah
 - 3.2 Pengajuan Usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah
 - 3.3 Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah
 - 3.4 Penyampaian Penerima Bantuan Pemerintah
- 4. Sosialisasi kepada Penerima Bantuan Pemerintah**
 - 4.1 Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Program Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 5. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah**
 - 5.1 Konfirmasi Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah
 - 5.2 Pengecekan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah
- 6. Monitoring dan Fasilitasi**
 - 6.1 Kerangka dan Pelaksanaan Monitoring
 - 6.2 Pelaporan Hasil Monitoring kepada Kementerian KUKM
 - 6.3 Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Pemerintah oleh K/L
 - 6.4 Pendampingan kepada Penerima Bantuan Pemerintah
 - 6.5 Penyalahgunaan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah
- 7. Evaluasi Program Bantuan Pemerintah**
 - 7.1 Kerangka dan Pelaksanaan Evaluasi Program Bantuan Pemerintah
 - 7.2 Pembuatan Laporan Evaluasi Program Bantuan Pemerintah
 - 7.3 Pelaporan Hasil Evaluasi Program Bantuan Pemerintah

1. Kriteria dan Tahapan Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah

1.1 Kriteria Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX menetapkan kriteria seleksi penerima Bantuan Pemerintah tahun 2020 sebagai berikut:

Kriteria di Petunjuk Pelaksanaan
- UMK yang usahanya terdampak bencana - Memiliki legalitas usaha berupa IUMK melalui OSS - Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama penerima Bantuan Pemerintah - UMK memiliki komitmen untuk melaporkan keberlangsungan kegiatan usahanya (aset dan omset) pada setiap semester selama 2 tahun - UMK calon Penerima Bantuan Pemerintah tidak sedang/pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan LPDB-KUMKM - UMK Penerima Bantuan Pemerintah Memberikan Kelengkapan Administrasi (Profil Usaha, Surat Pernyataan, BAP, dsb.) - UMK Penerima Bantuan Pemerintah wajib melaporkan rincian penggunaan Dana; yaitu untuk Modal Kerja dan/atau Modal Investasi
Kriteria ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX
- UMK yang terbentuk sebelum bencana dan usahanya telah berjalan kembali pascabencana hingga sekarang (minimal 3 bulan. Alih usaha diperbolehkan) *diverifikasi melalui survei lapangan - Berdomisili dan berusaha di wilayah Kabupaten XXXXX - Berumur minimum 17 tahun (sudah mempunyai KTP) - Diprioritaskan UMK yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan - Memprioritaskan UMK yang belum pernah/belum banyak menerima bantuan.

1.2 Tahapan Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX menyeleksi UMK calon Penerima Bantuan Pemerintah mengikuti tahapan seleksi sebagai berikut:

Tahapan Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah
- Menentukan lokasi survei lapangan yang terdampak berat akibat bencana - Data/informasi UMK yang berada di lokasi tersebut diverifikasi/didiskusikan untuk menentukan calon penerima yang akan diobservasi di lapangan - Melaksanakan survei lapangan untuk observasi UMK tersebut

2. Seleksi Calon Penerima Bantuan Pemerintah

2.1 Survei Lapangan dan Wawancara

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX melaksanakan survei lapangan dan wawancara secara langsung menggunakan kuesioner yang telah disiapkan dengan tujuan memperoleh informasi rinci kondisi sebenarnya dari calon Penerima Bantuan Pemerintah.

Dalam wawancara kepada calon Penerima Bantuan Pemerintah ini, pengalaman usaha dan komitmen terhadap melanjutkan usaha perlu dikonfirmasi.

Hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX sebagai berikut:

Situasi usaha sebelum mendapatkan bantuan (kondisi sekarang)	• Nilai aset • Omset per bulan/tahun • Volume produksi per bulan atau per hari • Jumlah karyawan (jika ada) • Bantuan yang diterima sebelum dan pasca bencana • Hambatan dalam menjalankan usaha
Dampak bencana	• Dampak bencana terhadap usaha ▫ Kerusakan/ kehilangan alat ▫ Kerusakan/ kehilangan tempat usaha ▫ Kehilangan modal usaha, dll.
Rencana pemanfaatan dana bantuan	• Rencana pemanfaatan dana bantuan ▫ Jenis barang yang akan dibeli beserta perkiraan harga ▫ Jadwal pembelian

2.2 Penentuan Calon Penerima Bantuan Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX memverifikasi data hasil survei lapangan dan wawancara, dan menentukan calon Penerima Bantuan Pemerintah yang tepat melalui diskusi internal Dinas. Kemudian penetapan tersebut diinformasikan kepada Kantor Desa/ Kelurahan.

2.3 Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah

Hasil seleksi ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX.

3. Persiapan Dokumen oleh Calon Penerima Bantuan Pemerintah

3.1 Pengisian Dokumen oleh Calon Penerima Bantuan Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX menyiapkan dokumen yang perlu diisi oleh Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan mengundang semua Calon Penerima Bantuan Pemerintah ke Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX untuk mengisi dokumen tersebut.

Dokumen yang perlu dilengkapi oleh UMK Penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1. Surat permohonan pencairan dana Bantuan Pemerintah (Contoh 2)
2. Berita acara pencairan dana Bantuan Pemerintah (Contoh 3)
3. Surat pernyataan bertanggung jawab (Contoh 4)
4. Tanda terima uang Bantuan Pemerintah (Contoh 5)
5. Profil usaha (Contoh 6)

Dokumen berikut juga perlu dikumpulkan:

- Fotokopi rekening bank nasional yang masih aktif atas nama UMK penerima Bantuan Pemerintah
- Fotokopi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan/atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kantor Desa/ Kelurahan.

3.2 Pengajuan Usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX mengajukan usulan UMK Penerima Bantuan Pemerintah kepada PPK Deputy dengan tembusan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi serta melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat keputusan kepala Perangkat Daerah (Contoh 1);
2. Surat permohonan pencairan dana Bantuan Pemerintah (Contoh 2)

3. Berita acara pencairan dana Bantuan Pemerintah (Contoh 3)
4. Surat pernyataan bertanggung jawab (Contoh 4)
5. Tanda terima uang Bantuan Pemerintah (Contoh 5)
6. Fotokopi rekening bank nasional yang masih aktif atas nama calon penerima Bantuan Pemerintah
7. Profil usaha (Contoh 6)
8. Fotokopi Izin Usaha Mikro dan kecil (IUMK) dan/atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kantor Desa/ Kelurahan

3.3 Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Setelah kelengkapan dokumen diperiksa oleh asisten Deputi Perlindungan Usaha, usulan tersebut diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan PPK Deputi dan disahkan oleh KPA. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX mengonfirmasikan Surat Keputusan PPK Deputi paling sedikit memuat nama, alamat, nilai Bantuan Pemerintah, dan nomor rekening bank atas nama Penerima Bantuan Pemerintah.

3.4 Penyampaian Penerima Bantuan Pemerintah

Hasil seleksi disampaikan kepada Penerima Bantuan Pemerintah serta diinformasikan pula kepada kantor desa melalui SK Dinas Koperasi UMKM Kabupaten XXXXX.

4. Sosialisasi kepada Penerima Bantuan Pemerintah

4.1 Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Program Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX mendukung Kementerian KUKM untuk melaksanakan sosialisasi kepada Penerima Bantuan Pemerintah, dan memfasilitasi Penerima Bantuan Pemerintah untuk mengisi dokumen yang akan dipersiapkan oleh Kementerian KUKM pada sosialisasi.

5. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

5.1 Konfirmasi Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah

Setelah mendapatkan konfirmasi dari Kementerian KUKM atas pencairan dana ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX mengundang UMK Penerima Bantuan Pemerintah untuk menginformasikan dan memberikan arahan tentang pencairan, pemanfaatan, dan mekanisme pelaporan pemanfaatan (melampirkan kuitansi/nota pembelian) dana Bantuan Pemerintah.

5.2 Pengecekan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencairan dana tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX mengundang Penerima ke Kantor Dinas dengan membawa fotocopy kuitansi/nota belanja dan foto barang.

6. Monitoring dan Fasilitasi

6.1 Kerangka dan Pelaksanaan Monitoring

Monitoring berkala dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi perkembangan usaha khususnya data terkait indikator monitoring, menemukan isu yang muncul dalam pelaksanaan program, memberikan bimbingan / dukungan yang diperlukan kepada Penerima Bantuan Pemerintah, dan mengambil tindakan yang diperlukan

untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama dua tahun.

Formulir monitoring diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah untuk diisi dan dilengkapi setiap bulannya. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX berkunjung setiap 3 bulan untuk mengumpulkan formulir monitoring, mengecek pemanfaatan dana dan situasi usaha di lapangan.

Kerangka monitoring Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX sebagai berikut:

Struktur Pelaksana	<u>Koordinator:</u> Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan <u>Peninjau lapangan:</u> Staf Dinas Koperasi dan UMKM
Indikator Monitoring	▫ Nilai aset ▫ Omset per bulan ▫ Jumlah karyawan (jika ada) ▫ Kendala dalam menjalankan usaha
Jadwal Pelaksanaan	Setiap tiga bulan sekali selama dua tahun
Alokasi anggaran	– Biaya transportasi bagi peninjau lapangan – Biaya pencetakan/fotocopy lembar monitoring

6.2 Pelaporan Hasil Monitoring kepada Kementerian KUKM

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX melaporkan perkembangan pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada Deputy dengan tembusan provinsi sebanyak 1 (satu) kali setiap semester selama 2 (dua) tahun menggunakan format laporan yang telah disiapkan oleh Kementerian KUKM.

6.3 Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Pemerintah oleh K/L

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX mendukung dan memfasilitasi kegiatan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan program Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian KUKM dan instansi terkait lainnya.

6.4 Pendampingan kepada Penerima Bantuan Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX memberikan pendampingan dan pembinaan kepada penerima bantuan selama 2 (dua) tahun.

6.5 Penyalahgunaan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Jika pada saat monitoring ditemukan penyalahgunaan dana Bantuan Pemerintah, maka penerima Bantuan Pemerintah akan mendapat sanksi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX berupa:

- Dimasukkan ke dalam daftar hitam Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX, sehingga UMK tersebut tidak akan mendapat bantuan apapun dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX.

7. Evaluasi Program Bantuan Program

7.1 Kerangka dan Pelaksanaan Evaluasi Program Bantuan Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX melaksanakan evaluasi program untuk mengetahui dan menganalisis capaian tujuan program sebagai pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX

dengan cara berkunjung ke lokasi usaha UMK penerima Bantuan Pemerintah untuk mengumpulkan umpan balik dan komentar dari UMK penerima Bantuan Pemerintah (format evaluasi tambahan; lampiran 1 dalam SOP).

Kerangka evaluasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX sebagai berikut:

Struktur Pelaksana	<u>Koordinator:</u> Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan <u>Peninjau lapangan:</u> Staf Dinas Koperasi dan UMKM
Indikator Evaluasi	▫ Umpan balik & komentar ▪ Perubahan perkembangan usaha setelah memperoleh dana Bantuan Pemerintah ▪ Tantangan dan kendala yang dihadapi selama dua tahun masa program ▪ Masalah spesifik di periode pasca bencana ▪ Saran kepada Dinas dan program
Jadwal Pelaksanaan	Akhir program (pada periode monitoring terakhir)
Alokasi anggaran	– Biaya transportasi bagi peninjau lapangan – Biaya pencetakan/fotocopy lembar evaluasi tambahan

7.2 Pembuatan Laporan Evaluasi Program Bantuan Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX membuat laporan evaluasi berdasarkan informasi terkumpul dari Penerima Bantuan Pemerintah serta pembelajaran diperoleh selama pelaksanaan program.

7.3 Pelaporan Hasil Evaluasi Program Bantuan Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten XXXXX memaparkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Pemerintah dalam:

- Rapat Koordinasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah
- Rapat Koordinasi UMKM Kabupaten XXXXX

Untuk berbagi hasil evaluasi dan diskusi pencapaian/pembelajaran diperoleh/temuan lain yang diidentifikasi selama pelaksanaan program.

Lampiran

Format Evaluasi Tambahan:

Umpan Balik dan Komentar dari Penerima Bantuan Pemerintah

		Tanggal:	
Nama Penerima:			
Nama Petugas Dinas:			
Umpan balik dari Penerima:			
1) Perubahan perkembangan usaha setelah memperoleh dana Bantuan Pemerintah			
2) Tantangan dan kendala yang dihadapi selama dua tahun pelaksanaan program			
3) Masalah spesifik di periode pascabencana			
4) Saran kepada Dinas Koperasi dan UMKM dan Program Bantuan Pemerintah			

5. Contoh Program Kegiatan – Studi Kasus

(1) Habitat for Humanity Indonesia (HFHI)

Nama Proyek	Indonesia Central Sulawesi Disaster Response Project			
Lembaga Pelaksana	Habitat for Humanity Indonesia (HFHI)			
Mitra Kerja dari Pemerintah Indonesia	1. Kementerian Sosial 2. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 3. Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota - Dinas Pendidikan - Tim Ahli Bangunan & Gedung Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan) - Dinas Sosial - BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Sigi dan Donggala 4. Pihak Kantor Kecamatan, Desa, RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga)			
Lembaga Pendukung	Pos Masyarakat Penanggulangan Bencana (PMPB)			
Sektor Proyek	▪ Konstruksi dan Jasa			
Kegiatan Proyek	▪ Distribusi <i>Emergency Kit</i> ▪ Penyediaan huntara dan huntap		▪ Pelatihan PASSA dan CBDRM ▪ Penyediaan Tenaga Kerja	
Jenis Proyek	▪ Bantuan tunai dan padat karya ▪ Pemberdayaan masyarakat ▪ Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ▪ Dukungan bagi kelompok rentan (inklusi sosial)			
Lokasi Proyek	1. Palu (1 kecamatan, 1 kelurahan) 2. Sigi (2 kecamatan, 11 desa) 3. Donggala (1 kecamatan, 1 desa)	Periode Pelaksanaan	Bulan mulai: September/2018 Bulan selesai: Desember/2020	
Anggaran Proyek (Rp)	20-40 miliar	Sumber Pendanaan	Mitra perusahaan dan individu	
Garis besar Proyek				
1. Latar Belakang Gempa Bumi, Likuefaksi dan Tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 memberikan dampak yang sangat besar. Lebih dari 2.000 orang yang meninggal dunia, lebih dari 1.300 orang yang hilang dan juga ratusan ribu rumah rusak berat, sedang dan ringan. HFHI Indonesia yang merupakan lembaga kemanusiaan yang memiliki fokus untuk menyediakan rumah yang layak termasuk di wilayah bencana bergerak melakukan program tanggap bencana di Sulawesi Tengah. Sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan fisik seperti penyediaan rumah, fasilitas sanitasi dan air bersih tetapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mereka dapat membangun kehidupan mereka lebih baik serta mengurangi risiko bencana kedepannya.				
2. Tujuan Masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah dapat membangun kembali hidup mereka lebih baik dan memiliki kapasitas untuk mengurangi risiko bencana				
3. Indikator Sasaran 4.000 keluarga di Sulawesi Tengah mendapatkan akses hunian yang layak, fasilitas air dan sanitasi, perlengkapan pertukangan, perlengkapan alat kebersihan dan kesehatan, serta pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana				
Target Penerima Bantuan	▪ Individu: 16.000 (10.000 laki-laki; 6.000 perempuan) ▪ Rumah Tangga: 4.000 KK	Inklusivitas Kelompok Rentan	▪ Penyandang Disabilitas ▪ Kaum Perempuan ▪ Anak-anak ▪ Kaum muda ▪ Lansia	

Rincian Kegiatan / Bantuan Proyek
1. Distribusi <i>Emergency Shelter Kits</i>, <i>Hygiene Kits</i>, dan <i>Community Debris Removal</i> Peran pemerintah desa adalah menyediakan data rumah terdampak bencana, melakukan verifikasi lapangan dan menyalurkan bantuan bersama Tim HFHI. 2. Penyediaan huntera (hunian sementara) Penyediaan huntera sebanyak 1.039 unit ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun yang dibangun pada lahan pribadi penerima manfaat. HFHI menyediakan bahan bangunan dan mempekerjakan tenaga kerja/tukang lokal untuk pembangunan. Rangkaian kegiatan sebagai berikut: ▪ Melakukan sosialisasi di kantor desa dan membentuk Komite Lokal sebagai fasilitator ▪ Setelah menerima berkas pendaftaran dari warga desa, Tim Komite Lokal melakukan verifikasi lapangan untuk finalisasi penerima bantuan bersama pemerintah desa ▪ Melakukan Uji Publik dengan menempelkan data-data penerima manfaat pada media papan pengumuman di kantor desa dan beberapa lokasi strategis (warung, masjid, balai pertemuan, dll) ▪ Masa sanggah selama satu minggu memberikan kesempatan kepada warga yang tidak setuju untuk memberikan laporan kepada HFHI ▪ Penandatanganan MoU yang menerangkan aturan-aturan dan kewajiban bagi penerima manfaat ▪ HFHI menyediakan bahan bangunan dan penerima bantuan menyediakan pekerja konstruksi ▪ Proses pembangunan diawasi oleh Tim Konstruksi HFHI 3. Penyediaan huntap (hunian tetap) Menggunakan prosedur pelaksanaan yang sama dengan program pembangunan HUNTARA. HFHI menyediakan 181 unit hunian tetap untuk warga yang memenuhi persyaratan berikut: (1) Warga korban bencana; (2) Warga desa Lolu dengan bukti KTP; (3) Rumah rusak berat/hancur; (4) Status menikah; (5) Miskin; (6) Kelompok rentan (janda/lansia/jumlah anggota keluarga yang banyak) 4. Penyediaan Fasilitas Air Bersih & Sanitasi yang Layak HFHI melakukan kegiatan dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal 5. Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (Pelatihan PASSA dan CBDRM) Trainer dari HFHI melakukan pelatihan PASSA (Participatory Approach for Safe Shelter Awareness), dari BPBD Kab. Donggala dan Dinas Kebakaran Kab. Donggala melakukan pelatihan CBDRM (Community Based Disaster Risk Management) kepada perwakilan warga yang terdiri atas; karang taruna, lansia, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum perempuan, pemerintah desa, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), kepala dusun, dan penyandang disabilitas 6. Pelatihan Konstruksi dan Rumah Sehat & Aman HFHI melakukan pelatihan dalam dua sesi pertemuan selama 2 hari (hari pertama; teori dan hari kedua: praktik) yang mengacu pada pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI). Peserta pelatihan adalah penerima bantuan huntap.
Praktik dan Kebijakan Proyek
1. Memperkuat gotong royong ▪ Ada proses dilakukan seperti sosialisasi, membuat kesepakatan dan aturan main, pemilihan komite lokal yang turut memfasilitasi pengorganisasian masyarakat, gotong royong pembangunan huntera/huntap, evaluasi dan monitoring proyek, dan lain-lain. ▪ Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas seperti pelatihan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pengurangan resiko bencana, dan konstruksi rumah yang layak dan aman menciptakan interaksi masyarakat dan juga fasilitator, bahkan dari berbagai komunitas masyarakat. ▪ Keterlibatan pemerintah khususnya level desa dan kecamatan setidaknya memberikan ruang interaksi dengan masyarakat dan gotong royong. Pemerintah dan masyarakat juga dilibatkan dalam pertemuan untuk mendiskusikan perkembangan proyek, membahas tantangan yang ada, dan bersama-sama menyepakati jalan keluar untuk masalah atau tantangan yang dihadapi. 2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas ▪ Dalam sosialisasi dan pertemuan awal dibicarakan dan disepakati kriteria penerima manfaat, misalnya: yang terkena dampak bencana, lokasi hunian yang dibangun bukan zona merah, dan belum/tidak sedang menerima bantuan yang sama dari pemerintah atau institusi/organisasi yang lain. ▪ Ada uji publik yang mana nama calon penerima manfaat diumumkan, dan ada masa sanggah. ▪ Penerima manfaat mengetahui kuantitas dan kualitas material yang diberikan untuk membangun rumah, serta mereka bertanggung jawab juga untuk memastikan material yang mereka terima dari supplier sesuai dengan yang disepakati.

3. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan dan rekonstruksi yang berkelanjutan

- Desain rumah, lokasi rumah, dan fasilitas air dan sanitasi didiskusikan bersama masyarakat. Termasuk juga untuk suplai material lokal dan tukang lokal melibatkan masyarakat dan pemerintah lokal.
- Ada aturan main, termasuk keterlibatan penerima bantuan saat pelaksanaan program, misalnya saat pembangunan huntera/huntap mereka bertanggung jawab untuk pendistribusian material, monitoring pekerjaan pembangunan, dan membantu kegiatan konstruksi, dll.
- Mengutamakan material lokal dan tukang lokal khususnya untuk material alam yang dibutuhkan; melibatkan organisasi lokal misalnya di Lombonga ada Pos Masyarakat Penanggulangan Bencana (PMPB) dalam merencanakan, menjalankan, dan melakukan movev program.

4. Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi pada setiap tahap pemulihan dan rekonstruksi pascabencana

- Mempertimbangkan kebutuhan keluarga ketika memprioritaskan bantuan hunian dan ini didiskusikan di antara masyarakat dan tokoh setempat.

5. Inklusif

- Komite lokal dan juga keanggotaan PMPB mempertimbangkan kaum rentan (penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan lain-lain). Juga penerima manfaat memprioritaskan kaum rentan seperti janda, usia lanjut, keluarga yang memiliki bayi/anak, dll.
- Desain hunian dan fasilitas lain dengan mempertimbangkan kaum rentan.
- Keseimbangan gender pada keanggotaan komite lokal, peserta training, dan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.
- Ikut menginisiasi dan melakukan kegiatan “Perempuan Sebagai Pelopor Rekonstruksi” dengan memberikan pelatihan konstruksi rumah yang layak dan aman bagi ibu-ibu atau perempuan.

Pencapaian Aktual dan Efek Positif Tidak Terduga

- Pelatihan PRBBK membuat warga desa sadar akan bahaya di lingkungannya sehingga mereka dapat secara aktif mencari solusi untuk meminimalisir dan mencegah bahaya tersebut.
- Pelatihan konstruksi, misalnya keterampilan baja ringan. Pada awalnya, hanya sedikit tukang yang menguasai pekerjaan baja ringan. Namun saat ini sudah banyak tukang di Sigi dan Lombonga yang menguasai pekerjaan baja ringan.

Pengalaman dan Pembelajaran untuk Proyek Rekonstruksi di Masa Depan

- Penanggulangan Bencana dan Pembangunan: Dalam teori Manajemen Penanggulangan Bencana, siklus tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dari tanggap bencana akan disusul dengan tahap pembangunan (development). Rehabilitasi dan rekonstruksi akan menuntun dan menjadi peluang pada pembangunan. Namun dalam praktik, rekonstruksi dapat menjadi hambatan bagi pembangunan. Itu semua tergantung bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan.
- Tanggap Darurat dan Alih Teknologi serta Keterampilan: Tanggap darurat pada umumnya harus dilakukan dengan cepat. Semakin cepat semakin berdaya guna dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh bencana. Seberapa cepat prosesnya sering ditentukan oleh kepentingan donor, misalnya mengejar akhir tahun anggaran, demi reputasi Lembaga bantuan kemanusiaan di hadapan donornya, dsb, Akibatnya, demi kecepatan sering melalaikan proses. Agar bisa cepat, didatangkanlah tenaga-tenaga yang dianggap ahli atau pihak mampu melakukan pemberian bantuan seperti kontraktor.
- Huntara berfokus pada kepentingan terbaik keluarga: Pembangunan Huntara yang dilakukan YHKI jauh berbeda dengan konsep hunian sementara pada umumnya. Huntara YHKI menempatkan keluarga yang akan menghuni sebagai subjek terpenting dan fokus utama bagi di buatnya hunian untuk mereka. Mereka ditempatkan di tengah, bukan di pinggiran atau malah dikesampingkan dalam proses pembangunannya. Pilihan membangun Huntara di lahan atau kapling milik mereka sendiri adalah manifestasi penempatan mereka di tengah proses. Para penerima Huntara dilibatkan dari awal proses hingga akhir pelaksanaan peembangunannya. Hasilnya adalah kualitas hunian yang baik, rasa kepemilikan yang tinggi, terangkatnya martabat penerima hunian. Penerima hunian sementara, menganggapnya sebagai hunian tetap dan yang terutama, cara pemberian hunian sementara itu, dapat mengangkat martabat (dignity) masyarakat yang terpuruk, dan membangkitkan semangat untuk membangun hidup mereka
- Tanggap Darurat Pemberdayaan Ekonomi: Kegiatan tanggap darurat jarang mendorong komunitas penyintas. Efek ransangan ekonomi program tanggap darurat adalah pengeluaran sumber daya sebagai biaya yang tidak menghasilkan insentif bagi geliat ekonomi lokal. Pemanfaat rangsangan ekonomi dari program tanggap darurat pada umumnya adalah pemasok bahan bantuan, operator transportasi (udara, darat dan laut), kontraktor dan badan usahanya.

Tantangan		
▪ Pasokan material yang terbatas karena adanya program serupa dari LSM lain dan pemerintah khususnya untuk hunian. ▪ Jumlah tukang lokal yang terbatas khususnya pada tahap awal. ▪ Kondisi sekarang, banyak tukang yang menetapkan tarif tinggi karena banyaknya kebutuhan termasuk juga standar upah dari Program Huntap Pemerintah.		
Perhatian penting dalam pelaksanaan kegiatan dukungan		
▪ Partisipasi masyarakat, khususnya pimpinan desa setempat sangat mendukung jalannya program. ▪ Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengutamaan pemasokan material dari <i>supplier</i> lokal dan juga tukang lokal ▪ Koordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah khususnya BPBD, Dinas Sosial dan juga dengan LSM lainnya. ▪ Keharusan untuk mempertimbangkan keberlanjutan program tidak hanya sebatas pemberian bantuan (<i>provider</i>) tetapi agar masyarakat dapat memperoleh kapasitas untuk membangun kehidupannya lebih baik (<i>enabler</i>).		
Foto Kegiatan		
		
Pembangunan Hunian Tetap	Pembangunan Hunian Tetap	Unit Hunian Sementara
Situs/tautan yang bermanfaat untuk informasi lebih lanjut		
www.habitatindonesia.org Instagram : @habitat_id		

(2) Yayasan Panorama Alam Lestari (YPAL) Poso

Nama Proyek	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pengurangan risiko bencana di Sulawesi Tengah				
Lembaga Pelaksana	Yayasan Panorama Alam Lestari (YPAL) Poso				
Mitra Kerja dari Pemerintah Indonesia	1. Pemerintah Desa 2. Posyandu Desa 3. BPBD Kab. Donggala & Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) Kab. Sigi				
Lembaga Pendukung	Yayasan IDEP Selaras Alam (Bali)				
Sektor Proyek	Pertanian dan Kehutanan				
Kegiatan Proyek	▪ Pelatihan Permakultur ▪ Pemberian Alat Pertanian ▪ Pelatihan Pengolahan Produk Pasca-panen		▪ Pemetaan Partisipatif ▪ Pelatihan Agroforestry ▪ Pembagian Bibit Buah sebanyak 3500 pohon		
Jenis Proyek	1. Pertanian ▪ Pemberdayaan Masyarakat ▪ Kesenjangan Gender ▪ Pemberdayaan Perempuan ▪ Bantuan Non-tunai		2. Kehutanan ▪ Pemberdayaan Masyarakat ▪ Bantuan Non-tunai		
Lokasi Proyek	1. Sigi (1 kecamatan; 1 desa) 2. Donggala (2 kecamatan; 5 desa)	Periode Pelaksanaan	Bulan mulai: Agustus/2019 Bulan selesai: Agustus/2020		
Anggaran Proyek (Rp)	500,000,000	Sumber Pendanaan	Medico International, Give2Asia dan Caritas Austria		
Garis besar Proyek					
1. Latar Belakang Pasca bencana 28 September 2018 aktivitas perekonomian masyarakat di sektor pertanian cenderung mengalami perubahan dan terdampak signifikan, kekeringan dan tidak beroperasinya bendungan membuat pertanian masyarakat sulit beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk merumuskan kegiatan yang dapat mendukung dan memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat penyintas di Sulawesi Tengah					
2. Tujuan Mengembangkan pertanian alternatif melalui pendekatan tata guna lahan dengan metode Permakultur, serangkaian pelatihan dan penyediaan dukungan peralatan kebun serta pembagian benih yang dapat dibudidayakan dalam skala pertanian di pekarangan rumah					
3. Indikator Sasaran ▪ Masyarakat diharapkan memiliki ketangguhan dan memiliki kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan sehat baik di konsumsi dalam masa darurat hingga di jual pada masa pemulihan; ▪ Praktik tata kelola dan pemanfaatan lahan secara adil dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko ancaman bencana seperti banjir dan tanah longsor					
Target Penerima Bantuan	Rumah tangga: 520 KK	Inklusivitas Kelompok Rentan	Kaum Perempuan		
Rincian Kegiatan / Bantuan Proyek					
1. Pelatihan Permakultur Terdapat 520 penerima manfaat yang merupakan kaum perempuan yang sudah berumah tangga dan terdampak bencana (desa Amal, Salova, Sumari, Taripa & Kumbasa), bertujuan agar kaum perempuan mampu membuat kebun pekarangan secara mandiri. Jenis tanaman yang ditanam antara lain kacang panjang, cabai, tomat, terong, dll. Kegiatan ini difasilitasi oleh IDEP Selaras Alam Bali dan YPAL Poso menggunakan pendekatan kelompok belajar dengan maksimum 25 peserta tiap grup. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang					

kesiapsiagaan dan ketahanan pangan keluarga yang sehat tapi juga sebagai *trauma healing* bagi orang dewasa.

2. Pemberian Alat Pertanian (cangkul, sekop, parang, jaring 40 meter, ember kompos, gembor, sprayer) dan benih sayur organik kepada 520 penerima bantuan
Jenis alat pertanian ditentukan oleh staf lapangan berdasarkan hasil pengamatan kebutuhan warga secara langsung. Penyaluran bantuan dilakukan oleh tim IDEP, YPAL, Vendor dan pemerintah desa di akhir masa pelatihan, setiap keluarga menerima satu paket alat pertanian jika telah membuat kebun pekarangan yang diperiksa langsung oleh staf lapangan.
3. Pelatihan Pengolahan Produk Paska Panen untuk 10 orang Perwakilan dari tiap Desa
Pelatihan ini adalah bentuk tindak lanjut dari pengembangan kebun permakultur untuk memproduksi Virgin Coconut Oil (VCO) dan bumbu kering. Peserta pelatihan adalah 10 orang perwakilan dari tiap desa yang memenuhi kriteria berikut; (1) Tertarik dengan UMK; (2) Hasil panen melimpah; (3) Ketersediaan potensi bahan baku lokal; (4) Komitmen untuk mengembangkan usaha baru.
Keluaran dari kegiatan ini adalah pemasaran produk VCO skala lokal/desa dan peningkatan kapasitas perempuan & bertambahnya pendapatan keluarga.
4. Pemetaan Partisipatif
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat Peta Sketsa Risiko Bencana di tingkat desa, juga menentukan lokasi pemasangan rambu evakuasi dan titik kumpul. Peserta yang terlibat adalah pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelembagaan masyarakat dan KMPB.
5. Pelatihan Agroforestri
Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanaman pohon diantara tanaman palawija atau area potensial bencana longsor dan banjir.
6. Pembagian Bibit Buah sebanyak 3.500 Pohon untuk seluruh Desa Dampingan
Jenis bibit buah yang diserahkan adalah durian, alpukat, kelapa dan mangga. Bibit ini didistribusikan dengan memprioritaskan kelompok dampingan, pihak desa, KMPB dan warga non-penerima bantuan.

Praktik dan Kebijakan Proyek

1. Memperkuat gotong royong

- Pelatihan langsung kepada kelompok perempuan desa yang dilakukan secara bertahap;
- Kegiatan pembentukan kelompok masyarakat penganggulangan bencana (KMPB) yang mengikutsertakan kelompok perempuan sebagai bagian dari regu logistik dan pemenuhan pangan sehat;
- Layanan psikososial dilakukan pada masa tanggap darurat seperti mengundang anak-anak untuk bermain sekaligus memberikan edukasi langsung menggunakan media komik & peralatan tulis-menulis lainnya, sedangkan untuk masa rehab-rekon dilakukan kegiatan pembentukan KMPB dan melatih perempuan dalam pengembangan kebun pangan sehat berbasis keluarga;
- BPBD Kabupaten donggala dan Forum PRB Sigi ikut berperan dalam membantu proses pembentukan KMPB di masing-masing desa;
- Dukungan langsung masing-masing kepala desa dalam pengembangan Kebun Permakultur sebagai system mata pencaharian warganya.

2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas

- Sesuai kesepakatan dalam koordinasi bersama pemerintah desa dan sosialisasi terbuka, Penetapan kriteria dilakukan oleh tim YPAL berbasis data posyandu untuk melihat keluarga yang dikategorikan kekurangan gizi serta menghindari penerima manfaat yang sudah menerima bantuan serupa dari LSM lainnya;
- Seleksi penerima bantuan juga dilakukan dengan mengecek profesi yang sesuai dengan program pendampingan yaitu petani, serta meminta identitas Kartu Keluarga/KTP warga setempat dan membangun komitmen langsung agar bersedia bekerjasama dan mengikuti pendampingan program;
- Data hasil seleksi kemudian di koordinasikan kembali kepada pemerintah desa untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan daftar penerima manfaat yang akan mendapat pendampingan;
- Dilakukan survey langsung ke rumah kandidat untuk mengecek keberadaan dan ketersediaan lahan serta memastikan kesediaan mengikuti pendampingan program;
- Data penerima manfaat di sampaikan kepada LSM/Yayasan lainnya guna menghindari pemberian bantuan serupa kepada orang yang sama, metode yang dilakukan antara lain melalui pertemuan informal atau via grup Whatsapp.

3. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan dan rekonstruksi yang berkelanjutan

- Penerima bantuan dilibatkan dalam menentukan jenis alat pertanian yang dibutuhkan serta mendiskusikan kondisi iklim terkait jenis tanaman yang ingin dibudidayakan berdasarkan praktik kearifan lokal dan budaya

setempat; ▪ Pelatihan pengolahan pasca panen untuk mengantisipasi over produksi hasil panen dan mempelajari sistem pembenihan yang dapat dijual atau disimpan untuk ditanam kembali
4. Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi pada setiap tahap pemulihan dan rekonstruksi pascabencana ▪ Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga yang dibutuhkan adalah bantuan di sektor pertanian pada masa pemulihan, hal ini merupakan salah satu bentuk <i>trauma healing</i> bagi orang dewasa dengan kembalinya aktivitas pertanian maka ekonomi dapat tumbuh secara bertahap tanpa harus alih profesi
5. Inklusif ▪ Dalam perumusan kegiatan tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat kelompok rentan, akan tetapi kegiatan ini dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi baik dan sehat bagi kelompok rentan dalam keluarga inti penerima bantuan; ▪ Kegiatan ini dirancang berbasis keluarga, sehingga apabila penerima bantuan yang terpilih adalah kelompok rentan maka dalam pembuatan kebun dapat dilakukan oleh anggota keluarga lainnya; ▪ Kegiatan ini di fokuskan agar penerima bantuan dapat bekerja bersama, sehingga kesetaraan gender dapat terlaksana dalam pengembangan kebun. Contohnya, suami membantu mencangkul dan mengambil bahan lokal untuk pembuatan kompos organik, sedangkan istri ataupun anak dapat bekerja untuk menanam dan memanen hasil serta memasak untuk kebutuhan makan sehari-hari
Pencapaian Aktual dan Efek Positif Tidak Terduga ▪ Sejauh ini pencapaian yang telah diraih adalah penerima manfaat sudah mulai memanen hasil kebun dan menikmati hasil untuk kebutuhan harian dan memasarkan jika hasil panen melimpah, kisaran pendapatan sekitar Rp.100.000/bulan. Selain itu praktik ini mulai mempengaruhi warga lainnya (non-penerima bantuan) untuk ikut mengembangkan kebun pekarangan; ▪ Untuk masyarakat yang tidak mendapat bantuan YPAL, saat ini hanya dapat di dukung oleh penerima manfaat melalui pemberian benih, pembagian hasil panen saat hajatan pernikahan atau kedukaan dan berbagi pengetahuan tentang pengembangan kebun permakultur
Pengalaman Pembelajaran untuk Proyek Rekonstruksi di Masa Depan
Koordinasi dan pelibatan masyarakat dalam menentukan jenis alat bantuan pertanian agar peralatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
Tantangan ▪ Menyesuaikan waktu masyarakat agar dapat mengikuti pertemuan secara maksimal; ▪ Perubahan kepemimpinan desa yang berdampak pada koordinasi tim di lapangan; ▪ Komitmen penerima manfaat; ▪ Kecemburuan sosial; ▪ Adanya kelangkaan perlengkapan pertanian dari penyedia/vendor
Perhatian penting dalam pelaksanaan kegiatan dukungan ▪ Konsensus diperlukan untuk menjamin komitmen penerima bantuan ▪ Pendataan harus dilakukan secara langsung oleh tim YPAL dengan tetap melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di desa ▪ Memahami dinamika sosial di tingkat desa seperti waktu luang bagi masyarakat untuk pertemuan dan mematuhi adat istiadat setempat
Foto Kegiatan
   Pelatihan Permakultur Kebun Percontohan Panen Pertama
Situs/tautan yang bermanfaat untuk informasi lebih lanjut https://www.voaindonesia.com/a/bertani-di-lahan-pekarangan-bantu-petani-sigi-memenuhi-kebutuhan-rumah-tangga/5220794.html https://www.facebook.com/ypallestari https://ypallestari.wordpress.com/

(3) Yayasan Bumi Tangguh

Nama Proyek	Central Sulawesi Sigi District Resilience Program (CSSDRP)			
Lembaga Pelaksana	Yayasan Bumi Tangguh			
Mitra Kerja dari Pemerintah Indonesia	1. Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah 2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi 3. Dinas Pertanian Up. Badan Penyuluh Pertanian			
Lembaga Pendukung	1. World Renew 2. ZOA			
Sektor Proyek	▪ Usaha Kuliner ▪ Makanan Olahan ▪ Kerajinan Tangan ▪ Tekstil ▪ Pertanian ▪ Peternakan ▪ Otomotif ▪ Jasa ▪ Konstruksi			
Kegiatan Proyek	▪ Penyediaan peralatan untuk mata pencaharian alternatif ▪ Pelatihan pertanian ▪ Pelatihan peternakan ▪ Rekapitalisasi usaha kecil ▪ Cash for Work			
Jenis Proyek	▪ Bantuan Tunai & Padat Karya ▪ Pemberdayaan Masyarakat ▪ Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan ▪ Dukungan Kelompok Rentan (inklusivitas sosial) ▪ Pemulihan Mata Pencaharian bagi UMK ▪ Voucher/Bantuan NonTunai			
Lokasi Proyek	Sigi (1 Kecamatan; 6 Desa)	Periode Pelaksanaan	Tanggal mulai: Mei. 2019 Tanggal selesai: Sep. 2020	
Anggaran Proyek (Rp)	869,200,000	Sumber Pendanaan	1. World Renew 2. ZOA	
Garis Besar Proyek				
1. Latar Belakang Central Sulawesi Sigi District Resilience Program (CSSDRP) adalah program yang dilaksanakan oleh Yayasan Bumi Tangguh pasca bencana gempa dan tsunami di Palu-Sigi-Donggala, Sulawesi Tengah. Namun, locus program hanya berlokasi di Kabupaten Sigi, Kecamatan Dolo Selatan, khususnya pada 6 Desa sasaran yaitu, Desa Jono, Desa Sambo, Desa Wisolo, Desa Balongga, Desa Ramba dan Desa Bangga. Program ini adalah kerjasama antara Yayasan Bumi Tangguh dengan World Renew Canada.				
2. Tujuan Masyarakat yang terkena bencana di Sulawesi Tengah dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik dan memiliki kapasitas untuk mengurangi risiko bencana.				
3. Indikator Sasaran (jika ada) ▪ Penyediaan peralatan untuk mata pencaharian alternatif untuk 198 KK di 6 desa binaan ▪ Pelatihan pertanian untuk 198 KK di 6 desa binaan ▪ Pelatihan peternakan untuk 50 KK di 6 desa binaan ▪ Rekapitalisasi usaha kecil untuk 198 KK di 6 desa binaan ▪ Cash for Work untuk 250 KK di 6 desa binaan				
Target Penerima Manfaat	Kepala Keluarga: 894 KK	Inklusivitas populasi rentan	Penyandang Disabilitas, Kaum Perempuan, Anak-anak, Lansia	
Rincian Kegiatan / Bantuan Proyek				
1. Penyediaan peralatan dan pelatihan untuk mata pencaharian alternatif Kegiatan dalam bentuk pelatihan pengolahan pisang yang diikuti oleh ibu-ibu penjual jajanan olahan pisang, dari 6 desa sasaran program. Jenis olahan pisang yang dilatihkan adalah bolen pisang, pisang strudel, nugget pisang, sale pisang, abon kulit pisang dan brownies pisang. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sambo.				

2. Pelatihan pertanian Kegiatan pertanian yang dilakukan mencakup cara melakukan peremajaan dengan metode Sambung Samping (<i>Side Grafting</i>) dan Sambung Pucuk (<i>Cup on Grafting</i>), pada kegiatan Pelatihan Budidaya Kakao bagi Petani Kakao di Desa Ramba. Kegiatan pelatihan budidaya kakao juga dilakukan secara terpisah pada 6 desa sasaran program. Selain itu terdapat kegiatan pelatihan pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dan Pupuk Organik Padat (Kompos) bagi petani-petani dari 6 desa sasaran program. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Ramba, bekerjasama dengan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dolo Selatan 3. Pelatihan pembuatan pakan ternak dan pemeliharaan ternak Kegiatan pelatihan pembuatan silase untuk pakan ternak ruminansia sebagai input untuk masyarakat yang mata pencahariannya sebagai peternak sapi dan kambing. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Ramba dan diikuti oleh masyarakat peternak sapi dari 6 desa sasaran program. 4. Rekapitalisasi usaha kecil Bantuan modal usaha diberikan kepada usaha dengan tingkatan yang sangat mikro dengan jenis usaha antara lain penjual nasi kuning skala kecil (bukan warung makan), penjual kue dan gorengan dengan jumlah terbatas, penjual sayuran eceran skala kecil, dan usaha serupa dengan tingkatan tersebut. Pemerintah Desa berperan dalam verifikasi dan validasi data UKM hasil dari proses penilaian YBT di lapangan. 5. <i>Cash for Work</i> Salah satu kegiatan <i>Cash for Work</i> (Padat Karya) berupa penyediaan tenaga kerja yang berdomisili di desa terkait untuk pembangunan infrastruktur seperti broncaptering dan penggalian jalur pipa pada pembangunan Waterpoint sebagai sumber air bersih bagi masyarakat di Desa Balongga.
Praktik dan Kebijakan Proyek
1. Memperkuat gotong royong ▪ Kegiatan <i>Cash for Work</i> ▪ Rekapitalisasi Usaha dalam bentuk kelompok, dikarenakan nilai bantuan rekapitalisasi yang cukup besar jika hanya untuk satu individu. Pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan jumlah anggota yang mengolah produk, dan sama sekali tidak diintervensi oleh YBT. ▪ Bantuan usaha produksi berkelompok 2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas ▪ Memasang daftar penerima bantuan di kantor desa dan setiap dusun ▪ Menyiapkan formulir pengaduan dan papan pengumuman program. 3. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan dan rekonstruksi berkelanjutan ▪ Melaksanakan kegiatan, pelatihan, masukan dan fasilitasi pengembangan usaha ▪ Melaksanakan pendampingan dan asistensi ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara simultan 4. Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi pada setiap tahap pemulihan dan rekonstruksi pascabencana ▪ Mengacu pada kondisi masyarakat rentan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan 5. Inklusif ▪ Melibatkan perempuan, anak, masyarakat rentan, kepala keluarga perempuan, dan penyandang disabilitas dalam hal akses lokasi. 6. Lainnya ▪ Menggali potensi sumberdaya lokal, mengedepankan pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam penentuan kegiatan usulan, serta memberikan contoh praktik yang baik.
Pencapaian Aktual dan Efek Positif Tidak Terduga
▪ Meskipun jumlah penerima manfaat terbatas, program mata pencaharian dan ketahanan pangan dapat menjangkau semua masyarakat di desa sasaran. ▪ Terdapat alternatif mata pencaharian yang terkait dengan kelestarian lingkungan, seperti budidaya semut rangrang. ▪ Jumlah bantuan bagi UMK tidak sebesar beberapa LSM lainnya, tetapi menurut penerima bantuan, bantuan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat dan bermanfaat bagi perkembangan usaha mikro mereka.
Pengalaman Pembelajaran Untuk Kegiatan Dukungan Pascabencana di Masa Depan
Di masa depan, penting untuk menyentuh perempuan dan ibu-ibu. Saat bendungan dan irigasi rusak, kegiatan bertani yang dilakukan kaum pria umumnya tidak dapat berjalan dengan baik. Dan dukungan istri dengan

berjualan di kios, pasar, depan rumah, kantin sekolah, sangat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari.		
Tantangan		
▪ Meski manfaatnya sangat bagus, usaha mikro sektor riil seperti kios dan warung jajanan kecil tidak bisa dikembangkan secara besar-besaran karena ada kejenuhan pasar. Di satu desa, jumlah pelanggan tidak mencukupi kecuali pengusaha mikro mengembangkan dagangannya dengan menjual ke pasar umum. Untuk bercocok tanam, perlu lebih banyak alternatif tanaman yang dibutuhkan saat lahan rusak dan kesulitan air. ▪ Adanya fluktuasi data khususnya pada tahap tanggap darurat.		
Poin penting yang perlu diperhatikan dalam mereplikasi/peluasan di masa mendatang		
▪ Pada tahap tanggap darurat serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, penentuan penerima manfaat dilakukan secepatnya dalam kurun waktu yang singkat karena masyarakat butuh penghidupan yang baik dan cepat. ▪ Terkait program bencana, implementasi program harus lebih cepat, ringkas, dan sederhana. Jika program ingin mengembangkan mata pencaharian di desa yang belum mengalami bencana, masa intervensi akan lebih lama karena ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, dan lainnya. Berbeda jika suatu desa yang pernah/telah mengalami bencana, masa intervensi akan lebih singkat karena masyarakat segera membutuhkan makanan, pekerjaan dan tempat tinggal setelah bencana. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam perumusan strategi pemulihan mata pencaharian.		
Foto Proyek		
 Kegiatan Pelatihan Peternakan Alternatif  Pelatihan Mata Pencaharian  Pelatihan Pembuatan Pupuk Pupuk Organik Cair (POC) dan Pupuk Organik Padat (Kompos)  Peremajaan dengan metode Sambung Samping (Side Grafting) dan Sambung Pucuk (Cup on Grafting)  Cash for Work (Padat Karya)		
Situs/Tautan yang Bermanfaat untuk Informasi Lebih Lanjut		
http://www.bumitangguh.or.id/		

(4) Mercy Corps Indonesia (MCI)

Nama Proyek	Program Pemulihan Pertanian			Mercy Corps Indonesia
Lembaga Pelaksana	Mercy Corps Indonesia (MCI)			
Mitra Kerja dari Pemerintah Indonesia	1. Pemerintah Desa Taripa 2. Badan Penyuluh Pertanian (BPP)			
Lembaga Pendukung	PT. Kultiva			
Sektor Proyek	Pertanian			
Kegiatan Proyek	▪ Pelatihan budidaya tanaman coklat dan jagung ▪ Pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga		▪ Akses air untuk pertanian	
Jenis Proyek	Pemberdayaan Masyarakat			
Lokasi Proyek	1. Sigi (5 Kecamatan; 23 Desa) 2. Donggala (2 Kecamatan; 4 Desa)	Periode Pelaksanaan	Tanggal mulai: Jul. 2019 Tanggal selesai: Jul. 2020	
Anggaran Proyek (Rp)	N/A	Sumber Pendanaan	▪ PT. Cargill ▪ PT. Bayer ▪ Yayasan Syngenta	
Garis Besar Proyek				
1. Latar Belakang Pada tanggal 28 September 2018, gempa bumi 7,4M memicu tsunami, pencairan tanah, dan tanah longsor di Sulawesi Tengah, Indonesia yang menyebabkan 4.340 korban jiwa. 172.635 orang terlantar dan 100.028 rumah rusak (menurut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 7 Januari 2019). Daerah yang paling terkena dampak yang diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia adalah kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, dan Kota Palu. Total kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut sekitar Rp2,8 Triliun, dan total kerusakan seluruh provinsi mencapai Rp15,58 Triliun. Pada tahun 2019, ekonomi Sulawesi Tengah diprediksi tumbuh sebesar 6,24%. Pada tingkat pertumbuhan itu, ekonomi provinsi diharapkan menciptakan 30.168 lapangan kerja baru. Bencana telah segera memperlambat pertumbuhan menjadi 4,49%, yang secara signifikan akan mengurangi penciptaan lapangan kerja baru menjadi 8.461 orang¹. Tingkat kemiskinan akan meningkat lebih lanjut hingga 2020, menjadi 495.528 orang (16,05% dari populasi). Bencana ini juga secara signifikan mengurangi persediaan modal menjadi minus 9% yang setara dengan kerusakan infrastruktur Rp15 Triliun. Dibandingkan dengan tiga kota / kabupaten lain yang terkena dampak di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi memiliki wilayah pertanian terbesar yang terkena dampak bencana. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sigi (2019) menunjukkan bahwa sekitar 11.500 rumah tangga petani dengan 13.500 HA lahan pertanian terpengaruh; sebagian besar dari mereka adalah petani padi, jagung, dan kakao. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia (2018), sebagian besar jaringan irigasi di Kabupaten Sigi rusak, dan petani (terutama petani padi dan jagung) membutuhkan dukungan mendesak untuk memulihkan akses mereka ke sumber daya air. 2. Tujuan Mempercepat pemulihan petani dan membangun ketahanan dengan tujuan membantu keluarga petani pulih dari bencana sambil juga mengatasi dampak keseluruhan pada sektor pertanian untuk mengurangi dampak negatif jangka panjang dari gangguan berkelanjutan sejak peristiwa September untuk memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Sigi dengan fokus pada petani jagung dan kakao. 3. Indikator Sasaran (jika ada) ▪ 50 petani mengikuti ToT Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga ▪ 600 petani mengikuti Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga ▪ 200 petani mengikuti Pelatihan Teknik Budidaya Kakao ▪ 150 petani mengikuti Pelatihan Teknik Budidaya Jagung ▪ 418 Kepala Keluarga (1.603 Individu) mendapatkan akses air untuk pertanian melalui pompa air dan sumur dangkal				
Target Penerima Manfaat	2.603 Individu 418 KK/60 Kelompok	Inklusivitas populasi rentan	Penyandang Disabilitas, Kaum Perempuan, Lansia, Tuna Aksara	

Rincian Kegiatan / Bantuan Proyek
Mercy Corps Indonesia memberikan dukungan untuk akses air melalui sumur bor dan pompa air, sehingga petani dapat segera melanjutkan pertanian. Konsep yang diusulkan akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk petani jagung dan kakao di Kabupaten Sigi, sehingga sektor pertanian segera pulih setelah terdampak gempa bumi dan likuifaksi, mengembalikan produktivitas tanaman ke kondisi yang sama seperti sebelum bencana, dan untuk meningkatkan akses ke pasar dan layanan keuangan. MCI bekerja dalam kemitraan dengan kelompok tani lokal, agen penyuluh, kelompok masyarakat lokal dan sektor swasta untuk mengimplementasikan inisiatif pemulihan pertanian ini dan membantu petani dan komunitas mereka menjadi lebih tangguh.
Praktik dan Kebijakan Proyek
1. Memperkuat gotong-royong - MCI melakukan kegiatan berbasis masyarakat dengan melibatkan kelompok- kelompok tani, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), dan kelompok lainnya yang ada di level desa. - MCI memfasilitasi pengaktifan kelompok tani untuk terlibat aktif secara sukarela dalam kegiatan pertanian. Pemilihan dan pengaktifan kelompok dilakukan bersama dengan pemerintah desa, serta rekomendasi dari BPP dan PT. Kultiva. - Petani yang dilatih pada ToT Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga sudah menjadi fasilitator dan trainer untuk Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di tingkat desa. - Perubahan perilaku pada petani kakao yang melakukan peremajaan dan penebangan kakao yang sudah tua untuk memperbarui kondisi tanaman yang sudah tidak produktif. - Dua demplot jagung difasilitasi oleh MCI bekerjasama dengan kelompok tani menunjukan hasil ubin rata-rata panen diangka 7-9 ton/Ha dan mendorong petani untuk mereplikasi di lahan mereka masing- masing. - Satu demplot kakao dengan sistem polikultur berhasil mendorong petani untuk mereplikasi peremajaan kakao dengan menanam jagung dan papaya sebagai pendapatan alternatif. Peran masyarakat dalam kegiatan demplot adalah penyediaan lahan, penyediaan bahan baku dan sebagai tenaga kerja. - Pemulihan ekonomi petani setelah bantuan sumur dangkal pertanian berhasil mengaktifkan kembali 490 Ha lahan kering yang terdampak bencana akibat putusnya irigasi pertanian gumbasa. 2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas - Kriteria penerima manfaat ditentukan bersama dengan pemerintah desa dan BPP melalui koordinasi, sehingga dapat menjawab semua kebutuhan dan sesuai dengan sumber daya yang disediakan oleh MCI. Pemangku kepentingan dan masyarakat membuat kesepakatan untuk menetapkan kriteria penerima manfaat sebagai berikut: - Terdaftar di kelompok tani yang memiliki Surat Keterangan (SK) - Merupakan petani yang terdampak bencana 28 September 2019 dan terdata sebagai warga di desa sasaran program Mercy Corps Indonesia - Petani yang terlibat di dalam kegiatan MCI di data melalui verifikasi KTP dan KK - Seluruh dokumen kegiatan MCI dan masyarakat diketahui oleh kepala desa, dan lembaga terkait seperti BPP dan Komite Air. - MCI melakukan pertemuan di tingkat desa dan kecamatan dalam melakukan seleksi penerima manfaat untuk memastikan transparansi. - Surat perjanjian pembagian peran antara petani, kelompok tani dan MCI yang ditandatangani oleh seluruh pihak dan diketahui oleh kepala desa. - MCI memastikan adanya penyampaian laporan kerja oleh petani yang terlibat aktif dalam kegiatan MCI. - MCI menyimpan dokumentasi foto kegiatan dan daftar hadir untuk setiap kegiatan dan bukti serah terima barang. 3. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan dan rekonstruksi berkelanjutan - MCI memastikan rencana tindak lanjut di setiap pelatihan yang dilakukan. - MCI melakukan monitoring lapangan dan evaluasi program untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program. - MCI melakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan kebutuhan petani. - Masyarakat menyediakan lahan, sumber daya lain di desa, dan tenaga kerja untuk membantu kegiatan pembangunan MCI. - Masyarakat dan pihak desa sharing dana untuk memenuhi kebutuhan program yang tidak difasilitasi oleh MCI.

- MCI dan pemerintah desa Taripa berbagi sumber daya untuk peremajaan kakao, dengan kontribusi desa sebesar Rp 60.000.000. Mekanisme kemitraan dengan pemerintah desa didasarkan pada komitmen pemerintah desa untuk terus mengikuti perkembangan kegiatan peremajaan kakao tersebut.

4. Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi pada setiap tahap pemulihan dan rekonstruksi pascabencana

- MCI melakukan pengkajian melalui FGD dan KII untuk menemukan informasi dan data yang akurat terkait kondisi masyarakat pascabencana untuk menentukan program pemulihan yang tepat serta mempelajari dokumen terkait yang tersedia.

5. Inklusif

- MCI bekerja dengan semua golongan tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau orang dengan disability (cacat fisik, buta huruf, lansia, dll).
- MCI mengarahkan kepada kelompok tani, kader, dan pemerintah desa untuk melibatkan orang-orang dengan kebutuhan khusus pada kegiatan pelatihan.
- MCI memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan.

Pencapaian Aktual dan Efek Positif Tidak Terduga

- 58 petani mengikuti ToT pengelolaan keuangan rumah tangga
- 706 petani mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga
- 357 petani mengikuti pelatihan teknik budidaya kakao
- 399 petani mengikuti pelatihan teknik budidaya jagung
- 418 Kepala Keluarga (1.603 Individu) mendapatkan akses air untuk pertanian melalui pompa air dan sumur dangkal

Pengalaman Pembelajaran Untuk Kegiatan Dukungan Pascabencana di Masa Depan

- Koordinasi antar lembaga harus dilakukan secara regular, sehingga tidak ada program yang tumpang tindih tapi saling melengkapi.
- Peran pemerintah sebagai leading sektor untuk memastikan koordinasi dan peran seluruh lembaga non-pemerintah yang ada, sehingga bantuan yang diturunkan ke masyarakat bisa merata dan memenuhi seluruh kebutuhan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan data yang diperlukan untuk lembaga pelaksana sebelum melakukan intervensi. Koordinasi yang dilakukan lebih dulu akan sangat membantu dalam mendistribusikan bantuan dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
- Pemerintah perlu memiliki data primer dan sekunder yang baik untuk seluruh dampak bencana yang terjadi, baik secara ekonomi, infrastruktur, dll.

Tantangan

- Tidak tersedianya data yang komprehensif mengenai dampak bencana dan kebutuhan masyarakat untuk pemulihan pasca bencana.
- Pola ketergantungan masyarakat terhadap bantuan menjadi sebuah tantangan besar bagi lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat.
- Kecemburuan social yang ada di level masyarakat membuat lembaga non pemerintah yang memiliki sumber daya terbatas mengalami kesulitan untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat.

Poin penting yang perlu diperhatikan dalam mereplikas / Poin penting untuk perluasan di masa mendatang

- Harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.
- Penting untuk membangun konsensus dengan para pemangku kepentingan mengenai rencana dan strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan dukungan.

Foto kegiatan



Situs/Tautan yang Bermanfaat Untuk Informasi Lebih Lanjut

<https://www.mercycorps.or.id/program/palu-lombok-response>

(5) Yakkum Emergency Unit (YEU)

Nama proyek	Dukungan PaskaBencana kepada Lansia dan Disabilitas yang Terdampak Bencana Gempa Bumi, Likuifaksi dan Tsunami dengan Pendekatan Inklusif			
Lembaga Pelaksana	Yakkum Emergency Unit (YEU)			
Mitra Kerja dari Pemerintah Indonesia	1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial 2. Pemerintah Kabupaten Kota (Palu, Sigi, dan Donggala) - BPBD Palu, Sigi dan Donggala - Dinas Kesehatan Palu, Sigi dan Donggala - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sigi dan Donggala - Dinas Sosial Palu, Sigi dan Donggala - Dinas Peternekan Palu, Sigi dan Donggala - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sigi			
Lembaga Pendukung	Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)			
Sektor Proyek	- Pertanian - Peternakan - Furnitur - Konstruksi - Kerajinan Tangan - Usaha Kuliner			
Kegiatan Proyek	- Pelayanan kesehatan: posyandu lansia, home care, distribusi alat bantu untuk lansia dan disabilitas - Perlindungan: pengorganisasi lansia dan disabilitas - Bantuan dukungan mata pencarian			
Jenis Proyek	- Voucher/ Bantuan Non-Tunai - Pemberdayaan Masyarakat - Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan - Dukungan Kelompok Rentan (Inklusivitas Sosial)			
Lokasi Proyek	1. Palu (4 kecamatan, 7 kelurahan) 2. Sigi (6 kecamatan, 9 desa) 3. Donggala (4 kecamatan; 7 desa)	Periode Pelaksanaan		Bulan Mulai: September/2018 Bulan Selesai: Desember/ 2020
Anggaran Proyek (Rp)	36,039,677,139	Sumber Pendanaan		Help Age International, Christian Aid, Christofel Blind Mission, Tear and Act Alliance
Garis Besar Proyek				
1. Latar Belakang Paska bencana akses layanan kesehatan bagi lansian dan disabilitas sulit dan belum ramah sesuai kebutuhan sehingga Sebagian besar kebutuhan dasar lansia dan kelompok rentan tidak terpenuhi.				
2. Tujuan Program ini dirancang untuk mendekatkan/ membuka akses baik kesehatan, layanan home care, perlindungan dan pemenuhan hak lansian dan disabilitas.				
3. Indikator Sasaran - Lansia (L/P) dengan disabilitas memiliki peningkatan akses terhadap kesehatan dan perawatan rumah di 5 Desa. - Lansia (L/P) memiliki platform formal yang berkelanjutan untuk menyampaikan keprihatinan mereka dan melindungi hak-hak mereka. - Lansia (L/P), dan orang-orang penyandang cacat mendapatkan penghasilan melalui intervensi mata pencaharian yang tangguh.				

Target Penerima Bantuan	KK= 7.000 KK Laki-Laki= 14.000/P=21.000 Total=35.000	Inklusivitas Kelompok Rentan	Penyandang Disabilitas, Kaum Perempuan, Kaum Muda dan Lansia
Rincian Kegiatan / Bantuan Proyek			
- Untuk pemulihan mata pencaharian di bidang pertanian, konstruksi, kuliner, peternakan, dan kerajinan tangan yaitu melalui pemberian uang tunai dan pelatihan seperti pelatihan pembukuan, pengelolaan rantai pasar, pelatihan pengemasan, pelatihan promosi, pengembangan kapasitas internal lainnya - Penerima manfaat perlu membuat rencana usaha untuk beberapa minggu ke depan apabila ingin mencairkan dana tersebut. Isi dari <i>business plan</i> inilah yang dibutuhkan penerima manfaat untuk menjalankan usahanya. - Pelaksanaan kegiatan dukungan psikososial seperti senam bersama, sharing bersama, peningkatan keterampilan, permainan, dan studi banding dengan kelompok lain. - Memberikan perlindungan kepada lansia yaitu pelayanan kesehatan antara lain pos pelayanan KB - Kesehatan Terpadu (Posyandu) untuk lansia, perawatan di rumah, pembagian alat bantu untuk lansia dan penyandang disabilitas.			
Praktik dan Kebijakan Proyek			
Memperkuat gotong royong - Pendampingan lansia dilakukan dengan mengorganisir lansia dalam bentuk kelompok lansia, adanya media berbagi bersama seperti pertemuan bulanan dan dukungan sebaya. - Pelaksanaan kegiatan dukungan psikososial seperti senam bersama, sharing bersama, peningkatan keterampilan, permainan, dan studi banding dengan kelompok lain. - Lansia sehat membantu yang sakit, salah satunya adalah dana sukarela / sosial, dukungan keluarga, pemerintah desa untuk perumahan inklusif berupa tanah desa yang diberikan untuk pembangunan rumah bagi penyandang disabilitas Menjamin transparansi dan akuntabilitas - Program dilaksanakan secara partisipatif dan konsultatif dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi disabilitas, organisasi lansia, organisasi di desa dan tokoh agama. - Dilakukan diseminasi dan konsultasi publik untuk setiap kegiatan seperti sosialisasi persyaratan kriteria penerima manfaat, pemilihan penerima manfaat dan monitoring. - Program menyiapkan mekanisme pengaduan, laporan tertulis kepada para pihak YEU, dan media informasi seperti spanduk yang mudah dibaca oleh kelompok rentan Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan dan rekonstruksi yang berkelanjutan - Program ini merumuskan rencana bersama dan disepakati bersama antara desa dan lembaga, kemudian diselesaikan dengan pembagian peran desa dan lembaga. Pemerintah desa berperan sebagai pengendali dalam pembangunan hunian. - Penerima bantuan berkontribusi pada pembangunan hunian contohnya sebagai tukang dan juga secara mandiri menambahkan material khususnya material alam. untuk pemberdayaan ekonomi, penerima bantuan berkontribusi pada tenaga kerja dan juga ada upaya penambahan modal usaha - Program terkait dengan kebijakan pemerintah yaitu dengan melakukan sinkronisasi bantuan pemerintah dengan penerima manfaat YEU, sehingga mereka juga dapat memperoleh informasi dan bantuan dari program kerja pemerintah dan untuk menambah jangkauan pasar. Adapun yang dilakukan yaitu melatih penerima manfaat dengan mengajari mereka cara membuat kemasan yang baik dan memperkenalkan produk mereka kepada tokoh suvenir dan juga kepada anggota UMKM lainnya, sehingga produk tersebut lebih luas pemasarannya. Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi pada setiap tahap pemulihan dan rekonstruksi pascabencana - Perancangan akses ditujukan pada program kerja sektor konstruksi, bukan untuk mata pencaharian, seperti membangun perumahan dengan akses yang mudah bagi lansia. Inklusif - Menyediakan alat pendukung / akomodasi yang sesuai, menentukan tempat yang dapat diakses Bagi kelompok rentan - Melengkapi database dengan data terpilah serta memastikan akses informasi yang ramah untuk semua kelompok rentan - Pelibatan perempuan hingga pada pengambilan keputusan			

6. Lainnya ▪ Pelibatan kelompok rentan dipastikan dalam setiap tahap pelaksanaan, melibatkan pemerintah di setiap tahap dan pemerintah desa menjadi pengendali dalam pelaksanaan
Pencapaian Aktual dan Efek Positif Tidak Terduga
Pencapaian Aktual: Akses inklusif dalam konteks program ini adalah untuk menjamin akses informasi terkait program pemerintah, peluang mendapatkan bantuan pemerintah, membangun jejaring kemitraan, mandiri dan meningkatkan pendapatan sehingga penerima manfaat dapat mandiri.
Efek Positif yang Tidak Terduga: Semua kegiatan yang dilakukan YEU bersifat partisipatif, mulai dari penentuan kriteria penerima manfaat, penentuan penerima manfaat, dan pemantauan. Semuanya kegiatan tersebut dilakukan bersama pemangku kepentingan.
Pengalaman dan Pembelajaran untuk Proyek Rekonstruksi di Masa Depan
Pada program ini terdapat kendala atau kesulitan dalam mengumpulkan data terkait lansia dan disabilitas. Pihak desa belum menyamakan persepsi dengan YEU tentang definisi disabilitas. Sehingga perlu menjelaskan adanya penyamaan persepsi terkait definisi disabilitas
Tantangan
Pada awal survei, pemerintah desa tidak memahami cara mencari data terkait disabilitas, sehingga YEU perlu menggunakan kata-kata penyandang disabilitas-tuna rungu atau penyandang disabilitas fisik lainnya. Program tersebut tidak bisa mengandalkan data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), karena data BPS kondisi disabilitasnya tidak spesifik.
Perhatian Penting dalam Pelaksanaan Kegiatan Dukungan
Partisipasi dan Budaya
Foto Kegiatan
 Monitoring Bantuan Modal Usaha Lansia  Mobile Clinic pemeriksaan Lansia.  Koordinasi dengan Pemerintah Desa Bangga Terkait Penerima Manfaat Bantuan Non Tunai
Situs/tautan yang bermanfaat untuk informasi lebih lanjut
www.yeu.or.id Facebook: @Yakkum Emergency Unit

(6) PKBI-JMK OXFAM

Nama proyek	Pemulihan Mata pencaharian untuk sektor UMKM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui Dukungan Modal Usaha Kelompok			
Lembaga Pelaksana	PKBI-JMK OXFAM			
Mitra Kerja dari Pemerintah Indonesia	1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ▪ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ▪ Dinas Koperasi dan UMKM ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Peternakan ▪ Dinas Perikanan 2. Pemerintah kabupaten/kota (Palu, Sigi, dan Donggala)			
Lembaga Pendukung	1. Bank Mandiri 2. Telkomsel 3. Media Online			
Sektor Proyek	▪ Pertanian ▪ Perikanan ▪ Peternakan ▪ Usaha Makanan ▪ Olahan Makanan ▪ Kerajinan Tangan			
Kegiatan Proyek	▪ Pemberian Bantuan Modal Usaha ▪ Pemberian Pelatihan Sesuai Dengan Sektor (UMKM, Perikanan, Pertanian dan Peternakan) ▪ Pengenalan dan Pembuatan <i>Software</i> Digital Marketing ▪ Bantuan Perlitan ▪ Pembentukan Forum Ekonomi Desa			
Jenis Proyek	▪ Bantuan Tunai & Padat Karya ▪ Voucher/ Bantuan Non-Tunai ▪ Pemberdayaan Masyarakat ▪ Pemulihan Mata Pencaharian untuk Usaha Mikro dan Kecil			
Lokasi Proyek	1. Palu (3 kecamatan; 3 kelurahan) 2. Sigi (6 kecamatan; 6 desa): 3. Donggala (3 kecamatan; 11 desa):	Periode Pelaksanaan	Bulan mulai: Oktober/2018 Bulan selesai: September/2020	
Anggaran Proyek (Rp)	12,434,863,000	Sumber Pendanaan	Oxfam	
Garis besar Proyek				
1. Latar Belakang Rusak dan hilangnya asset matapencaharian masyarakat terdampak bencana PASIGALA 28 September 2018, khususnya sektor UMKM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan menyebabkan sumber penghasilan masyarakat terganggu dan cenderung tidak stabil bahkan ada yang tidak beroperasi sama sekali.				
2. Tujuan ▪ Pemulihan sumber penghasilan bagi masyarakat yang terdampak melalui dukungan Bantuan Modal sebesar Rp. 2.550.000 untuk 4.344 masyarakat terdampak bencana, pendampingan dan pelatihan ketahanan mata pencaharian, misalnya pada sektor perikanan (petani garam dan nelayan), UMKM (olahan makanan, kuliner dan kerajinan tangan serta tekstil) peternakan (peternakan kambing), dan pertanian (organik, hidroponik dan hidroponik). ▪ Melakukan pendekatan inklusif dalam memetakan / menilai potensi yang merupakan produk unggulan di suatu wilayah intervensi atau desa dan hasilnya yaitu kebutuhan akan pemulihan mata pencaharian di setiap desa seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan dan UKM. ▪ Digitalisasi. Pengenalan tentang dunia digital dengan melakukan peningkatan kapasitas untuk penyiapan				

SDM dalam melakukan hal tersebut. Penyiapan software digital dalam pemasaran produk. Pengujian aplikasi yang sudah dibuat untuk pemasaran hasil produksi misalnya (garam). Meluncurkan penggunaan digital pemasaran garam keluar daerah.

3. Indikator Sasaran:

- Pulihnya produktifitas Petani Garam Talise (-+ 70-80 ton/3 hari sebelum bencana. saat ini -+ 20 25 ton/3 Hari).
- Lebih kreatif dan terorganisir dalam mengelola usaha kelompok setelah adanya pelatihan seperti pengelolaan kelompok sesuai dasar kelompok yaitu, 1) penggaraman menggunakan bio membran (16 kelompok petani garam), 2) UKM (40 Kelompok UKM), pertanian organik, aquaponik, hidroponik (74 kelompok tani), 3) beternak kambing (66 kelompok peternakan), 4) menjahit (2 kelompok menjahit) dan 5) Nelayan (23 kelompok)
- Terciptanya masyarakat mandiri setelah pemberian Bantuan berupa pelatihan, modal usaha sebesar Rp. 2.550.000 dan pendampingan kepada 221 kelompok di PASIGALA (Palu, Sigi dan Donggala).
- 40 UMKM di 20 Desa/ Kelurahan mengetahui lebih banyak tentang usaha setelah diberikan pelatihan dasar dan umum, seperti pelatihan pembukuan, Bisnis Model Kanvas, *Business Impact Analysis* (BIA), dan Rencana Kerja Usaha (RKU) serta pemahaman tentang pentingnya pengemasan dalam suatu usaha untuk meningkatkan branding dan pemahaman mereka tentang pemasaran digital setelah menerima pelatihan digitalisasi.

Target Penerima Manfaat	Individual= 4,344 (2,825 laki-laki dan 1,519 perempuan)	Inklusivitas Kelompok Rentan	Penyandang Disabilitas, kaum Perempuan, Kaum Muda dan Lansia.
-------------------------	--	------------------------------	---

Rincian Kegiatan / Bantuan Proyek

- Program ini memberikan bantuan modal usaha untuk kelompok di 20 desa PASIGALA. Adapun kelompok tersebut sebagai berikut: 1) 23 kelompok perikanan; 2) 16 kelompok petani garam; 3) 40 kelompok UMKM; 4) 74 kelompok pertanian; dan; 5) 2 kelompok menjahit.
- Pemberian pelatihan manajemen kelompok diberikan sesuai dengan dasar-dasar kelompok seperti pada kelompok garam yaitu penggaraman menggunakan bio membran, pelatihan menjahit pada kelompok menjahit, pelatihan bertani organik, aquaponik, hidroponik pada kelompok pertanian, pelatihan beternak kambing pada kelompok peternakan dan untuk UMKM berupa pelatihan pembukuan, bisnis model kanvas, *Business Impact Analysis* (BIA), dan Rencana Kerja Usaha (RKU).
- Pemberian pelatihan pengemasan hingga pengenalan pasar digital untuk menjangkau target pembeli yang lebih luas.
- Bantuan peralatan pada kelompok nelayan berupa perahu untuk perorangan dan perahu kolektif yang dapat digunakan untuk kapasitas 8 orang dan alat tangkap lainnya.
- Pembentukan Forum Ekonomi Desa di setiap Desa sebagai media pemasaran dan publikasi bagi kelompok usaha (penerima manfaat) dan masyarakat penyintas pasca bencana.

Praktik dan Kebijakan Proyek

1. Memperkuat gotong royong

- (1) Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dalam pertemuan pendampingan kelompok.
 - Jadwal Rutin Produksi dan sekaligus jadwal rutin Rapat.
 - Pelatihan setiap kelompok tentang dasar kelompok, umkm tangguh, digitalisasi *marketing*, literasi keuangan, dll.
 - Pembuatan RAB, pembelanjaan, pembangunan dan perawatan aset kelompok secara musyawarah dan bersama-sama.
- (2) Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - Pelibatan Dinas-dinas dalam pelatihan dan advokasi tentang izin usaha. Seperti Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, sesuai peran dan fungsi masing-masing Dinas.
 - Pelibatan Pemprov Sulawesi Tengah, Pemkot Palu, dan Pemkab Donggala dan Sigi sebagai stakeholder dalam melakukan program.

2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas

- (1) Kriteria dan persyaratan menjadi penerima manfaat adalah sebagai berikut:
 - Dalam satu KK hanya satu orang yang dapat bergabung, tidak boleh lebih
 - Merupakan Masyarakat yang terdaftar di Desa Wilayah Dampingan (Mis. Sipi)
 - Berumur diatas 19 Tahun

- Memiliki KTP dan KK
 - Belum pernah mendapatkan bantuan yang sama atau kegiatan yang sama dari NGO lain.
 - Mau terlibat Aktif dalam kelompok
- (2) Kriteria dan syarat untuk kelompok, sebagai berikut:
- Kelompok telah memiliki SK dari desa atau bupati sebagai legalitas kelompok.
 - Kelompok beranggotakan minimal 20 orang, jika kurang akan didiskusikan kembali bersama fasilitator melalui diskusi kelompok
 - Kelompok harus siap bekerjasama
 - Kelompok harus bersepakat bahwa semua yang telah diberikan JMK-OXFAM merupakan aset kelompok dan tidak bias menjadi Hak Milik Pribadi.
 - Kelompok harus membuat proposal beserta RAB sehingga proyek bisa mendapatkan gambaran kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok harus bersifat produktif dan dapat digunakan bersama.
 - Kelompok yang dapat bergabung adalah usaha berkelompok dan dapat dilaksanakan Bersama-sama dengan kelompok.
- (3) Tim dari JMK OXFAM melakukan sosialisasi secara terbuka di daerah sasaran dan menyampaikan kriteria serta persyaratan kepada seluruh peserta.
- Tim mempercayakan petugas CO (Community Organizer) kepada petugas pendamping di tiap desa untuk menginput database penerima manfaat yang terdaftar sehingga semua pendaftar telah melalui verifikasi pihak desa.
 - Proses Verifikasi, Validasi hingga Finalisasi dilakukan Bersama aparat Desa. Untuk melihat mengecek anggota dalam KK, penerima manfaat, dan ketidakvalidan database yang ada.
 - Pengumpulan berkas-berkas yang disyaratkan untuk kelompok
- (4) Pendaftaran dilakukan secara terbuka dan tidak ada rahasia. Semua orang berhak untuk mengambil dirinya.
- Daftar penerima bantuan yang telah final diumumkan di papan pengumuman di Kantor Desa wilayah dampingan.
 - Memberikan File Database/Baseline kepada pihak desa agar dapat digunakan kembali dikemudian hari.

3. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pemulihan dan rekonstruksi yang berkelanjutan

- (1) Setiap Kelompok dipersilahkan untuk bermusyawarah bersama kelompoknya masing-masing dalam penentuan RAB kelompok.
- Setiap Kelompok dipersilahkan untuk bermusyawarah kembali Bersama kelompoknya masing-masing setelah pencairan Bantuan Modal Usaha untuk membelanjakan aset kelompok Bersama-sama sesuai kesepakatan.
- (2) Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dalam pertemuan pendampingan kelompok.
- Jadwal Rutin Produksi dan sekaligus jadwal rutin Rapat.
 - Pelatihan setiap kelompok tentang dasar kelompok, umkm tangguh, digitalisasi marketing, literasi keuangan, dll.
 - Pembuatan RAB, pembelanjaan, pembangunan dan perawatan aset kelompok secara musyawarah dan bersama-sama.
- (3) Memberdayakan masyarakat anggota kelompok yang berprofesi sebagai keahlian tertentu untuk dijadikan sebagai kepala proyek dalam suatu pengerjaan, seperti Tukang pembuatan Kandang Kambing, Pembuatan Kolam, Pembuatan drainase pertanian Padi, Event Catering, dll.

4. Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi pada setiap tahap pemulihan dan rekonstruksi pascabencana

Kebutuhan prioritas telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai perancangan RAB dalam kelompok, daftar kebutuhan kelompok dimusyawarahkan bersama agar benar-benar sesuai kebutuhan bukan sekedar keinginan.

5. Inklusif

- (1) Memberikan penjelasan kepada kelompok tentang pembagian peran dalam produktivitas kelompok dan pemberian hak yang adil kepada masing-masing anggota khususnya untuk anggota inklusi/rentan.
- (2) Membuat kebijakan syarat untuk menjadi penerima manfaat diharuskan usia remaja produktif mulai dari 19 Tahun hingga usia yang tidak ditentukan. Lansia dapat terlibat dalam kelompok usaha jika masih produktif dan dapat berbagi peran dengan anggota kelompok lainnya. Tidak membatasi gender apapun dalam kelompok.
- (3) Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap gender untuk menjadi anggota kelompok bahkan

memegang posisi tertentu dalam kelompok, seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Tidak mendiskriminasi penerima manfaat, memperlakukan penerima manfaat secara adil dan seimbang.
Pencapaian Aktual dan Efek Positif Tidak Terduga
(1) Pencapaian Aktual - Dukungan bantuan modal usaha kepada 221 kelompok yang terdiri dari 23 kelompok perikanan, 74 kelompok petani, 16 kelompok petani garam, 66 kelompok ternak, 40 kelompok UMKM dan 2 kelompok menjahit. Kelompok ini berasal dari 20 desa/ kelurahan yang telah dibentuk dan berjumlah 4.344 jiwa, masing-masing berikan bantuan modal sebesar Rp. 2.550.000 dan dibagi menjadi 2 tahapan, tahap pertama sebesar Rp. 1.650.000 dan tahap kedua Rp. 650.000 yang sebelum proses pencairan dana tersebut akan dibuatkan RAB dan setelah pencairan dana tersebut digunakan sebagai modal usaha bersama dan aset kelompok. - Bantuan 50 unit gerobak dorong di setiap desa dampingan dan disalurkan kepada setiap kelompok yang membutuhkan. - Melek Teknologi. Sebelumnya penerima manfaat hanya mengandalkan pasar tradisional/ metode konvensional, setelah pendampingan penerima manfaat dapat merambah pasar modern dan memanfaatkan platform digital (lokapasar) untuk meningkatkan mata pencahariannya. - Pemahaman kelompok terkait basic kelompok dan administrasi menjadi semakin tertata rapi. - Kelompok memahami terkait bisnis Model Kanvas, <i>Business Impact Analysis</i> (BIA) dan RKU (Rencana Kerja Usaha) dan dapat terimplementasikan kedalam usaha mereka, sehingga mereka dapat menganalisis sebelum melakukan suatu tindakan usaha. (2) Efek Positif yang Tidak Terduga - Penerima manfaat mau bekerjasama dalam kelompok untuk melakukan usaha. Pandangan usaha kelompok/Bersama tidak menjadi hal negative dari pemikiran anggota kelompok usaha. - Terjalin kerjasama yang baik antar wilayah dampingan dalam menentukan harga pasaran suatu barang. Melihat peluang yang baik untuk suatu usaha, dll. - Terjalin kerjasama antara kelompok yang memproduksi bahan baku dengan kelompok yang mengelola menjadi suatu makanan/masakan. - Membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat diluar kelompok. Pembuatan Kandang, pembuatan Kolam, Pengolahan Sagu, dll. - Penerima Manfaat menjadi lebih mandiri untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Pengalaman Pembelajaran untuk Proyek Rekonstruksi di Masa Depan
Keterlibatan penerima manfaat dalam menentukan spesifikasi peralatan agar peralatan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, tujuannya agar peralatan yang akan dibeli dapat digunakan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Tantangan
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Staf) dalam mengelola suatu program. - Waktu yang sangat singkat untuk program pemberdayaan masyarakat, Keberlanjutan dan pemulihan matapencaharian. Yaitu selama 10 Bulan untuk 20 Wilayah dampingan dengan jumlah kelompok sebanyak 221 (4.344 orang/KK). - Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan program JMK-Oxfam memiliki beberapa staf tambahan.
Perhatian Penting dalam Pelaksanaan Kegiatan Dukungan
- Diperlukan data yang benar-benar valid dan terupdate dari pihak pemerintah agar dapat di sinkronkan dan tervalidasi dengan jelas siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat.. - Diperlukan anggaran khusus dalam menangani setiap desa seperti perwakilan desa khusus yang dapat membantu staf. - Melakukan pengkajian dengan baik agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. - Menjadi orang yang memiliki hubungan baik dengan pemangku kepentingan lokal yang dapat menjadi sumber kebijakan misalnya pemerintah desa, hal ini penting karena membangun hubungan dengan pemerintah desa akan berdampak positif terhadap keberlanjutan program. - Memahami karakter, tradisi dan budaya suatu wilayah tertentu - Menjadi orang yang tegas yang tidak melukai perasaan orang lain, terutama penerima manfaat. Hal ini penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan untuk meminimalisir kecemburuan sosial perlu dilakukan sosialisasi mengenai kebutuhan penerima manfaat. - Memahami program sebelum menjalankan program penting agar program yang dilaksanakan tidak

bertentangan dengan budaya dan tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Foto Kegiatan



Pelatihan UMKM Tangguh Desa Toaya
Induk. Fasilitator dari Desa melalui ToT



Pelatihan Aquaponik dan pembuatan
rockwool untuk menyemai sayuran.



Produktivitas kelompok dalam
membuat Kue

Situs/ tautan yang bermanfaat untuk informasi lebih lanjut

https://instagram.com/jmk_oxfam?igshid=16pgdeinzdn61

<https://www.facebook.com/jmk.indonesia/>

6. Contoh Program Kegiatan Pemda di Sulawesi Tengah

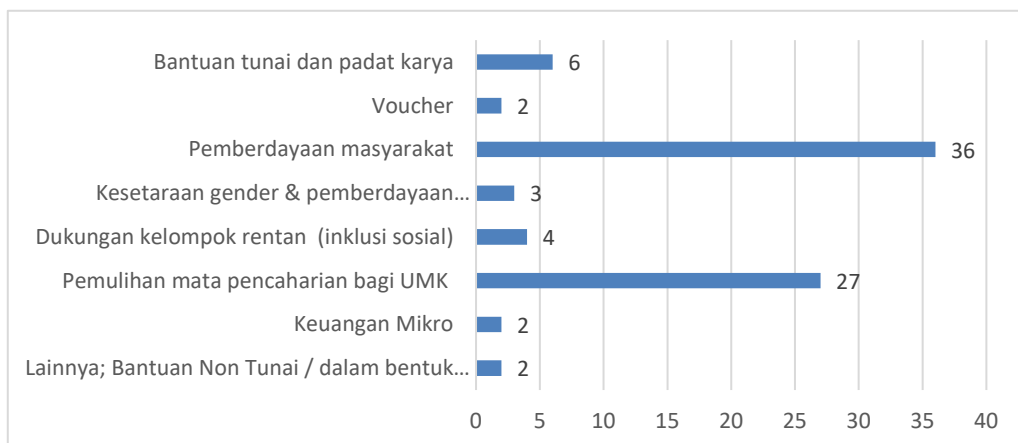
Tabel-8 Program/ kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 dan 2019

(1) Program Kegiatan oleh Pemerintah Kota, Kabupaten dan Provinsi

No	Sektor	Fase	Kegiatan
1	Pertanian	Rehab - Rekon	Distribusi benih dan pupuk untuk musim tanam yang akan datang
			Pencairan dana melalui program Kementerian Sosial
			Pembangunan area lantai jemur (<i>drying floor</i>)
2	Perikanan	Rehab - Rekon	Penyediaan peralatan untuk budidaya perikanan seperti benih ikan, pakan, obat-obatan dan kolam ikan bioflok; Rehabilitasi kolam ikan, perahu dan alat tangkap nelayan
			Pengadaan pelatihan secara teknis untuk produk olahan ikan
3	Peternakan	Rehab - Rekon	Rehabilitasi Rumah Penangkaran
4	Konstruksi	Rehab - Rekon	Rehabilitasi dan penyediaan pasar; Distribusi barang sebagai langkah awal untuk memulai usaha bagi penerima bantuan
5	Otomotif	Rehab - Rekon	Pelatihan dan pemberian peralatan penunjang
6	Furnitur	Rehab - Rekon	Pemberian peralatan untuk memulai bisnis
7	Usaha Kuliner	Rehab - Rekon	Pemberian peralatan, pelaksanaan pelatihan teknis pengolahan pangan dan bantuan dana
8	Makanan Olahan	Rehab - Rekon	Pelatihan kewirausahaan dan bantuan keuangan bagi pelaku usaha
9	Jasa	Tanggap Darurat	Penyediaan mesin jahit; Pelatihan pengembangan kapasitas bagi perempuan; Pelatihan untuk pemulihan trauma
10	Kerajinan Tangan	Rehab - Rekon	Bantuan pendanaan untuk penerima manfaat agar dapat memulai usaha kembali
11	Tekstil	Rehab - Rekon	Pelatihan peningkatan kapasitas industri dan teknologi
12	UMKM dan Koperasi	Rehab - Rekon	Bantuan pendanaan untuk penerima manfaat agar dapat memulai usaha kembali

Seperti yang ditampilkan di Gambar 5, klasifikasi jenis kegiatan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi, menunjukkan bahwa "Pemberdayaan masyarakat" dan "Pemulihan Mata Pencaharian bagi UMK " telah dilaksanakan dengan baik. Data menunjukkan bahwa pemerintah menitikberatkan pada kemandirian dan rasa kepemilikan masyarakat dalam program/kegiatan pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat. Selain itu, di daerah

bencana, ada banyak UMK yang mendukung perekonomian masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung UMK terdampak melalui pelatihan kapasitas dan pelatihan usaha guna memungkinkan mereka memulai kembali usahanya, terutama di sektor perikanan, makanan olahan dan usaha kuliner



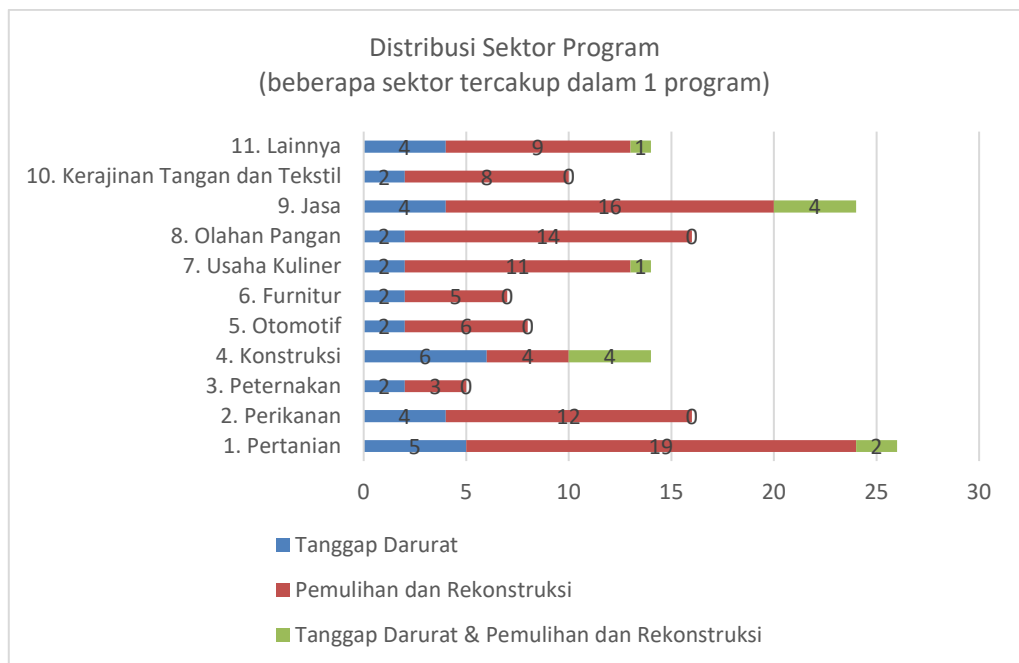
Gambar 5 Jenis Program/Kegiatan Pemerintah Daerah

(2) Program Kegiatan oleh NGO dan Mitra Pembangunan

No.	Sektor	Tahapan	Kegiatan
1	Pertanian	Tanggap Darurat	- Pengadaan benih dan pupuk; - Pendampingan teknis untuk peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana
		Rehab - Rekon	- Pelatihan penanaman dan permakultur; - Pemberian alat pertanian dan benih sayur organik - Pelatihan dan dukungan terkait <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP)
2	Peternakan	Rehab - Rekon	- Pelatihan peternakan, manajemen kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan
3	Otomotif	Rehab - Rekon	- Pelatihan keterampilan dan perencanaan usaha; - Rekapitulasi Usaha Otomotif untuk bantuan pendanaan
4	Konstruksi	Tanggap Darurat	- Distribusi <i>Emergency Shelter Kits</i> dan Kit Higiene; - Padat karya untuk membersihkan puing/reruntuhan pascabencana - Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi yang Layak - Penguatan/Rehabilitasi untuk struktur dan/atau arsitektur bangunan
		Rehab - Rekon	- Pelatihan pertukangan dan pekerja konstruksi; - Pembangunan kompleks <i>Integrated Community Shelter</i> (ICS)
5	Kerajinan Tangan dan Tekstil	Rehab - Rekon	- Pelatihan keterampilan pembuatan batu bata untuk pria/wanita; - Pelatihan pembuatan furnitur
6	Usaha Kuliner	Tanggap Darurat	- Distribusi alat dan bahan baku produksi serta pelatihan menghitung (pembukuan);

No.	Sektor	Tahapan	Kegiatan
	Usaha Kuliner (lanjutan)	Tanggap Darurat	- Inovasi usaha industri rumah tangga
		Rehab - Rekon	- Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan rencana dan manajemen usaha, serta penyediaan bahan baku makanan.
7	Perikanan	Tanggap Darurat	- Bantuan peralatan tangkap kepada nelayan sebagai dorongan untuk memulai aktifitas kembali
		Rehab - Rekon	- Pemberian bantuan perahu, peralatan tangkap dan rumpon; - Pelatihan dan pendampingan untuk pembuatan rencana usaha
8	Makanan Olahan	Rehab - Rekon	- Pelatihan manajemen usaha, pemasaran dan keuangan; - Penyediaan bahan baku dan peralatan memasak
			- Bantuan permodalan dan produk olahan
9	Furnitur	Rehab - Rekon	- Pelatihan usaha secara teknis; - Pendampingan pembuatan rencana usaha; - Distribusi bantuan hibah bersyarat
10	Kerajinan Tangan	Rehab - Rekon	- Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan usaha; - Bantuan pendanaan, peralatan dan perlengkapan untuk usaha kecil; - Pelatihan keterampilan untuk mata pencaharian alternatif
			- Pembuatan energi alternatif yaitu tungku hemat energi dan riset energi alternatif
11	Kesehatan	Rehab - Rekon	- Penyediaan Hygiene Kits untuk anak-anak; - Kegiatan Mobile Clinic (Klinik Keliling); - Kegiatan Psikososial anak;
12	Usaha Mikro dan Kecil	Tanggap Darurat	- Pelayanan kesehatan dan distribusi alat bantu untuk lansia dan disabilitas
			- Pemberian bantuan modal usaha (stimulan), dan pendampingan pelatihan
13	Peternakan	Tanggap Darurat	- Dukungan teknis untuk persiapan pemulihan dini pada masa tanggap darurat
		Rehab - Rekon	- Bantuan penggantian pakan ternak; Pelatihan peternakan
14	Jasa	Tanggap Darurat	- Distribusi Emergency Shelter Kits dan Hygiene Kits; - Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi; - Penyediaan Hunian Sementara
		Rehab - Rekon	- Pencairan bantuan tunai; - Pelaksanaan pelatihan manajemen usaha
15	Kesiapsiagaan bencana	Rehab - Rekon	- Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang inklusif melalui inisiasi Desa Tangguh Bencana; - Penguatan kesiapsiagaan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana
16	Tekstil	Tanggap Darurat	- Distribusi bantuan darurat berupa paket makanan dan higiene kits; - Penyediaan ruang untuk anak-anak dan sumber air
		Rehab - Rekon	- Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan rencana usaha
			- Pelatihan Tanggap Darurat dan Core Humanitarian Standard (CHS)

Gambar 6 di bawah ini mengilustrasikan jenis sektor beserta jumlah program kegiatan terkait yang dilaksanakan oleh NGO dan mitra pembangunan. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa sektor “Pertanian” dengan total 26 program kegiatan merupakan sektor sasaran utama, diikuti dengan sektor “Jasa”. Pada masa tanggap darurat, khususnya tepat setelah terjadi bencana, sektor konstruksi dan jasa adalah sektor utama yang dilaksanakan karena NGO dan mitra pembangunan masih berfokus pada penyediaan tempat pengungsian dan kebutuhan dasar hidup. Sedangkan, pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berbagai jenis program kegiatan terkait pemulihan mata pencaharian khususnya, program kegiatan terkait pangan, seperti pertanian, perikanan dan makanan olahan dengan mempertimbangkan struktur industri asli di Sulawesi Tengah.



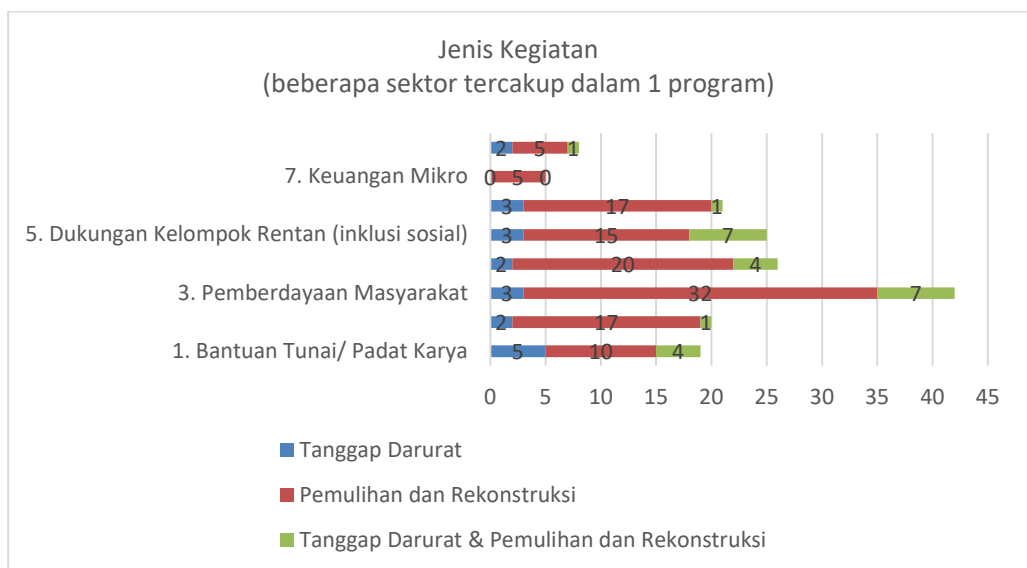
Gambar 6 Distribusi Sektor Program NGO dan Mitra Pembangunan

Dari Gambar 7 terlihat bahwa Jenis Kegiatan “Pemberdayaan Masyarakat”, “Dukungan terhadap Kelompok Rentan” serta “Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan” merupakan kegiatan dukungan yang paling banyak dilakukan pada masa tanggap darurat serta masa pemulihan dan rekonstruksi. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat serta pertumbuhan sosial ekonomi pascabencana dalam jangka

panjang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi pondasi dari kegiatan lainnya.

Jika ditinjau secara keseluruhan, terlihat bahwa jenis kegiatan yang dilaksanakan mendorong terciptanya kegiatan berkelompok dan gotong royong. Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan trauma dan sosial-ekonomi pascabencana terdapat ruang lingkup komunikasi antar manusia yang amat luas, seperti interaksi antar wilayah, berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausaha, penyediaan pelatihan berwirausaha dan dukungan psikososial. Guna menjamin keadilan dan transparansi dalam penyeleksi penerima manfaat, perlu dipertimbangkan keseimbangan gender, keragaman masyarakat dan kelompok rentan dalam seleksi penerima manfaat. Hal tersebut perlu dipertimbangkan juga dalam proses seleksi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan.

Guna mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan amatlah penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat/penerima manfaat terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan serta mengelola peran serta penerima manfaat, pemerintah serta lembaga terkait lainnya.



Gambar 7 Jenis Program/Kegiatan NGO dan Mitra Pembangunan

7. Contoh Kuesioner Survei Awal

No. Formulir:

Kuesioner Survei Awal

Didanai oleh: JICA

Proyek: Proyek Pengembangan Rencana Ketahanan Risiko Bencana Daerah di Sulawesi Tengah

Nama Proyek Percontohan: Proyek Pemulihan Mata Pencarian Kaum Perempuan di Shelter Evakuasi Balaroa

(1) Profil Dasar

1-1.	Nama Responden	
1-2.	Tanggal Lahir (Umur)	Tahun , Bulan , Tanggal (Umur:)
1-3.	Jenis Kelamin	① Pria ② Wanita
1-4.	Agama	① Islam ② Kristen ③ Lainnya (sebutkan:)
1-5.	Suku/Etnis	
1-6.	Alamat	Pascabencana (blok shelter /No. Tenda)
		Sebelum bencana (alamat terdaftar/sesuai KTP)
1-7.	Struktur Keluarga	Jumlah anggota keluarga : orang
		Nama, umur dan hubungan anggota keluarga dengan responden; 1. (Umur:), (Hubungan;)
		2. (Umur:), (Hubungan;)
		3. (Umur:), (Hubungan;)
		4. (Umur:), (Hubungan;)
		5. (Umur:), (Hubungan;)
		6. (Umur:), (Hubungan;)
		7. (Umur:), (Hubungan;)
		8. (Umur:), (Hubungan;)
		Nama Kepala Keluarga :
		Apakah terjadi perubahan struktur keluarga pascabencana (anggota keluarga dalam 1 KK yang meninggal, keluar kota karena sesuatu keperluan, perubahan kepala keluarga, dll)?

	① Ya ; mohon sebutkan nama, hubungan keluarga, umur: ② Tidak
Foto Keluarga	(Ditempelkan oleh penyurvei)

(2) Ekonomi dan Status Pekerjaan Keluarga

2-1.	Status Pekerjaan	Setelah bencana	Apakah Anda saat ini memiliki pekerjaan yang menghasilkan upah atau gaji? (termasuk usaha mandiri) ① purna waktu ② paruh waktu (sekitar ____ kali/minggu) ③ kerja harian (sekitar ____ kali/minggu) ④ tidak bekerja																					
		Sebelum Bencana	Apakah Anda saat ini memiliki pekerjaan yang menghasilkan upah atau gaji? (termasuk usaha mandiri) ① purna waktu ② paruh waktu (sekitar ____ kali/minggu) ③ kerja harian (sekitar ____ kali/minggu) ④ tidak bekerja																					
2-2.	Pekerjaan	Pascabencana	Pekerjaan Anda: _____ Pekerjaan Anggota Keluarga Anda <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>(Hubungan)</th> <th>Pekerjaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. _____</td> <td>(_____)</td> <td>_____ ;</td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td>(_____)</td> <td>_____ ;</td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td>(_____)</td> <td>_____ ;</td> </tr> <tr> <td>4. _____</td> <td>(_____)</td> <td>_____ ;</td> </tr> <tr> <td>5. _____</td> <td>(_____)</td> <td>_____ ;</td> </tr> <tr> <td>6. _____</td> <td>(_____)</td> <td>_____ ;</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	(Hubungan)	Pekerjaan	1. _____	(_____)	_____ ;	2. _____	(_____)	_____ ;	3. _____	(_____)	_____ ;	4. _____	(_____)	_____ ;	5. _____	(_____)	_____ ;	6. _____	(_____)	_____ ;
Nama	(Hubungan)	Pekerjaan																						
1. _____	(_____)	_____ ;																						
2. _____	(_____)	_____ ;																						
3. _____	(_____)	_____ ;																						
4. _____	(_____)	_____ ;																						
5. _____	(_____)	_____ ;																						
6. _____	(_____)	_____ ;																						
Sebelum Bencana	Pekerjaan Anda: _____																							

			Pekerjaan Anggota Keluarga Anda <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>(Hubungan)</th> <th>Pekerjaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. _____</td> <td>(_____)</td> <td>; _____ ;</td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td>(_____)</td> <td>; _____ ;</td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td>(_____)</td> <td>; _____ ;</td> </tr> <tr> <td>4. _____</td> <td>(_____)</td> <td>; _____ ;</td> </tr> <tr> <td>5. _____</td> <td>(_____)</td> <td>; _____ ;</td> </tr> <tr> <td>6. _____</td> <td>(_____)</td> <td>; _____ ;</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	(Hubungan)	Pekerjaan	1. _____	(_____)	; _____ ;	2. _____	(_____)	; _____ ;	3. _____	(_____)	; _____ ;	4. _____	(_____)	; _____ ;	5. _____	(_____)	; _____ ;	6. _____	(_____)	; _____ ;									
Nama	(Hubungan)	Pekerjaan																															
1. _____	(_____)	; _____ ;																															
2. _____	(_____)	; _____ ;																															
3. _____	(_____)	; _____ ;																															
4. _____	(_____)	; _____ ;																															
5. _____	(_____)	; _____ ;																															
6. _____	(_____)	; _____ ;																															
2-3.	Tempat Kerja		Jika Anda memiliki pekerjaan, dimanakah Anda Bekerja? ① Rumah ② di Mpanau ③ Lainnya (Sebutkan: _____)																														
2-4.	Pendapatan	Pascabencana Sebelum Bencana	Saat ini, berapa jumlah pendapatan Anda?; Rp. _____/bulan Berapa jumlah pendapatan anggota keluarga Anda? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>(Hubungan)</th> <th>Jumlah Pendapatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• _____</td> <td>(_____)</td> <td>Rp. _____/bulan</td> </tr> <tr> <td>• _____</td> <td>(_____)</td> <td>Rp. _____/bulan</td> </tr> <tr> <td>• _____</td> <td>(_____)</td> <td>Rp. _____/bulan</td> </tr> <tr> <td>• _____</td> <td>(_____)</td> <td>Rp. _____/bulan</td> </tr> </tbody> </table> Sebelumnya, berapa jumlah pendapatan Anda? Rp. _____/bulan Berapa jumlah pendapatan anggota keluarga Anda? <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>(Hubungan)</th> <th>Pendapatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• _____</td> <td>(_____)</td> <td>Rp. _____/bulan</td> </tr> <tr> <td>• _____</td> <td>(_____)</td> <td>Rp. _____/bulan</td> </tr> <tr> <td>• _____</td> <td>(_____)</td> <td>Rp. _____/bulan</td> </tr> <tr> <td>• _____</td> <td>(_____)</td> <td>Rp. _____/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	(Hubungan)	Jumlah Pendapatan	• _____	(_____)	Rp. _____/bulan	• _____	(_____)	Rp. _____/bulan	• _____	(_____)	Rp. _____/bulan	• _____	(_____)	Rp. _____/bulan	Nama	(Hubungan)	Pendapatan	• _____	(_____)	Rp. _____/bulan	• _____	(_____)	Rp. _____/bulan	• _____	(_____)	Rp. _____/bulan	• _____	(_____)	Rp. _____/bulan
Nama	(Hubungan)	Jumlah Pendapatan																															
• _____	(_____)	Rp. _____/bulan																															
• _____	(_____)	Rp. _____/bulan																															
• _____	(_____)	Rp. _____/bulan																															
• _____	(_____)	Rp. _____/bulan																															
Nama	(Hubungan)	Pendapatan																															
• _____	(_____)	Rp. _____/bulan																															
• _____	(_____)	Rp. _____/bulan																															
• _____	(_____)	Rp. _____/bulan																															
• _____	(_____)	Rp. _____/bulan																															

2-5.	Harapan/keinginan Anda terhadap ekonomi keluarga, serta apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut	
------	---	--

(3) Kehidupan dan Kegiatan Rutin Harian

3-1.	Kegiatan Rutin Harian	Pascabencana	Berapa lama Anda melakukan kegiatan berikut ini (=24 jam)? 1. Kegiatan produktif*: _____jam (*kegiatan yang menghasilkan uang) Sebutkan: _____ 2. Memasak/mencuci piring: _____jam 3. Membersihkan rumah/mencuci pakaian: _____jam 4. Merawat (anak, orang tua, orang sakit): _____jam 5. Pekerjaan rumah tangga lainnya: _____jam 6. Tidur: _____jam 7. Kegiatan bermasyarakat/sosial : _____jam 8. Waktu luang/hobi : _____jam
		Sebelum bencana	Berapa lama Anda melakukan kegiatan berikut ini (=24 jam)? 1. Kegiatan produktif*: _____jam (*kegiatan yang menghasilkan uang) Sebutkan: _____ 2. Memasak/mencuci piring: _____jam 3. Membersihkan rumah/mencuci pakaian: _____jam 4. Merawat (anak, orang tua, orang sakit): _____jam 5. Pekerjaan rumah tangga lainnya: _____jam 6. Tidur: _____jam 7. Kegiatan bermasyarakat/sosial : _____jam 8. Waktu luang/hobi : _____jam

3-2.	Membuat Keputusan dalam Keluarga	Apakah Anda dapat membuat keputusan terhadap hal-hal berikut ini? Jika tidak, siapa yang biasanya memutuskan hal tersebut. ① Boleh/tidaknya bekerja dan tempat bekerja (_____) ② Mengeluarkan uang (_____) ③ Menabung (_____) ④ Menjual properti/aset (_____) ⑤ Mengikuti kegiatan/kelompok/sosial (_____)
3-3.	Kegiatan Sosial/Kemasyarakatan oleh Organisasi Lainnya (Donor, LSM, Pemerintah, dll)	Saat ini, apakah Anda terlibat dalam kegiatan sosial/kemasyarakatan? 1. Jenis kegiatan; _____ (Organisasi pelaksana; _____) 2. Frekuensi (seberapa sering dilakukan); _____ 3. Tempat kegiatan; _____ 4. Alasan tidak mengikuti kegiatan sosial/kemasyarakatan; ① Terlalu sibuk ② Sedikit/tidak ada pengertian dari anggota keluarga ③ Kegiatan tersebut kurang bermanfaat/kurang menarik bagi saya ④ Lainnya (_____)

(4) Harapan/Keinginan di Masa Depan

4-1.	Efek dari Proyek Percontohan	Apakah menurut Anda pelatihan yang dilakukan oleh proyek percontohan ini bermanfaat dalam hal: (beri tanda silang pada pilihan yang sesuai) 1. Menghilangkan/mengurangi stress Anda pascabencana: ① Sangat bermanfaat ② Bermanfaat ③ Tergantung/tidak tahu ④ Tidak 2. Memulihkan/menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan ① Sangat bermanfaat ② Bermanfaat ③ Tergantung/tidak tahu ④ Tidak 3. Membantu memulihkan mata pencaharian/pendapatan Anda ① Sangat bermanfaat ② Bermanfaat ③ Tergantung/tidak tahu ④ Tidak
4-2.	Pelatihan Lainnya	Apakah Anda berminat untuk mengikuti pelatihan lainnya di masa mendatang? ① Ya (sebutkan jenis pelatihan yang ingin diikuti _____) ② Tidak
4-3.	Pekerjaan	Apakah Anda memiliki harapan/keinginan khusus terkait pekerjaan di masa mendatang? ① Saya ingin bekerja penuh waktu (sebutkan jenis pekerjaan _____) ② Saya ingin bekerja paruh waktu (sebutkan jenis pekerjaan _____) ③ Saya belum ada ide untuk saat ini ④ Saya sudah puas dengan kondisi saat ini ⑤ Lainnya (jelaskan _____)
4-4.	Tempat Tinggal	Dimana Anda ingin tinggal di masa mendatang? ① Tempat/lokasi _____ ② Alasan memilih lokasi di atas _____

